Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan

Vol. 29 No. 1, 2024

p-ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-2191

117

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

Catatan Jurnal Perempuan
Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

Artikel

"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan":
Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah
Andi Misbahul Pratiwi, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Lia Anggiasih, Junito Drias & Ayu Siantoro

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus
Antik Bintari

Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital
Lidwina Inge Nurtjahyo

Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS
Desintha Dwi Asriani & Defirentia One Muharomah

Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat
Melya Findi Astuti, Tracy Pasaribu, & Widya Anggraini

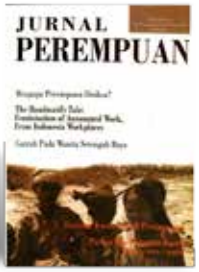
Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia
Retno Daru Dewi G. S. Putri

Diterbitkan oleh:

YAYASAN YJP JURNAL PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai beriktut:

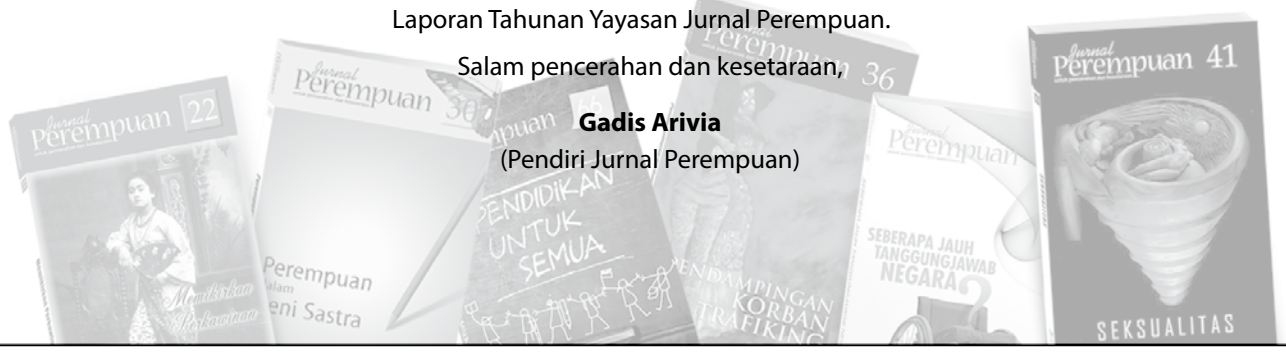
- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8
(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).
Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan

Vol. 29 No. 1, 2024

ISSN 1410-153X

PENDIRI
Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA
Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DEWAN PENGAWAS
Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

DEWAN REDAKSI
Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI
Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

MITRA BESTARI
Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universias Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI
Retno Daru Dewi G. S. Putri, M.A., M.Hum.
Nada Salsabila, S.Hum.

REDAKSI TAMU
Ikhaputri Widiantini, S.Hum., M.Si.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING
Himah Sholihah

DESAIN & TATA LETAK
Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN
Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI
Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Instagram: @jurnal_perempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan
Twitter/X: @jurnalperempuan
Youtube: Video Jurnal Perempuan

WEBSITE
www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, 2024

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
2. Mariana Amiruddin, M.Hum.
3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
4. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.
5. Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
6. Dr. Nur Iman Subono
7. Dr. Ida Ruwaida, M.Si.
8. Yacinta Kurniasih, M.A.
9. Prof. Dr. Gadis Arivia

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan 117

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

Eliminating Sexual Violence and Ensuring Gender Justice

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender/*Eliminating Sexual Violence and Ensuring Gender Justice* ..... v-vi
Abby Gina Boang Manalu

Artikel

- "Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah/*"We Need More Beyond the Policies": The Challenges of Integrated Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces* 1-16
  Andi Misbahul Pratiwi, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Lia Anggiasih, Junito Drias, & Ayu Siantoro

- Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus/ *Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case* 17-29
  Antik Bintari

- Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital/ *The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection* 31-45
  Lidwina Inge Nurtjahyo

- Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS/*Challenging the Domination of Patriarchal Law: Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating the Implementation of Anti Sexual Violence Law* 47-57
  Desintha Dwi Asriani & Defirentia One Muharomah

- Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat/ *Building "Safe Spaces": Indigenous Women and Sexual Violence in Indigenous Communities* 59-73
  Melya Findi Astuti, Tracy Pasaribu, & Widya Anggraini

- Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia/ *The Need for Collective Work in Handling Sexual Violence Cases at Universitas Indonesia* 75-87
  Retno Daru Dewi G. S. Putri

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Eliminating Sexual Violence and Ensuring Gender Justice

Hampir dua tahun telah berlalu sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan. Pengesahan UU ini merupakan pencapaian positif dalam upaya menegakkan keadilan gender di Indonesia. Kekerasan seksual adalah isu yang sangat penting dan harus direspons dengan serius untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Meski demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala akibat absennya aturan turunan yang jelas (Sinombor 2023).

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan (2023), situasi kekerasan seksual di Indonesia masih cukup tinggi. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan, dengan 2.228 kasus atau 38,21 persen. Kekerasan seksual juga menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di ranah publik. Meskipun ada peningkatan kesadaran dan keberanian dari korban untuk melaporkan kasus setelah munculnya kebijakan, seperti UU TPKS, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, dan PMA Nomor 73/2022, tanpa aturan pelaksanaan yang jelas, kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Sejumlah sarjana feminis berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah bagian integral dari struktur kekuasaan patriarki yang memberikan dan melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan (Brownmiller dalam Mason 2022). Namun, narasi umum di pengadilan, media, dan kebijakan sering kali memandang kekerasan seksual sebagai tindakan dan tanggung jawab individual. Pendekatan ini menghasilkan respons yang reaktif dan parsial, tanpa upaya perubahan yang menyeluruh dan radikal.

Di Indonesia, normalisasi budaya kekerasan seksual masih sangat kuat. Pernyataan dari berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil feminis yang mendampingi kasus kekerasan seksual di tingkat akar rumput menunjukkan adanya ketidakpahaman, ketidakberpihakan, dan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ketiadaan aturan turunan dari UU TPKS sering dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan UU ini dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama di daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan wilayah konflik (Boang Manalu & Wulandari 2023; Pertiwi 2023; Kompas 2023; Sinombor 2023). Padahal, tujuan dari UU TPKS adalah untuk mencegah, merespons, dan memastikan pemulihan bagi korban. Namun, tujuan ini sering tersamarkan karena tidak diimplementasikannya kebijakan tersebut dan adanya bias gender dalam pemahaman individu, komunitas, dan berbagai institusi di masyarakat.

Stigma dan mitos terkait kekerasan seksual masih banyak ditemui dalam penanganan kasus. Mitos bahwa pemerkosaan adalah kejahatan langka dan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sering kali menghalangi pengakuan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh orang yang dikenal atau dalam hubungan romantis (Masson 2023). Terdapat juga ketidakpercayaan terhadap laporan kekerasan seksual bila korban bukan perempuan dan berbagai situasi yang tidak sesuai dengan mitos pelaku serta korban kekerasan.

Mitos bahwa korban kekerasan seksual "mengundang" kekerasan karena cara berpakaian dan perilakunya juga masih sering memengaruhi proses penanganan kasus. Padahal, kekerasan seksual selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan berhubungan dengan identitas kompleks dan pola kekuasaan yang bervariasi (Crenshaw 1989; Ross 2017). Korban kekerasan seksual adalah kelompok yang rentan, termasuk laki-laki feminin, perempuan maskulin, orang tua, orang dengan disabilitas, dan berbagai identitas kompleks lainnya. Para sarjana feminis percaya bahwa relasi kekuasaan adalah hal yang perlu dicermati secara saksama untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan struktural daripada individual (MacKinnon 1979; Superson 1993).

Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan kekerasan seksual merupakan kerja panjang dan kompleks. Kebijakan anti kekerasan seksual adalah salah satu tahapannya. Namun, aspek seperti pemahaman dominan di masyarakat, implementasi kebijakan, perspektif gender, dan tantangan dalam sistem hukum perlu dikritisi serta diintervensi secara sinergis untuk mewujudkan hak bebas dari kekerasan seksual.

JP 117 bertujuan menghadirkan diskursus transdisipliner dalam memeriksa wacana dan praksis penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun

sudah ada kebijakan publik yang mengatur masalah kekerasan seksual, masih banyak tantangan dalam implementasinya. JP edisi ini hendak merefleksikan upaya penghapusan kekerasan seksual dari perspektif feminisme, khususnya dalam konteks dua tahun disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sejumlah tulisan dalam JP 117 antara lain:

1. *"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah* oleh Andi Misbahul Pratiwi et al. Artikel ini mengelaborasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual di daerah-daerah tersebut serta perlunya dukungan yang melampaui kebijakan formal.
2. *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus* oleh Antik Bintari. Tulisan ini membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, berbagai tantangan yang dihadapi korban, serta respons yang diberikan oleh masyarakat dan penegak hukum.
3. *Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital* oleh Lidwina Inge Nurtjahyo. Artikel ini mengupas tentang perlindungan hukum yang masih lemah bagi korban kekerasan seksual di ranah digital dan perlunya penguatan regulasi serta dukungan bagi korban.
4. *Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS* oleh Desintha Dwi Asriani dan Defirentia One Muharomah. Artikel ini berbagi pengalaman dan refleksi dari para aktivis perempuan yang berjuang mengadvokasi implementasi UU TPKS di Indonesia serta tantangan yang mereka hadapi.
5. *Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat* oleh Melya Findi Astuti et al. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana perempuan adat menghadapi kekerasan seksual di komunitas mereka dan upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban.
6. *Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia* oleh Retno Daru G. S. Putri. Artikel ini menyoroti pentingnya kerja kolektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas serta langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi korban.

Dengan tulisan-tulisan tersebut, JP 117 berusaha untuk memberikan kontribusi berarti dalam upaya penghapusan kekerasan seksual dan mempromosikan keadilan gender di Indonesia. Semoga edisi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para pembaca dalam memahami dan menangani isu kekerasan seksual dengan lebih efektif dan empatik (**Abby Gina Boang Manalu**).

Andi Misbahul Pratiwi[1], Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah[2], Lia Anggiasih[3], Junito Drias[4], & Ayu Siantoro[5]
University of Leeds[1], Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia[2], & Wahana Visi Indonesia[3,4,5]

"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah

"We Need More Beyond the Policies": The Challenges of Integrated Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 1–16, 3 tabel, 38 daftar pustaka

The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) brings hope amid the continuously rising rates of sexual violence in Indonesia. The UU TPKS guarantees legal certainty for victims, victims' families, and witnesses, ensuring they receive care facilities, protection, and recovery. The UU TPKS mandates that both the central and local governments provide integrated services for handling, protecting, and recovering from sexual violence cases. These integrated services are crucial for eradicating sexual violence and preventing its recurrence in the future. This article is part of research conducted by Wahana Visi Indonesia and the Gender Research Center of the University of Indonesia in 2023. The research aimed to map the readiness of local governments in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces to implement the UU TPKS. The study was conducted in seven regencies/cities: Kubu Raya Regency, Bengkayang Regency, Landak Regency, Palu City, Donggala Regency, Parimo Regency, and Sigi Regency. The research found that local policies support the implementation of the UU TPKS. However, there are still various challenges in realising integrated services for victims. These challenges include a lack of commitment to ensuring the availability of budgets, human resources, and effective working mechanisms in each institution. Ultimately, these challenges hinder sexual violence victims from accessing the justice envisioned in the UU TPKS.

Keywords: local policies, sexual violence, implementation of sexual violence crime law, integrated services

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022 menjadi harapan di tengah terus meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. UU TPKS memberikan mandat tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan kekerasan seksual. Pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kunci dalam pemberantasan TPKS dan mencegah keberulangan kasus di masa depan. Artikel ini merupakan sebagian dari hasil penelitian Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender Universitas Indonesia di tahun 2023 untuk memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU TPKS di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedia kebijakan daerah yang menjadi modalitas dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dialami dalam mewujudkan pelayanan terpadu bagi korban. Tantangan tersebut berakar pada minimnya komitmen memastikan ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan mekanisme kerja di masing-masing institusi. Pada akhirnya menghambat korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan yang dicita-citakan dalam UU TPKS.

Kata kunci: kebijakan daerah, kekerasan seksual, implementasi UU TPKS, pelayanan terpadu

Antik Bintari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus

Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 17–29, 1 tabel, 65 daftar pustaka

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women, yet little attention has been paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has become a global concern; this increase is in line with the development of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims' rights which have never been obtained until now. It is hoped that this policy will also serve as a legal framework to address cybersexual violence. However, after almost two years of having passed the TPKS Law, this regulation's implementation still faces challenges. It is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be considered an act of sexual violence with new methods and means in line with current technological developments. This article discusses the current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores the response of the Indonesian state/government to this phenomenon, along with its opportunities and challenges.

Keywords: sexual harassment, cyber sexual harassment, Sexual Violence Crime Law

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk agresi yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap sikap-sikap yang berkaitan dengan kekerasan seksual di dunia maya. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, telah menjadi perhatian dunia, peningkatan ini sejalan dengan perkembangan media sosial di Indonesia. Terdapat harapan baru semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan dapat memberikan jaminan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan. Hal ini tentu diharapkan menjadi angin segar bagi penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, setelah hampir dua tahun memiliki UU TPKS disahkan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan dan belum optimal dalam penanganan kekerasan seksual siber yang cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan cara baru seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Tulisan ini membahas bagaimana fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini dan selanjutnya menggali lebih lanjut respons pemerintah

Indonesia terhadap fenomena kasus tersebut beserta peluang dan tantangannya.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS

Lidwina Inge Nurtjahyo
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital

The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 31–45, 31 daftar pustaka

Despite Indonesia has enacted the Anti-Sexual Violence Law, cases of sexual violence on social media platforms continue to occur and are not easy to resolve. There are problems in implementing regulations in the digital space: criminalization of the victim, regulations that do not accommodate women's experiences, and the issue of evidence. This article discusses digital sexual violence cases, focus on the non-consensual sharing of intimate content and trespassing of private spaces. How regulations are still unable to provide a safe space in the digital sphere. This article is based on literature research including analysis of regulations, court verdict, and some news about sexual violence in digital sphere. The author uses a feminist legal studies perspective in the analysis.

Keywords: digital sexual violence, personal data protection, trespassing boundaries between private and public space

Sungguhpun sudah ada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi kasus kekerasan seksual berbasis digital di media sosial terus terjadi dan tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat permasalahan penerapan peraturan di ruang digital: kriminalisasi terhadap korban, peraturan yang tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, dan alat bukti. Artikel ini membahas kasus-kasus kekerasan seksual di ruang digital, dengan fokus pada pembagian konten intim tanpa persetujuan dan penerobosan ruang privat. Bagaimana regulasi masih belum mampu memberikan ruang aman di ranah digital. Data didasarkan pada kajian literatur mencakup analisis peraturan perundangan, putusan hakim yang relevan, dan sejumlah berita mengenai kekerasan seksual di ruang digital. Penulis menggunakan perspektif kajian hukum feminis dalam analisisnya.

Kata kunci: kekerasan seksual digital, perlindungan data pribadi, pelanggaran batas antara ruang privat dan ruang publik

---

Desintha Dwi Asriani[1] & Defirentia One Muharomah[2]
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada1 & Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas

Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS

Challenging The Domination of Patriarchal Law: Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating the Implementation of Anti Sexual Violence Law

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 47–57, 47 daftar pustaka

This article describes the experiences and reflections of women activists in facing the challenges of advocating for the issue of sexual violence and the implementation of Anti Sexual Violence Law (UU TPKS) at the community level. A qualitative research method with a feminist perspective was deployed and thus data collection was conducted through interviews with women activists from different regions such as Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta. This study develops the perspectives of sociology of law and feminism to understand the extent to which internal and external aspects influence the implementation of the TPKS Law in the community including gender issues in it. The study results show that the implementation of UU TPKS needs to be seen as a complex and non-linear process due to the challenges of legal plurality reflected by the diversity of customary/local laws in a number of communities in Indonesia. Thus, special efforts are needed that not only focus on the provision of legal products, but also on how the legal products, such as UU TPKS, could be seen as inputs that have targets on the transformation of legal culture to the community level.

Keywords: sexual violence crime law, women activists, sexual violence, legal plurality

Artikel ini mendokumentasikan pengalaman dan refleksi para aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan mengadvokasi isu kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di level komunitas. Metode penelitian kualitatif berperspektif feminis digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan aktivis perempuan yang berasal dari daerah yang berbeda seperti Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Studi ini mengembangkan perspektif sosiologi hukum dan feminisme untuk memahami sejauh mana aspek internal dan eksternal berpengaruh terhadap implementasi UU TPKS di komunitas termasuk isu gender. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai proses yang kompleks dan tidak linier karena tantangan pluralitas hukum yang terefleksikan dalam keragaman hukum adat/lokal di sejumlah komunitas di Indonesia. Diperlukan upaya khusus yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk hukum, tetapi juga pada seberapa besar produk hukum, seperti UU TPKS dapat dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum hingga di level komunitas.

Kata kunci: UU TPKS, aktivis perempuan, kekerasan seksual, pluralitas hukum

---

Melya Findoi Astuti, Tracy Pasaribu, & Widya Anggraini
KEMITRAAN Partnership for Governance Reform

Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat

Building "Safe Spaces": Indigenous Women and Sexual Violence in Indigenous Communities

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 59–73, 1 tabel, 32 daftar pustaka

Sexual violence in indigenous communities occurs because of the social structure, namely the existence of layers that have different levels and authority in indigenous communities. This condition causes certain groups to feel entitled to commit violence against other groups. Apart from that, unequal power relations are one of the roots of problems in indigenous communities, which means that victims do not have the power to fight back and defend themselves. Women, children, and people with disabilities are groups that often experience violence, this is because there is no space in traditional communities that provides a sense of security and justice for them. This journal reviews the need to know the forms of violence in traditional communities so that we can then answer the challenges of solving the problem of sexual violence in traditional communities. Through research using ethnographic methods for 3 months, it was concluded that safe spaces can be a

solution in overcoming sexual violence in indigenous communities through participation in four stages, namely: participation in decision making in the community including development planning, participation in prevention and recovery programs, participation in the education of traditional leaders , village, and key opinion leader (KOL), KOL as well as the participation of indigenous communities in the program evaluation.

Keywords: indigenous women, indigenous community, sexual violence, safe place, social protection, indigenous law

Kekerasan seksual di masyarakat adat terjadi karena tatanan sosial yaitu adanya lapisan-lapisan yang menunjukkan tingkat kewenangan yang berbeda di komunitas adat. Kondisi ini melatari kelompok tertentu merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Adanya ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu akar masalah di masyarakat adat, yang menyebabkan korban tidak berdaya untuk melawan dan membela diri. Perempuan, anak, dan disabilitas merupakan kelompok yang sering kali mengalami kekerasan. Hal ini karena tidak adanya ruang dalam komunitas adat yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka. Artikel ini mengulas bentuk-bentuk kekerasan di komunitas adat dan berbagai tantangan dalam mencari solusi atas persoalan kekerasan seksual di komunitas adat. Melalui penelitian dengan metode etnografi selama 3 bulan, disimpulkan bahwa Ruang Aman dapat menjadi solusi dalam mengatasi kekerasan seksual di masyarakat adat melalui partisipasi empat tahapan yaitu: partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di level komunitas termasuk perencanaan pembangunan; partisipasi dalam program pencegahan kekerasan dan pemulihan; partisipasi dalam mengedukasi pemimpin adat/desa/opini tetua adat (KOL), serta partisipasi komunitas adat dalam mengevaluasi program.

Kata kunci: perempuan adat, masyarakat adat, kekerasan seksual, ruang aman, perlindungan sosial, hukum adat

---

Retno Daru Dewi G. S. Putri
Jurnal Perempuan

Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia

The Need for Collective Work in Handling Sexual Violence Cases at Universitas Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 75–87, 1 tabel, 32 daftar pustaka

Kondisi darurat kekerasan seksual di institusi Pendidikan, utamanya perguruan tinggi, memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Indonesia memiliki tiga organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan menerima pelaporan serta memberikan pendampingan dan pelindungan; Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI. Dalam kerja-kerja mereka, dukungan dari universitas menjadi penentu keberhasilan maupun bertambahnya hambatan melawan kekerasan seksual di dalam kampus. Pengalaman ketiga organisasi tersebut dianalisis pada tulisan ini melalui tiga strategi Levine (2018) dalam melibatkan organisasi melalui kacamata objektivitas milik Haraway (1988). Temuan pada tulisan ini menunjukkan adanya dampak dari budaya dan pola pikir patriarki di Universitas Indonesia masih meminggirkan upaya implementasi strategi-strategi dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: organisasi penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual di perguruan tinggi, strategi kerja kolektif, pengetahuan tersituasi

The emergency situation of sexual violence in educational institutions, especially universities, triggered the issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence (Permendikbudristek PPKS). In its implementation, the formation of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual – Satgas PPKS) is an obligation for every university in Indonesia. Universitas Indonesia has three organizations that fight for justice for victims of sexual violence by accepting reports and providing assistance and protection: Satgas PPKS UI (PPKS UI Task Force), Komite PPKS FISIP UI (PPKS FISIP UI Committee), and HopeHelps UI. In their work, support from the university is a determinant of success or increasing barriers to combating sexual violence on campus. The experiences of these three organizations are analyzed in this article through Levine's (2018) three strategies for engaging organizations through Haraway's (1988) lens of objectivity. The findings in this paper show that the impact of the patriarchal culture and mindset at Universitas Indonesia still marginalizes efforts to implement strategies in fighting for justice for victims of sexual violence.

Keywords: anti-sexual violence organization, sexual violence in higher education, collective work strategies, situated knowledge

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 29 No. 1, 2024, 1—16
copyright @ 2024 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v29i1.971
DDC: 305

"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah

"We Need More Beyond the Policies": The Challenges of Integrated Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces

Andi Misbahul Pratiwi[1], Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah[2], Lia Anggiasih[3], Junito Drias[4], & Ayu Siantoro[5]

University of Leeds[1], Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia[2], & Wahana Visi Indonesia[3,4,5]
Leeds, UK[1], Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat[2], & Jalan Graha Raya Bintaro
Blok GB/GK Nomor 9, Parigi Baru, Tangerang Selatan[3,4,5]

gyamp@leeds.ac.uk[1], iklilah.muzayyanah@ui.ac.id[2], lia_anggiasih@wvi.org[3], Junito_Drias@wvi.org[4], & research.innovation.wvi@gmail.com[5]

Kronologi Naskah: diterima 1 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) brings hope amid the continuously rising rates of sexual violence in Indonesia. The UU TPKS guarantees legal certainty for victims, victims' families, and witnesses, ensuring they receive care facilities, protection, and recovery. The UU TPKS mandates that both the central and local governments provide integrated services for handling, protecting, and recovering from sexual violence cases. These integrated services are crucial for eradicating sexual violence and preventing its recurrence in the future. This article is part of research conducted by Wahana Visi Indonesia and the Gender Research Center of the University of Indonesia in 2023. The research aimed to map the readiness of local governments in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces to implement the UU TPKS. The study was conducted in seven regencies/cities: Kubu Raya Regency, Bengkayang Regency, Landak Regency, Palu City, Donggala Regency, Parimo Regency, and Sigi Regency. The research found that local policies support the implementation of the UU TPKS. However, there are still various challenges in realising integrated services for victims. These challenges include a lack of commitment to ensuring the availability of budgets, human resources, and effective working mechanisms in each institution. Ultimately, these challenges hinder sexual violence victims from accessing the justice envisioned in the UU TPKS.

Keywords: local policies, sexual violence, implementation of sexual violence crime law, integrated services

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022 menjadi harapan di tengah terus meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. UU TPKS memberikan mandat tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan kekerasan seksual. Pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kunci dalam pemberantasan TPKS dan mencegah keberulangan kasus di masa depan. Artikel ini merupakan sebagian dari hasil penelitian Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender, Universitas Indonesia di tahun 2023 untuk memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU TPKS di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan di 7 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedia kebijakan daerah yang menjadi modalitas dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dialami dalam mewujudkan pelayanan terpadu bagi korban. Tantangan tersebut berakar pada minimnya komitmen memastikan ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan mekanisme kerja di masing-masing institusi. Pada akhirnya, menghambat korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan yang dicita-citakan dalam UU TPKS.

Kata kunci: kebijakan daerah, kekerasan seksual, implementasi UU TPKS, pelayanan terpadu

Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi harapan di tengah tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Catahu Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang

dominan yakni sebanyak 2.228 kasus, diikuti kekerasan psikis sebanyak 2.083 kasus. Sementara, data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 6.001 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 4.102 kasus (Komnas Perempuan 2023).

Angka kekerasan seksual pada anak perempuan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15--64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan maupun yang bukan pasangannya. Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) sepanjang tahun 2021. Dari data tersebut, sebanyak 7.004 kasus (58,6 persen) adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan payung hukum yang dinantikan oleh banyak pihak, terutama korban kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan membangun sistem pelayanan terpadu. Di dalam Pasal 72 UU TPKS, disebutkan bahwa pelayanan terpadu diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu di dalam UU TPKS sekaligus memperkuat peran dan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA[1].

Pasca diterbitkannya UU TPKS, penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem dukung dalam implementasi kebijakan baru ini. Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender Universitas Indonesia di tahun 2023 melakukan penelitian untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU TPKS. Penelitian dilakukan di 2 provinsi, yakni Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Kedua provinsi tersebut dipilih karena merupakan wilayah dampingan program WVI dengan karakterisitik yang khas. Di Kalimantan Barat terdapat 4.853 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan sepanjang tahun 2021 dan di Sulawesi Tengah terdapat 3.838 kasus (Komnas Perempuan 2022). Di kedua provinsi tersebut, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus 328 kasus (Kalimantan Barat) dan 310 kasus (Sulawesi Tengah). Korban paling banyak berada pada rentang usia 13--17 tahun dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah (SIMFONI-PPA 2023).

Kedua provinsi ini memiliki kondisi khusus yang sebagaimana Pasal 79 UU TPKS perlu diberikan perhatian khusus. Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah adalah provinsi dengan latar belakang konflik, bencana, dan geografis yang beragam. Kalimantan Barat yang letak wilayahnya berdekatan dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia membuat perempuan dan anak perempuan rentan menjadi korban perdagangan orang atau perkawinan anak atas nama pengantin pesanan (Valevi 2006). Sementara itu, Sulawesi Tengah memiliki tantangan letak geografis dan kesejarahan terhadap bencana (KemenPPPA 2019). Dengan latar belakang di atas, artikel menguraikan gambaran kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang mendukung pelayanan terpadu dan bagaimana tantangan yang dihadapi, khususnya dalam konteks TPKS terhadap anak.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan pengolahan lebih lanjut dari sebagian hasil penelitian WVI bersama Pusat Riset Gender, Universitas Indonesia yang telah dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian di tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis dengan studi kasus jamak. Penelitian dilakukan di 2 provinsi dan 7 kabupaten/kota, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat difokuskan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak; dan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, dimulai dengan melakukan studi dokumen di bulan Januari—Maret 2023, dilanjutkan pengambilan data wawancara pada bulan Maret—April 2023 secara *online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom*. Selanjutnya, proses pengolahan data dan analisis dilakukan pada bulan April—Juli 2023.

Tabel 1. Subjek Penelitian

Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah
1. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3KB Kubu Raya	1. DP3A Kota Palu
2. Kepala UPTD PPA Kubu Raya	2. UPTD PPA Provinsi Sulteng
3. Kabid PPPA DSP3AKB Landak	3. DP3AKB Kabupaten Parigi (2 orang)
4. Kepala UPTD PPA Bengkayang	4. Unit PPA Polresta Kota Palu
5. Kabid PPA DSP3A Bengkayang	5. Ketua Wanita Islam Alkhirat
6. Kepala UPTD PPA Provinsi Kalbar	6. Ketua Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng/Pendamping Hukum di UPTD PPA Provinsi
7. Kepala Dinas P3A Provinsi	7. Ketua Libu Perempuan
8. Bidang Renakta Polda Provinsi	8. Ketua Yayasan Sikola Mombine Parigi
9. Kanit PPA Polres Landak	9. Kepala Bappeda
10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kubu Raya	10. Kabid Resos Dinas Sosial Parigi
11. Kabid Sosbud Bappeda Landak	11. Pekerja Sosial Dinsos Parigi
12. Bappeda Bengkayang	12. WVI Koordinator CP Parigi
13. Kepala KPAID Kubu Raya	13. WVI Koordinator CESP Parigi
14. WVI Koordinator CP Landak	14. WVI Manajer AP Parigi
15. WVI Koordinator CP Bengkayang	15. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Sulteng
16. WVI Koordinator CP Kubu Raya	16. Gereja Bala Keselamatan, Desa dan agama Jono Oge, Kabupaten Sigi
17. Ketua LBH PIK Pontianak	

Sumber: Data yang diolah oleh penulis

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) penelusuran dokumen kebijakan; 2) wawancara; dan 3) *Focus Group Discussion* (FGD). Subjek penelitian ini melibatkan 34 aktor utama pada isu TPKS yang terdiri dari 14 aktor laki-laki dan 20 aktor perempuan. Para aktor memiliki posisi strategis, baik dari pemerintah daerah, dinas DP3AKB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum, pengada layanan berbasis masyarakat, pendamping korban, organisasi anak dan perempuan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori feminis tentang kebijakan publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pada saat penelitian dilakukan kebijakan turunan mandat UU TPKS belum tersedia. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut di masa depan pasca peraturan turunan tersedia guna memotret efektivitas dan tantangan implementasi UU TPKS.

Ketersediaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual di 2 Provinsi

Kalimantan Barat

Di Provinsi Kalimantan Barat telah ada Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki semangat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban eksploitasi seksual yang mengalami kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi: layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan, kelangsungan layanan pendidikan, layanan psikososial, dan layanan bantuan hukum.

Selain di level Provinsi, terdapat peraturan di level Kabupaten, yakni di Bengkayang dan Kubu Raya. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan pada anak. Di dalam Perbup ini disebutkan bahwa pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan yang perlu diberikan perhatian serius.

Dalam Perda tersebut disebutkan pada Pasal 21, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya perlindungan korban dengan cara: a) membentuk PPT; b) merumuskan kebijakan; c) menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan; d) memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan e) mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal perlindungan dari pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah wajib memastikan penanganan terpadu untuk korban kekerasan anak tersedia. Dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui: (1) pembentukan kebijakan, program, dan mekanisme terkait pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan sistem informasi data anak; (2) penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban.

Tabel 2. Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang Telah Mengakomodasi Isu Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah	Akomodasi Kekerasan Seksual?
Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ya
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Ya
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak	Ya

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Adanya kebijakan di level provinsi dan kabupaten di atas menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang dan Kubu Raya memiliki modalitas kebijakan dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun, disayangkan di Kabupaten Landak belum ada Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Meski demikian, di Kabupaten Landak telah ada Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak yang di dalamnya juga memuat tentang perhatian bagi korban kekerasan seksual.

Sulawesi Tengah

Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan yang disebutkan dalam Perda ini. Pada ketentuan umum pasal 1 nomor 8 disebutkan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Lebih jauh, dalam ketentuan umum pasal 1 nomor 13 disebutkan bahwa "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu". Ini merupakan langkah maju dari peraturan daerah di tingkat provinsi.

Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 ini secara khusus berfokus: 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak termasuk di dalamnya telah memasukkan UU TPKS sebagai rujukan dan juga memasukkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan pada anak. Perda ini melengkapi Perda sebelumnya di tahun 2019.

Selain Perda, di tingkat Kabupaten/Kota telah ada beberapa kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap anak. Di Kota Palu telah ada Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Di dalam Perwali ini, kekerasan seksual juga disebutkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Sementara itu, ruang lingkup Perwali ini, yakni a) perlindungan anak; b) kewajiban dan tanggung jawab; c) partisipasi anak; d) kelembagaan; e) peran serta masyarakat; f) pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan g) koordinasi dan kerja sama.

Kemudian, di Kabupaten Donggala, terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kedua peraturan tersebut telah mengakomodir kekerasan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara khusus, pada Perbup Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan perlindungan bagi perempuan dan anak meliputi: a) hak-hak perempuan dan anak; b) tugas dan wewenang; c) penanganan tindak kekerasan; d) pembiayaan; e) pengawasan; f) peran serta masyarakat. Selanjutnya, di Kabupaten Parigi Moutong terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam Perbup tersebut telah menyebutkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani. Di dalam Perbup ini disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan, pelayanan terpadu, pemberdayaan terhadap korban kekerasan, rehabilitasi, dan perlindungan khusus anak. Semua upaya dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat.

Terakhir, di Kabupaten Sigi terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sama seperti Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Perbup ini juga telah mengakomodir kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perbup ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan tujuan: a) mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) memberikan penanganan awal korban; c) memberikan pelayanan kesehatan bagi korban fisik maupun psikis; d) memberikan jaminan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, saksi, dan pelapor; e) mengupayakan pemulihan korban dan rehabilitasi; f) memberdayakan korban dan reintegrasi; g) melakukan koordinasi dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 3. Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang Telah Mengakomodasi Isu Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah	Akomodasi Kekerasan Seksual?
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Ya
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Ya
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ya

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah

Telah adanya Peraturan Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki modalitas dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya korban anak. Modalitas kebijakan ini menjadi penting untuk percepatan dan efektivitas implementasi UU TPKS. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu memulai dari awal untuk membangun sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual—karena isu-isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak telah dikenali dan diakomodir dalam berbagai kebijakan yang telah hadir sebelumnya.

Tantangan dan Sistem Dukung Pelayanan Terpadu di Kalimantan Barat

Dari hasil wawancara dan FGD, peneliti menemukan berbagai tantangan dalam implementasi UU TPKS untuk mewujudkan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat. Tantangan tersebut, yakni a) kurangnya sosialisasi; b) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; c) ketiadaan prosedur pemantauan; d) belum adanya integrasi informasi; e) keterbatasan anggaran. Tantangan ini dialami di berbagai institusi di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Pertama, Minimnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS secara masif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Kabupaten Kubu Raya, sebagian petugas UPTD PPA mempelajari UU TPKS secara mandiri dan sebagian lainnya mendapatkan informasi dari Wahana Visi Indonesia (WVI).

> "Kita memang belum ada sosialisasi baik itu secara internal maupun secara eksternal malahan kita berharap mungkin difasilitasi dari pihak pusat maupun pihak provinsi untuk bisa memberikan suatu sosialisasi mungkin dengan adanya sosialisasi. Kami saja belum memahami tentang Undang-Undang TPKS, ngomong ke masyarakat *kan* jadinya takutnya salah" (UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas secara kuantitas dan keahlian spesifik. Tantangan lain yang dihadapi UPTD PPA yakni terkait sumber daya manusia. Menurut UPTD PPA di Kabupaten Bengkayang, masih mengalami tantangan dalam hal sumber daya manusia. Menurutnya, sumber daya manusia yang ada belum memadai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada. Sumber daya manusia yang dimaksud termasuk tenaga profesional seperti psikolog klinis.

> "Di Bengkayang ini pegawai di UPTD sendiri hanya ada saya sendiri, Ibu. Jadi hanya kepala saja yang dibantu oleh 3 tenaga honorer. Di sini kita juga sangat kekurangan, Ibu. Itu untuk di struktur jabatannya sendiri itu kita sangat membutuhkan psikolog klinis" (UPTD PPA Kabupaten Bengkayang 2023, FGD 24 Maret).

> "...yang kedua Peksos (pekerja sosial), Ibu. Di sini kita putuskan dari Undang-Undang TPKS sendiri karena kita butuhkan yaitu juga hasil laporan sosial dari Peksos, sementara UPTD sendiri kita belum punya Peksos, Ibu. Yang kita punya ini masih dari Dinas Sosial sementara di Pemda sendiri belum mempunyai tenaga Peksos. Ketiga, mungkin mediator juga, Bu, mediator kita punya dari Bupati tetapi dari kita sendiri mediator itu belum bersertifikat" (UPTD PPA Kabupaten Bengkayang 2023, FGD 24 Maret).

Selain itu, UPTD PPA Bengkayang juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia, seperti Pekerja Sosial (Peksos) dan mediator. Keduanya penting dalam membantu korban kekerasan seksual dalam proses pendampingan dan pemulihan. Belum tersedianya Pekerja Sosial (Peksos) juga dialami oleh UPTD PPA Kubu Raya. Di kelembagaan UPTD PPA sendiri masih kekurangan sumber daya manusia, yakni belum tersedianya psikolog dan Peksos yang tetap. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya.

> "Nah, tenaga-tenaga ini saja yang ada di UPTD masih banyak UPTD yang belum memiliki secara artinya terstruktur, kecuali kita hanya bekerja sama kayak dengan psikolog. Kayak Peksos nah Peksos saja kita masih menumpang dengan dinas sosial" (UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Tantangan dalam hal sumber daya manusia juga dialami oleh Bappeda di 3 Kabupaten (Bengkayang, Kubu Raya, dan Landak). Persoalan keterbatasan sumber daya manusia ini terkait jumlah personil. Sementara itu, tantangan dalam hal sumber daya manusia juga dialami di KPAID Kabupaten Kubu Raya yakni terkait peningkatan kualitas. Menurut KPAID Kabupaten Kubu Raya, penting bagi para staf yang bertindak sebagai mediator dalam penanganan kasus diberikan fasilitas atau dukungan untuk dapat mengikuti sertifikasi sebagai mediator. Hal ini akan membantu bagi kredibilitas mediator di KPAID sebagai profesi.

> "Apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Tetapi, kita bicara legalitas, memang selama ini kalau bicara legalitas ke SK, tetapi kalau kami sebagai mediator alangkah

> baiknya kita punya legalitas yang jelas sebagai mediator begitu" (KPAID Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 3 April).

Ketiga, ketiadaan prosedur pemantauan. Tantangan lainnya adalah belum tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap proses pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Sistem dokumentasi yang tersedia saat ini juga belum sampai pencatatan yang bersifat evaluatif. Menurut DP3KB Kabupaten Kubu Raya, korban kekerasan cenderung mengalami trauma mendalam dan berkepanjangan sehingga dibutuhkan sistem pemantauan terhadap proses pemulihan korban, baik ketika proses pendampingan korban maupun dalam proses reintegrasi ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

> "Nah, kelemahannya kami adalah evaluasi terhadap korban. Terutama itu, evaluasi secara berkelanjutan terhadap korban. Korban itu kita tidak bisa pantau bagaimana perkembangannya. (Kekerasan) ini *kan* menimbulkan trauma yang mendalam. Kalau TPKS ini berbekas lah sampai dewasa, mungkin sampai seumur hidupnya. Nah, ini yang seperti ini yang belum kita lakukan penanganannya, bagaimana pemberdayaannya ke depan, bagaimana jika banyak konflik sosial yang terjadi bagi korban" (DP3KB Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Keempat, belum adanya informasi yang terintegrasi. Sistem pemantauan terhadap proses pemulihan korban juga perlu didukung dengan integrasi informasi mengenai putusan pengadilan. Menurut UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya, penting bagi UPTD PPA untuk mengetahui hasil dari putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Hal ini menjadi sumber informasi penting bagi pihak UPTD PPA untuk menginformasikan lebih lanjut ke pihak–pihak yang berkepentingan (misalnya korban, keluarga korban, saksi) dan juga sebagai pusat data terpadu.

> "Kita mau bandingkan dengan Undang-Undang TPKS apakah sudah berkeadilan hukumannya yang diputuskan dengan penderitaan korban itu kami masih mengalami kendala. Di antaranya di saat putusan pengadilan terhadap pelaku itu bahkan kami tidak mendapatkan informasi, kapan terjadi, apa hasil keputusannya, kemudian berapa tahun putusannya, kemudian apakah dikenakan restitusi yang sudah ditetapkan, apakah sudah mengakomodir kerugian yang diderita oleh korban. (Semua itu) kami tidak mendapatkan informasi itu" (UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Kelima, anggaran terbatas. Keterbatasan anggaran sehingga menghambat penjangkauan yang luas. Keterbatasan anggaran yang didapatkan DSP3AKB Kabupaten Landak membuat mereka sulit menjangkau seluruh desa untuk melakukan sosialisasi, pembagian informasi, maupun pemantauan.

> "Keterbatasan kami menyentuh hingga sampai ke desa-desa karena kami di Kabupaten Landak ini ada 156 desa. Memang keterbatasan kami juga untuk bisa menjangkau karena juga salah satu faktor itu adalah faktor anggarannya, jadi sehingga kita penjangkauan kita sangat kecil sekali" (DSP3AKB Kabupaten Landak 2023, FGD 24 Maret).

Persoalan keterbatasan anggaran ini juga dialami di level Bappeda. Menurut Bappeda Kabupaten Kubu Raya dan Landak, keterbatasan anggaran ini memengaruhi jumlah dan jangkauan program Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA). Di Kabupaten Kubu Raya, pihak Bappeda berupaya untuk mendapatkan pendanaan dari eksternal.

> "Ya memang tantangannya rata–rata hampir sama lah ya, misalnya keterbatasan pendanaan… jadi memang kita di Kubu Raya saat ini mencari mitra–mitra sebanyak banyaknya nih, mengajak teman-teman NGO, terus ada juga beberapa dana dari donor, kemudian juga CSR dari dunia usaha" (Bappeda Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 3 April).

Sementara itu, di Kabupaten Landak tantangan dalam hal anggaran juga dialami oleh Bappeda. Meski ada keterbatasan anggaran dalam menjalankan program Perlindungan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA), Bappeda Kabupaten Landak berusaha untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak eksternal seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).

> "Kita memang salah satu faktor penyebab itu adalah terbatasnya anggaran ya, Bu sehingga ini menjadi kendala utama kita, kemudian SDM juga. Kemudian dari beberapa tantangan yang sudah saya sampaikan tadi. Adapun strategi yang dicoba oleh kami yang ada di Bappeda bersama dengan tim untuk menyusun satu strategi… jadi di Kabupaten Landak sendiri, kebetulan tahun 2021 kita sudah membentuk forum CSR dan ini kemarin sudah kami sampaikan secara langsung melalui forum CSR" (Bappeda Kabupaten Landak 2023, FGD 3 April).

Meski ada banyak tantangan yang dihadapi, ada beberapa kemajuan dan upaya tangguh yang perlu dicatat dan apresiasi. Di Kabupaten Landak, telah ada dorongan kuat untuk pembentukan Forum Anak di setiap desa. Dari total 156 desa, telah terbentuk Forum Anak di 6 desa. Forum Anak Desa (FAD) menjadi salah satu ruang untuk melakukan program pencegahan kekerasan seksual pada anak.

> "Karena di Kabupaten Landak sendiri terus terang kami sampaikan untuk pembentukan forum anaknya dari 156 desa, ini masih hanya 6 desa yang sudah terbentuk forum

> anaknya. Ini menjadi suatu permasalahan juga dan menjadi PR kami ke depannya. Kemudian, pembentukan PATBM. Terutama di tahun ini, kami mencoba setidaknya dari 156 desa itu, kami berusaha setengahnya terbentuk PATBM. Ini menurut kami ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena korban biasanya takut untuk melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib. Namun jika di desa tersebut ada yang namanya PATBM, mungkin di sinilah wadah bagi korban untuk menyampaikan apa yang dialami" (Bappeda Kabupaten Landak 2023, FGD 3 April).

Kemudian, di Kabupaten ini juga didorong pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak—termasuk di dalamnya pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Tantangan dan Sistem Dukung Pelayanan Terpadu di Sulawesi Tengah

Dari hasil wawancara dan FGD, peneliti menemukan berbagai tantangan dalam implementasi UU TPKS dari aspek pelayanan terpadu di Sulawesi Tengah. Tantangan tersebut, yakni: a) kuantitas sumber daya manusia ahli; b) keterbatasan anggaran; dan c) perspektif pemerintah daerah.

Pertama, kuantitas SDM ahli. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah, pemulihan kesehatan psikis bagi korban kekerasan seksual belum menjadi prioritas utama. Menurutnya, negara masih berfokus pada pemulihan secara sosial tetapi belum maksimal dalam pemulihan psikis. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan psikis korban adalah dengan menyediakan psikolog klinis di tingkat kabupaten/kota.

> "Kalau memang merasa ini penting tenaganya juga harus diupayakan apalagi Undang-Undang TPKS sudah ditegaskan dan sudah jelas bahwa tenaganya adalah psikolog klinis, nah itu" (UPTD PPA Provinsi Sulteng 2023, FGD 13 April).

Kebutuhan terhadap SDM ahli berupa psikolog klinis ini juga disampaikan oleh DP3A Kota Palu dan DP3AKB Kabupaten Parigi Moutong. Pada Pasal 26 UU TPKS disebutkan bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendamping yang dimaksud salah satunya adalah tenaga ahli berupa psikolog.

> "DP3A Kota Palu perlu SDM salah satunya psikolog. Kalau boleh psikolog klinis karena selama ini kalau ada rekrutmen psikolog biasanya hanya ditempatkan di puskesmas atau rumah sakit padahal DP3A Kota Palu juga butuh, sangat butuh untuk tenaga psikolog terutama psikolog klinis" (DP3A Kota Palu 2023, FGD 13 April).

> "Kami sangat membutuhkan psikolog klinis yang memang betul-betul belum ada di Kabupaten Parigi Moutong. Jadi untuk sementara ini, kami sekitar berapa tahun, Bu ya, kami selalu bekerja sama dengan psikolog yang berada di Provinsi. Jadi itu kami masih sangat-sangat membutuhkan adanya psikolog klinis" (DP3AKB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Lebih lanjut, dalam Pasal 68 UU TPKS, disebutkan bahwa korban memiliki hak atas penanganan. Salah satu hak atas penanganan adalah hak atas penguatan psikologis. Lebih jauh dalam Pasal 70 UU TPKS disebutkan bahwa penguatan dan pelayanan psikologis merupakan hak korban atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Ketersediaan SDM ahli ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan terpadu.

Kedua, keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran di Dinas Sosial maupun DP3AKB sangat memengaruhi proses pendampingan korban di Kabupaten Parimo. Dinas Sosial Kabupaten Parimo mengatakan bahwa faktor geografis sangat memengaruhi proses pendampingan kasus kekerasan, khususnya pada anak. Lokasi yang sangat jauh dan minimnya dukungan biaya operasional membuat jangkauan pendampingan kasus sangat terbatas. Beberapa kasus disebutkan dilakukan secara virtual. Beberapa kasus dapat didampingi oleh Pekerja Sosial secara langsung, sementara beberapa yang lainnya tidak.

> "Kemudian dalam hal penanganan anak memang saya dengan kondisi wilayah kabupaten cukup jauh jangkauannya yang hanya di-*handle* oleh tiga pekerja sosial profesional dengan jarak panjang Kabupaten Parigi Moutong ujung ke ujung sekitar 432 km… Dengan jarak tempuh jauh itu kendala yang memang saya rasakan saat ini kasus-kasus yang ada kadangkala juga mereka itu jemput bola begitu, ada kasus mereka langsung turun. Jadi kalau cuma memang mungkin jaraknya dekat jangkauan dekat bisa, tapi ini kalau kasus di paling ujung. Sekitar itu kalau jalan normal itu 6 jam perjalanan" (Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Dinas Sosial Kabupaten Parimo mengatakan bahwa ada anggaran Tali Kasih dari Kementerian Sosial yang dapat diakses untuk pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Meski demikian, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk biaya operasional dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Parimo. Anggaran Tali Kasih adalah bagian dari skema perlindungan sosial di Indonesia. Dana Tali Kasih merupakan bantuan sosial yang dapat disalurkan kepada kelompok rentan dan

berasal dari lembaga sosial nasional, seperti Baznas, Dompet Dhuafa, Dompet Peduli, dan Peduli Kasih (Kemenkeu.go.id 2023).

> "Jadi begini ini ada memang pekerja sosial mereka itu punya Tali Kasih dari Kementerian Sosial tetapi dengan jarak jangkauan yang ada itu tidak sebanding dengan anggaran Tali kasih yang ada dari Kementerian maupun Dinas ya… Insyaallah kalau tahun depan bisa tetap kita anggarkan apalagi kalau sudah jalan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mungkin anggaran tersendiri mereka sudah melekatnya di situ" (Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Selain persoalan biaya operasional, keterbatasan anggaran juga ditemukan dalam hal pemeriksaan psikiater maupun rumah aman. Menurut Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Parimo, masih terjadi kesulitan saat mengajukan pemeriksaan psikiater untuk korban kekerasan terhadap anak. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan oleh Pekerja Sosial. Lebih jauh, ia juga menambahkan bahwa belum ada Rumah Aman yang tersedia bagi korban kekerasan.

> "Di dalam Kota Parigi, saya sudah berulang kali menghadap ke Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk dilakukan pemeriksaan psikiater tetapi mereka bilang *enggak* ada anggaran itu yang sangat saya… saya menangis dalam hati saya. Ya Allah kenapa mereka selalu bilang tidak ada anggaran… Saya jadikan tempat tinggal saya, kadang–kadang itu untuk rumah aman gitu" (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Ketiga, perspektif penyedia layanan. Di Kabupaten Parimo, persoalan perspektif penyedia layanan masih ditemui dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Menurut Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo, pernah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2021 yang korbannya adalah anak dan pelakunya adalah orang dewasa. Dalam penyelesaian kasus tersebut, penyedia layanan justru memfasilitasi proses perdamaian.

> "Ada juga tahun 2021 kasus seperti itu mereka hampir mengulanginya lagi. Di sini kasus anak sebagai korban itu masih SD umur 13 tahun dan pelakunya itu adalah orang dewasa, kakak beradik 3 orang kakak beradik. Kasus persetubuhan sudah hamil melahirkan, terus tersangkanya itu adalah kakak beradik tetangganya. Nah, itu sempat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemarin dia mengatur damai karena dari pihak pelaku menginginkan diatur damai dengan catatan mau diberikan iming-iming sejumlah uang dengan nominal yang sangat fantastis" (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Proses perdamaian dalam kasus kekerasan seksual pada anak sangat disayangkan oleh sejumlah pihak termasuk dari Dinas Sosial dan Kepolisian. Proses perdamaian dalam kasus kekerasan seksual sendiri, kerap kali dikaitkan dengan proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, di dalam UU TPKS, disebutkan bahwa dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang–Undang (Pasal 23). Pada kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak, maka merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Artinya, telah ada mekanisme dari negara untuk memastikan hak-hak anak berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana).

> "Sempat ketika gelar perkara, *kan* yang diminta pendapat awal waktu itu yang pemaparannya kasus itu Pak Kasat langsung. Itu kenapa karena mereka tidak paham. Dari Dinas Pemberdayaan ini mengaku kalau memang mau diatur damai diberikan sejumlah nominal segitu ya *nggak* masalah yang penting anaknya selamat gitu. Loh kok bisa seperti itu, ya. Itu kan saya bilang itu ibu *nggak* baca ini kasus bukan delik aduan ini kriminal murni. Tanpa ada aduan, polisi wajib untuk menyidik seperti itu, terus kenapa ibu setuju gitu kan. Terus gimana keberpihakan ibu selaku pendamping anak" (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Perspektif penyedia layanan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual memainkan peranan penting. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif adil gender dan hak anak belum menjadi arus utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Parimo. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU TPKS disebutkan bahwa pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada 6 asas, yakni: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non-diskriminasi; 3) kepentingan terbaik bagi korban; 4) keadilan; 5) kemanfaatan; dan 6) kepastian hukum. Terakhir, dalam konteks anak, salah satu prinsip SPPA

adalah kepentingan terbaik anak yang tertuang dalam Pasal 2 di UU SPPA.

Selain tantangan yang telah disebutkan di atas, dari hasil wawancara dan FGD ditemukan juga praktik baik pelaksanaan pelayanan terpadu di beberapa wilayah. Praktik baik ini dapat dijadikan modalitas untuk penanganan kasus kekerasan seksual pasca lahirnya UU TPKS. Praktik baik yang ditemukan yakni keberadaan: a) Forum Anak Desa (FAD); b) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); c) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI); d) pembiayaan operasional penyelesaian kasus dari APBD; e) pemantauan dari DP3AKB dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban; f) pemanfaatan PKK.

Pertama, Forum Anak Desa (FAD). Keberadaan Forum Anak Desa (FAD) di Kabupaten Parimo membawa dampak positif bagi upaya pencegahan kasus kekerasan seksual. Menurut DP3AP2KB, anak-anak yang terlibat dalam FAD berperan aktif dalam melaporkan terjadinya kasus kekerasan dan membantu sosialisasi program-program yang diadakan oleh pemerintah daerah.

> "Di Kabupaten Parigi Moutong, keterlibatan dari anak-anak FAD itu sangat membantu. Dari anak FAD yang bertindak sebagai pelapor…dan mereka yang banyak-banyak memberikan informasi ke kami, bahkan mereka yang banyak juga mensosialisasikan semua kegiatan–kegiatan yang ada di Dinas kami" (DP3AP2KB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Kedua, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Di Kota Palu dan Kabupaten Parimo, keberadaan PATBM membantu penanganan, pendampingan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual pada anak. Contohnya adalah PATBM bersama-sama dengan Yayasan Sikola Mombine membentuk alur pelaporan kasus kekerasan pada anak hingga tahap pelaporan ke DP3A tingkat kota maupun kabupaten. Ini adalah bentuk bagaimana PATBM menjadi salah satu pilar penanganan kasus di level desa dan kelurahan.

> "Di beberapa wilayah dampingan, kami juga baik di desa maupun kelurahan melakukan peningkatan kapasitas ke PATBM yang dibentuk oleh desa dan kelurahan, dan membentuk alur pelaporan kasus yang kemudian akan dilaporkan ke DP3A (Kota Palu) dan DP3AP2KB tingkat Kabupaten" (YSM 2023, FGD 13 April).

Di Kabupaten Parimo, PATBM telah dibentuk di 3 kecamatan. Pembentukan ini didukung oleh Wahana Visi Indonesia dan Yayasan Sikola Mombine. Menurut DP3AP2KB Kabupaten Parimo, dengan adanya PATBM diharapkan jumlah kasus kekerasan seksual dapat menurun. Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program dan koordinasi antara DP3AP2KB dengan PATBM yang telah dibentuk.

> "Adanya PATBM yang dibentuk di kecamatan maupun di desa, jadi upaya–upaya yang dilakukan kami banyak membentuk PATBM di kecamatan maupun di desa dan terima kasih juga atas kerja sama dari Wahana Visi, Yayasan Sikola Mombine yang pada tahun ini banyak kita *sharing*, yang mana fokus mereka itu ada sekitar 3 kecamatan. Nah, dari kolaborasi yang kami lakukan, alhamdulillah untuk kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong secara tidak langsung akan berkurang, Insyaallah seperti itu" (DP3AP2KB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Sementara itu, di Kota Palu telah terbentuk PATBM di 36 kelurahan di 8 kecamatan. Hal ini dapat menjadi modalitas dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual pada anak. Keberadaan PATBM juga dapat dijadikan medium penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak hingga level kelurahan.

> "Kemudian di 8 kecamatan, 36 kelurahan, DP3A Kota Palu itu sudah membentuk PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, di masing-masing kelurahan di mana lurahnya sudah mengusulkan SK ke kepala DP3A Kota Palu" (DP3A Kota Palu 2023, FGD 13 April).

Pembentukan PATBM sendiri sangat bermanfaat bagi korban kekerasan seksual khususnya anak. Hal ini berdasarkan Pedoman PATBM yang diterbitkan KPPPA di tahun 2016 yang menyebutkan bahwa titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk: a) membangun norma anti kekerasan; b) meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan; dan c) meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. PATBM membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. PATBM mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka (KemenPPPA 2016).

Ketiga, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Di tahun 2015, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF merancang Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang bertujuan untuk melindungi anak–anak dan keluarga rentan, khususnya anak-anak korban kekerasan,

pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. PKSAI dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah dan kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di antara semua pihak terkait dan juga penyediaan layanan integratif yang lebih efektif untuk perlindungan anak di seluruh Indonesia (UNICEF 2017).

> "Iya. Terima kasih, Mbak. Ini jadi memang kami ini kan kami ini kan di Pemda Sigi mempunyai semacam apa ya PKSAI… Kita kerja sama dengan beberapa LSM ya, yang *lead-lead*-nya di Dinas Sosial. Terus kemudian bergabunglah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Bappeda, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan beberapa dinas lain, dan beberapa LSM yang memang selama ini mempunyai kontribusi terhadap apa ya penanganan anak ya, terutama untuk kekerasan seksual" (Bappeda Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Di Kabupaten Sigi terjadi lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak saat terjadi gempa bumi pada tahun 2018. Pada saat terjadi kasus kekerasan seksual khususnya pada anak, PKSAI membantu proses pendampingan kasus. PKSAI terdiri dari beberapa lembaga termasuk di dalamnya LSM, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan kolaborasi ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan efektif dan cepat.

> "Nah, kami melihat itu Mbak mungkin pernah ingat di tahun 2018, kami itu kan mengalami gempa ya. Nah, di waktu gempa itu, informasi dari teman-teman relawan ini memang ada kekerasan anak, termasuk sampai kekerasan seksual… Nah, itu kita selalu dampingi terus lewat PKSAI itu dan itu beberapa yang sudah diajukan ke pengadilan dan sudah ada yang dihukum, ya" (Bappeda Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Lebih jauh, Bappeda Sigi mengatakan bahwa sebelum adanya PKSAI, penyelesaian kasus kekerasan seksual lebih banyak diselesaikan secara adat dengan mekanisme pembayaran denda. Sementara penyelesaian secara hukum, kerap kali dianggap tidak memberikan akses keadilan bagi korban. Beberapa kasus yang dibantu pendampingannya oleh PKSAI diselesaikan di ranah hukum. Hal ini yang diapresiasi dan dirasakan manfaatnya oleh Bappeda Sigi.

> "Kita punya WA grup, Mbak, ya. WA group PKSAI itu masih berjalan…Sebelum kita punya PKSAI ini Mbak, memang masih ke situ arahnya ke adat, nanti ada denda macem-macem. Tapi setelah ada PKSAI sejak tahun 2017 lah, itu sudah sampai ke hukum anu pengadilan. Sudah diproses, iya. Memang ini luar biasa, Mbak. Ini yang kita punya ini. Lembaga ini bagus sekali, Mbak. Itu memang harus dipertahankan karena kalau itu hilang aduh kembali lagi. Karena relawan kan tidak mudah, Mbak, ya. Relawan itu kan… aduh… dia harus fokus ya, dia tidak boleh kerja di tempat lain menurut saya. Jadi menurut saya, perlu diberi penghargaan, Mbak, orang-orang yang terlibat di situ" (Bappeda Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Keempat, anggaran APBD untuk penanganan kasus. Bappeda menyediakan anggaran operasional untuk penyelesaian kasus. Hal ini terjadi di Kabupaten Sigi. Biaya operasional yang dibutuhkan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian kasusnya ditanggung oleh dana APBD. Biaya operasional ini termasuk biaya transportasi korban dan keluarga korban dalam menjalani seluruh proses penyelesaian kasus.

> "Iya paling itu tadi, biasanya untuk mendampingi anak sampai keluarga, Mbak, ya itu. Misalnya, termasuk ke proses-proses pengadilan kita usahakan lah. Kan itu ada biaya transport. Kalau gini, Mbak, Sigi itu kan tidak ada… belum ada Pengadilan Negeri, yang ada di Donggala, kan. Nah, jadi biaya-biaya transport, biaya untuk macam-macam lah itu kita kita dampingi lewat APBD" (Bappeda Kabupaten Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Kelima, pemantauan DP3AKB. Adanya pemantauan dari DP3AKB dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Di Kota Palu dan Kabupaten Parimo terdapat pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemantauan tersebut salah satunya memastikan anak yang menjadi korban kekerasan dapat kembali ke sekolah. Pendidikan merupakan salah satu hak bagi anak-anak.

> "Tetap kami memantau, Mbak. Mulai dari adanya kasus sampai dengan adanya pendampingan-pendampingan maupun melalui pemantauan, tetap kami pantau dari DP3A… Selama yang kami tangani, Mbak, itu mereka sudah ada yang bisa kembali ke sekolahnya" (DP3A Kota Palu 2023, FGD 13 April).

Menurut pemantauan dari DP3A Kota Palu, anak-anak korban kekerasan seksual telah didampingi hingga bisa mendapatkan haknya untuk kembali bersekolah. Pemantauan ini juga dilakukan DP3AKB Kabupaten Parimo yakni dalam memastikan anak korban kekerasan mendapatkan hak atas pendidikan.

> "Ada kasus kemarin, anaknya itu kasusnya kalau tidak salah dikeluarkan dari sekolah. Lalu kami coba untuk mediasi karena kita tahu kalau sekolah itu punya aturan sendiri, tapi kami meminta ada semacam kerja sama dari pihak sekolah yang mengeluarkan anak tersebut untuk memindahkan… anak itu sendiri juga tidak ingin lagi berada di sekolah itu. Secara tidak langsung, kami akan memediasi, memindahkan anak itu ke sekolah yang ada di dekat situ atau kami juga menyarankan dia untuk bersekolah di PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Apapun bentuknya,

> anak itu tetap harus belajar" (DP3AKB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Pendampingan dilakukan DP3AKB Kabupaten Parimo terhadap anak-anak korban kekerasan seksual dalam pengurusan perpindahan sekolah. Pihak DP3AKB melakukan mediasi kepada pihak sekolah untuk dapat memindahkan anak ke sekolah baru. Hal ini dianggap sesuai dengan keinginan anak karena kerap terjadi perundungan bagi anak korban kekerasan seksual di sekolah asalnya. DP3AKB juga mencarikan alternatif pendidikan yang dapat diakses, salah satunya PKBM.

> "Lewat PKK, kami membentuk pos pelayanan P2TP2A di kecamatan. Jadi andaikan 1 Pokja di PKK, maka tiap kecamatan ada 1 Pokja. Kami coba kemarin di tahun 2019 apa 2020 se-Kabupaten Parigi Moutong berarti 23 kecamatan, kami membentuk itu di kecamatan. Jadi adanya pos pelaporan untuk P2TP2A di kecamatan, seperti itu" (DP3AKB Kabupaten Parigi 2023, FGD 13 April).

Keenam, Pemanfaatan kekuatan PKK. Adanya pemanfaatan lembaga PKK untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Di Kabupaten Parimo telah terbentuk pos pelayanan P2TP2A di 23 kecamatan. Pembentukan P2TP2A ini melalui lembaga PKK. Hal ini menjadi praktik baik karena PKK sebagai lembaga yang telah dibentuk sejak lama dapat berpartisipasi dalam program yang baru lahir. Dengan demikian, dimungkinkan adanya efektifitas dalam hal kelembagaan.

Kebijakan Telah Tersedia, Namun Dibutuhkan Komitmen dalam Implementasi

Dalam studi feminisme, para pemikir feminis berupaya membangun fondasi analisis kebijakan publik. Mereka berargumen bahwa ada pengabaian terhadap isu-isu mengenai keadilan gender di ruang publik dan itu kemudian berkontribusi terhadap reproduksi ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Karenanya, kajian kebijakan publik sangat penting memasukkan isu-isu ketidakadilan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan kerja perawatan (Lombardo & Meier 2015). Kritik tersebut kemudian melahirkan cara pandang yang baru mengenai apa itu kebijakan publik dan apa saja yang penting untuk diatur atau menjadi urusan publik (Lombardo & Meier 2015). Carole Pateman (1983) dan Susan Moller Okin (1991) menentang dikotomi tradisional mengenai dikotomi ruang publik vs ruang privat, yang membuat kebijakan publik mengabaikan isu-isu hak asasi perempuan. Dalam gerakan feminis kemudian dikenal slogan "the personal is political", sebuah penolakan terhadap gagasan dikotomis dan penyingkiran urusan perempuan dari ruang publik. Ini juga berarti menyanggah argumen positivistik bahwa kebijakan publik harus bersifat umum dan berlaku universal (Lombardo & Meier 2015).

Dalam konteks kekerasan seksual, Kate Millett (2000) berargumen bahwa kekerasan, penindasan, dan opresi secara seksual terhadap perempuan adalah hal yang politis karena adanya relasi kuasa. Namun sayangnya, selama ini masyarakat masih menganggapnya sebagai urusan privat karena cara pandang tersebut dilanggengkan dalam institusi pendidikan, agama, dan keluarga (Millet 2000)—yang kemudian dijustifikasi melalui kebijakan publik. Ini yang disebut oleh Carol Pateman sebagai kontrak seksual (*the sexual contract*) bahwa berbagai bentuk tabu dan aturan moral yang bias terhadap tubuh perempuan kemudian dinormalisasi (Pateman 1989). Normalisasi kekerasan ini pada akhirnya membangun sebuah budaya kekerasan seksual yang menjadi kendala utama dalam penghapusan TPKS. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, penting untuk membongkar budaya kekerasan tersebut melalui pengakuan (*recognition*) dan sistem layanan terpadu (pencegahan, penanganan, dan pemulihan).

Kehadiran UU TPKS adalah upaya untuk membongkar budaya kekerasan seksual melalui pengakuan dan sistem layanan terpadu. Sebelumnya, pengaturan mengenai kekerasan seksual diatur terbatas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU TPKS, jenis kekerasan seksual yang diakomodir lebih beragam dan dapat melindungi perempuan, laki-laki, kelompok minoritas seksual lainnya yang rentan mengalami kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS bukan hanya sebagai upaya untuk konseptualisasi apa yang disebut sebagai kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadapnya, tetapi juga bukti bahwa kekerasan seksual kini tidak lagi menjadi urusan masing-masing individu dalam ruang privat tetapi urusan negara di ruang publik.

Penelitian ini menemukan bahwa telah ada kebijakan yang mendukung implementasi UU TPKS di level daerah. Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut telah menyebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual—meski definisi jenis kekerasan seksual masih terbatas dan minim. Kebijakan tersebut menjadi penanda dan bukti nyata bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kekerasan seksual telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di daerah. Kebijakan yang lahir sebelum

UU TPKS tersebut merupakan modalitas yang dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual.

Namun, keberadaan kebijakan saja belum menjadi jawaban satu-satunya dalam memastikan terpenuhinya hak perlindungan korban dari tindak kekerasan yang dialaminya. Studi ini menemukan berbagai hambatan yang selama ini terjadi di 2 provinsi penelitian ini. Hambatan yang masih terjadi berada di ranah implementasi kebijakan. Carol L. Bacchi (1999) melihat bahwa dalam banyak kasus kekerasan seksual, perempuan cenderung sulit mengadukan kasusnya meski segala instrumen kebijakan, lembaga layanan, dan sistem pengaduan kasus telah tersedia. Bacchi menekankan bahwa kekerasan seksual harus dilihat sebagai sebuah kejahatan, bukan sebagai kesalahan perempuan karena dianggap membuat daya tarik seksual (*sexual attraction*). Dengan demikian, menurutnya penting untuk membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan dengan membongkar mitos dan relasi kuasa di berbagai ruang – pendidikan, tempat kerja, masyarakat, keluarga (Bacchi 1999). Salah satu upaya penting dalam kebijakan publik adalah memastikan adanya tujuan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah dan implementasi yang sesuai dengan tujuannya (Bacchi 1999; 2009; 2016). Temuan di 2 provinsi, memperlihatkan tema besar utama yang sama terkait hambatan mewujudkan layanan terpadu, yakni anggaran, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja.

Pertama, politik anggaran yang belum berpihak. Baik di Kalimantan Barat maupun Sulawesi Tengah, persoalan anggaran ini dikemukakan oleh para subjek penelitian. Keterbatasan anggaran membuat institusi dan penyedia layanan (UPTD PPA) kesulitan memberikan layanan yang maksimal. Hal ini berawal dari minimnya alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dibandingkan alokasi anggaran bidang pembangunan lain (seperti pendidikan dan kesehatan). Meski telah ada kebijakan, namun isu perempuan dan anak belum menjadi prioritas dalam politik anggaran.

Dalam studi feminis, dikenal sebuah konsep Anggaran Responsif Gender (ARG) yang ditujukan untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif dengan adanya dukungan pendanaan. Dalam sistem keuangan negara, ARG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam PMK tersebut telah ditegaskan tentang keharusan adanya ARG dengan dokumen pendukungnya, di antaranya Kerangka Acuan Kerja/ *Term of Reference* (ToR) yang ditandai dengan anggaran responsif gender dan memuat Gender Action Budget, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rincian Penandaan Anggaran dan Rekap Penandaan Anggaran (*budget tagging*) dengan *gender tagging*. ARG penting menjadi politik anggaran karena ARG menganalisis kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta memastikan sistem penganggaran mengakomodasi perbedaan tersebut, termasuk untuk mengatasi diskriminasi (Hasan et al. 2019; UN 2018). Penganggaran responsif gender sangat penting baik untuk keadilan gender maupun untuk keadilan fiskal. ARG memastikan bahwa komitmen kesetaraan gender dapat lebih memastikan terwujud (Stephenson 2018). Minimnya pengalokasian anggaran responsif gender di tingkat daerah pada akhirnya membuat implementasi UU TPKS dalam konteks layanan terpadu menjadi lambat dan/atau belum efektif. Dukungan dan dorongan terhadap penghapusan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada level ketersediaan kebijakan saja, tetapi juga pada praktik yang mewujud melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai, keterjangkauan terhadap infrastruktur, dan ketersediaan anggaran yang betul-betul berpihak.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan. Di 2 provinsi, ditemukan persoalan yang sama terkait kuantitas dan kualitas SDM. Misalnya, di beberapa kabupaten/kota, belum tersedianya psikolog klinis baik di UPTD PPA maupun P2TP2A sebagai tenaga ahli. Kemudian, persoalan perspektif dari SDM yang masih minim mengenai kekerasan seksual. Sebagian dari mereka harus mencari informasi dan menambah pengetahuan secara mandiri tanpa dukungan negara. Keberadaan SDM yang mendukung hadirnya layanan terpadu adalah salah satu kunci utama dalam implementasi UU TPKS. Kuantitas dan kualitas SDM sebagai aktor yang memiliki "kuasa" (*power*) tidak bisa diabaikan dalam kajian feminis di kebijakan publik (Lombardo & Meier 2015). Para aktor inilah yang kemudian membangun agenda politik dan mengambil keputusan pada saat kebijakan diimplementasikan (Lombardo & Meier 2015).

Analisis feminis terhadap keberadaan SDM dalam implementasi UU TPKS harus tersedia secara komprehensif dan multi-kebutuhan. Misalnya, bukan hanya memastikan jumlah SDM yang memadai semata, tetapi juga memastikan adanya komposisi jenis

kelamin dan perspektif adil gender bagi setiap SDM yang tersedia. Pertanyaan lebih lanjut, berapa banyak pekerja perempuan dan laki-laki untuk layanan terpadu ini? Seberapa jauh perspektif gender dan keberpihakan mereka terhadap isu kekerasan seksual? Berapa banyak kepala daerah perempuan yang memungkinkan adanya prioritas anggaran untuk isu perempuan dan anak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara politis menempatkan isu SDM dalam kajian kebijakan publik perspektif feminis. Para pelaku kebijakan (aktor) pada umumnya dianggap sebagai subjek yang netral gender. Analisis gender sering kali diabaikan dalam penetapan agenda, negosiasi, implementasi, atau evaluasi kebijakan tertentu (Lombardo & Meier 2015; Lukes 2015). Padahal analisis gender terhadap aktor dan SDM untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan sangatlah penting dan tidak dapat ditawar. Pengurangan atau tidak terpenuhinya prinsip feminis terkait SDM yang memiliki keberpihakan dan perspektif ini dapat melahirkan kerentanan pada korban dalam mengalami praktik ketidakadilan yang berlapis.

Ketiga, persoalan mekanisme kerja di level institusi atau organisasi. Persoalan ini di antaranya merujuk pada persoalan-persoalan terkait belum adanya tindak lanjut terkait mekanisme kerja pasca UU TPKS disahkan, prosedur pemantauan, jalur komunikasi antar institusi. Salah satu hambatan dalam mekanisme kerja ini sangat terkait dengan politik anggaran dan ketersediaan SDM. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam percakapan mengenai implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas. Penting melihat sebuah kebijakan secara holistik, yaitu melihat hubungan antara area kebijakan (teks), instrumen (sumber daya manusia dan anggaran), dan level (nasional, daerah, hingga institusi/organisasi). Kebijakan yang secara eksplisit ditujukan untuk memajukan kualitas hidup perempuan pada praktiknya dapat gagal dalam proses implementasi apabila para aktor di dalam institusi itu sendiri tidak memiliki perspektif dan nilai yang sama (Lombardo & Mergaert 2013; Lombardo & Meier 2015). Demikian juga, dalam implementasi kebijakan tentang perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual dapat gagal ketika sinergitas mekanisme kerja dan prosedur monitoring dan evaluasinya tidak kokoh dibangun dalam perspektif korban.

Dengan demikian, kebijakan yang feminis tidak hanya bicara tentang isu perempuan secara substantif, tetapi juga memastikan distribusi kekuasaan yang adil gender di dalam proses implementasi, keterlibatan para aktor, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang sama dengan tujuan yang telah ditetapkan (Bacchi 2009 & 2016). Hal ini termasuk memastikan perempuan dan orang-orang yang memiliki keberpihakan kepada isu gender menempati posisi kunci pengambilan keputusan dan mendapatkan dukungan sehingga nantinya mampu mengubah status quo di dalam institusi dan masyarakat melalui instrumen kebijakan publik (Krizsan & Lombardo 2013; Lombardo & Meier 2015).

Penutup

Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kebijakan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara spesifik ditujukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di masyarakat Indonesia. Dengan adanya UU ini, berarti negara melihat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab negara, bukan lagi menjadi beban tanggung jawab individu. Di dalam UU TPKS juga disebutkan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Artinya, penghapusan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab pemerintah di semua level pemerintahan. Ini adalah sebuah langkah maju dalam konteks pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia dan perwujudan dari tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*/CEDAW).

Dalam konteks pemerintah daerah, di 2 Provinsi ditemukan telah adanya kebijakan yang memadai di level Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang mendukung implementasi UU TPKS dan pemberantasan kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi kasus di 2 provinsi, adanya UU TPKS dan kebijakan di level provinsi, kota, kabupaten untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap anak ternyata belum cukup efektif. Masih terdapat tantangan dalam implementasi yang membutuhkan perhatian dan komitmen lebih lanjut. Kebijakan saja tidaklah cukup, perlu dukungan dan komitmen konkret dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian awal pasca 1 tahun disahkannya UU TPKS. Hingga penelitian ini selesai di tahun 2023 dan artikel ini ditulis pada April 2024, sejumlah peraturan pelaksana UU TPKS belum juga dirampungkan—yang berkonsekuensi terhadap terhambatnya penyelenggara layanan terpadu di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

Bacchi, C. L. 1999. *Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems*. SAGE Publications: London. https://doi.org/10.4135/978144621788.

Bacchi, C. L. & Goodwin, S. 2016. *Poststructural Policy Analysis: A Guide to Practices*. Palgrave Macmillan: London.

Bacchi, C. L. 2009. *Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?* Pearson Education: London.

Bacchi, C. L. 2017. "Policies as Gendering Practices: Re-Viewing Categorical Distinctions", *Journal of Women, Politics, and Policy*, Vol. 38(1), hlm. 20–41. https://doi.org/10.1080/1554477X.2016.1198207.

Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. 2019. "Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24(1), hlm. 27--42.

Kementerian Keuangan. 2013. "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia", *kemenkeu.go.id*, diakses pada 11 Juli 2023, di https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2019. "Palu Pulih, Perempuan dan Anak Palu Harus Bangkit!", *kemenpppa.go.id*, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2326/palupulih-perempuan-dan-anak-palu-harus-bangkitKPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2021. "Database Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota", *kemenpppa.go.id*, diakses pada 10 Juli 2023, di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/145/2349/database-unit-pelaksana-teknisdaerah-perlindungan-perempuan-dan-anakuptd-ppa-kabupaten-kota.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2021. "Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021", *kemenpppa.go.id*, diakses pada 11 Juli 2023, di https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTAxNQ==.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2023. "Satu Tahun UU TPKS, Galang Sinergi Tuntaskan Peraturan Pelaksana", *kemenpppa.go.id*, diakses pada 10 Juli 2023, di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4531/satu-tahun-uu-tpks-galangsinergi-tuntaskan-peraturan-pelaksana.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2023. "SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak)", *kekerasan.kemenpppa.go.id*, diakses pada 9 Juli 2023, di https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. "Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada 11 Juli 2023, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. "CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada Juli 2011, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan.

Krizsan, A. & Lombardo, E. 2013. "The Quality of Gender Equality Policies: A Discursive Approach", *European Journal of Women's Studies*, Vol. 20(1), hlm. 77–92. https://doi.org/10.1177/1350506812456462.

Lombardo, E., Meier, P., & Verloo, M. 2013. Policy Making. In G. Waylen., K. Celis., J. Kantola., & L. Weldon, *The Oxford Handbook of Gender and Politics*. Oxford University Press: New York.

Lombardo, E. & Meier, P. 2015. Policy. In L. Disch. & Hawkesworth, M (eds.), *The Oxford Handbook of Feminist Theory*. Oxford Handbooks Online. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199328581.013.32.

Lombardo, E. & Mergaert, L. 2013. "Gender Mainstreaming and Resistance to Gender Training: A Framework for Studying Implementation", *NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, Vol. 21(4), hlm. 296–311. DOI:10.1080/08038740.2013.851115.

Lukes, S. 2005. *Power: A Radical View. 2nd updated ed*. Palgrave Macmillan: New York.

Millett, K. 2000. *Sexual Politics*. University of Illinois Press: Illinois.

Okin, S. M. 1989. *Justice, Gender and the Family*. Basic Books: New York.

Okin, S. M. 1991. Gender, the Public and the Private. In D. Held, *Political Theory Today*. Polity Press: Cambridge.

Pateman, C. 1983. Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy. In S. I. Benn. & G. F. Gaus, *Public and Private in Social Life*. Croom Helm and St. Martin's Press: London.

Pateman, C. 1989. *The Disorder of Women*. Polity Press: Cambridge.

Pemerintah Kota Palu. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Donggala. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kabupaten Donggala. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Sigi. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Stephenson, M. A. 2018. "A Guide to GenderResponsive Budgeting", *Oxfam & Women's Budget Group*, diakses pada 12 Juli 2018, di https://policy-practice.oxfam.org/resources/rough-guide-to-gender-responsivebudgeting-620429/.

United Nations (UN). 2018. "Gender-Responsive Budgeting in Asia and The Pasific: Key Concepts and Good Practices", *unescap.org*, diakses pada 12 Juli 2023, di https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_Gender-Responsive_Budgeting.pdf.

Valevi, M. I. 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Wilayah Kalimantan Barat: Suatu Analisis Stratejik Ketahanan Wilayah Universitas Indonesia*. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia: Jakarta.

Catatan Akhir

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang baru saja diterbitkan pada 22 April 2024 memperkuat dorongan pembentukan UPTD PPA.

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 29 No. 1, 2024, 17—29
copyright @ 2024 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v29i1.960
DDC: 305

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus

Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case

Antik Bintari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Sumedang km. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

a.bintari@unpad.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women, yet little attention has been paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has become a global concern; this increase is in line with the development of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims' rights which have never been obtained until now. It is hoped that this policy will also serve as a legal framework to address cybersexual violence. However, after almost two years of having passed the TPKS Law, this regulation's implementation still faces challenges. It is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be considered an act of sexual violence with new methods and means in line with current technological developments. This article discusses the current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores the response of the Indonesian state/government to this phenomenon, along with its opportunities and challenges.

Keywords: sexual harassment, cyber sexual harassment, Sexual Violence Crime Law

Abstrak

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk agresi yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan. Namun, kekerasan seksual di dunia maya, belum mendapatkan atensi yang memadai. Peningkatan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, telah menjadi perhatian dunia. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan media sosial di Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), muncul optimisme tentang danya jaminan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan. Adanya kebijakan ini diharapkan pula dapat menjadi payung hukum yang dapat merespons kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, setelah hampir dua tahun memiliki UU TPKS disahkan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan dan belum optimal dalam penanganan kekerasan seksual siber yang cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan cara baru seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Tulisan ini membahas bagaimana fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini dan selanjutnya menggali lebih lanjut respons pemerintah Indonesia terhadap fenomena kasus tersebut beserta peluang dan tantangannya.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS

Pendahuluan

Kemunculan internet menandai pergeseran paradigma dalam komunikasi manusia. Ia juga menandai era konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendorong terjadinya demokratisasi informasi. Pada awal kehadiran internet, ada optimisme besar bahwa kesetaraan dapat dipercepat dengan melampaui batas-batas geografis, budaya, dan sosial. Internet dibayangkan sebagai ruang, tempat suara-suara yang beragam dapat berkembang, menantang struktur kekuasaan tradisional, dan mendorong inklusivitas. Dalam perkembangannya, keamanan siber hadir sebagai isu serius yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia. Kehadiran berbagai *platform* media sosial, desain, dan konstruksinya yang tidak dapat diandalkan, banyaknya konten yang tidak terstruktur, dan meningkatnya peluang kriminalitas telah membuat media sosial rentan terhadap ancaman siber tingkat tinggi (Soomro & Hussain 2019)[1]. Seiring dengan berkembangnya internet, media sosial, dan konektivitas seluler, kekerasan seksual siber juga terjadi dan meluas. Kekerasan siber terhadap perempuan telah merambah ke ruang-ruang *online*, menargetkan perempuan dan anak perempuan dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan, kekerasan seksual, dan perundungan di dunia maya. Fenomena yang tidak terbayangkan tiga puluh tahun yang lalu, kini menunjukkan dampak serius pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Selain persoalan di atas, perempuan juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual berbasis siber. Kekerasan seksual siber/kekerasan seksual di dunia maya merupakan bentuk agresi yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan. Menurut penulis, maraknya kekerasan seksual siber terhadap perempuan dapat dilihat sebagai manifestasi dari perlawanan terhadap dinamika perubahan peran gender. *Platform* yang seharusnya emansipatoris justru menjadi instrumen penindasan. Hal tersebut dipertegas oleh Marganski dan Melander (2021) bahwa sifat *agathokakologis*[2] dari teknologi menuntut kita untuk memerhatikan tidak hanya bahaya yang terkait dengan interkonektivitas, tetapi juga potensi teknologi untuk melawan pelanggaran dan "berbuat baik". Teknologi memiliki dua sisi mata uang, ia memberdayakan tetapi juga meningkatkan kerentanan. Dibutuhkan respons serius akan ancaman kekerasan berbasis gender pada ruang digital untuk memstikan bahwa perempuan merupakan penerima manfaat dari kemajuan teknologi, dan bahwa kemajuan teknologi informasi sungguh membawa dampak emansiptoris bagi kelompok marginal. Lebih lanjut, kita juga perlu seksisme dan misogini secara *online* di ruang komunal dan kekerasan berteknologi pribadi, misalnya kekerasan dalam relasi pacaran atau perkawinan yang melibatkan kekerasan berbasis *online*.

Peningkatan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, telah menjadi perhatian dunia. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan media sosial di Indonesia dan rendahnya pemahaman generasi milenial tentang kekerasan seksual di dunia maya. Pandemi Covid-19 lalu secara tidak langsung telah meningkatkan KTPAP. Sementara peningkatan tajam kekerasan oleh pasangan intim selama pandemi, membuat lingkungan fisik mereka menjadi kurang aman. Pada saat yang sama, dunia daring juga menjadi lebih berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan komunikasi virtual selama pandemi (UN Women 2024). Perkembangan teknologi ternyata tidak serta-merta memberdayakan perempuan sebab masih banyak anggapan dan praktik sosial yang menjadikan mereka sebagai objek kekerasan. Remaja perempuan yang merupakan pengguna media sosial misalnya, mengalami kerentanan kejahatan *online* (Jatmiko et al. 2020). Teknologi menawarkan ruang dan cara baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka dapat mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi korban melalui kekerasan psikologis, baik berupa ancaman peretasan, ancaman pemerkosaan, bahkan pembunuhan (Marganski 2018). Berdasarkan penelitian Barker dan Jurasz (2019), diketahui perempuan yang berpartisipasi dalam forum siber kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis teks seperti misogini *online*. Kekerasan seksual siber sering kali tidak dapat dilacak dengan mudah karena pelaku pelecehan dalam banyak kasus bersifat anonim.. Selain itu, karena merupakan arena komunikasi sehari-hari, penggunaan internet di banyak negara, termasuk para korban dapat diakses kapan dan di mana pun (Vilic 2013).

Sepanjang tahun 2022, data pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan penurunan laporan kasus, yaitu 1,4 persen dibanding sebelumnya. terdapat jumlah kasus siber di ranah personal, yaitu 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar (sebanyak 549 kasus) dan pacar (230 kasus). Sementara, kasus siber di ranah publik terbanyak dilakukan oleh "teman media sosial" berjumlah 383 kasus. Pada tahun ini, kasus pinjaman *online* meningkat sebanyak 225 persen (13 kasus) dibandingkan tahun sebelumnya (4 kasus). Sementara itu, data siber yang dilaporkan lembaga layanan terbanyak adalah di LSM sebanyak 103 kasus. Data ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus siber yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus dan sebagian besar pelaku kasus siber ini adalah orang tak dikenal, pacar dan/atau mantan pacar.

Data yang digambarkan dalam Catahu Komnas Perempuan dan LBH APIK mengenai situasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tersebut memperlihatkan keterbatasan kerangka hukum Indonesia dalam melindungi dan memberikan akses keadilan terhadap korban (Virginaputri 2021). Salah satu sebab rendahnya jumlah kasus KBGO yang dilaporkan ke polisi adalah kekhawatiran korban akan ancaman pelaporan balik terhadap korban. Kekhawatiran untuk melaporkan kasus salah satunya disebabkan oleh rasa takut akan kemungkinan terjadinya kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terlebih jika korban terlibat dalam pembuatan konten intim digital. Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ada harapan baru tentang penanganan KS yang lebih responsif dan komprehensif, termasuk dalam penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Namun demikian, hampir dua tahun pengesahan UU TPKS, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan. Tantangan yang dimaksud di antaranya belum disahkannya aturan pelaksana UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memastikan mekanisme perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban. Selain itu, implementasi UU TPKS hingga saat ini belum optimal dan efektif terkait dengan penanganan KSBE yang cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan cara baru yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Komnas Perempuan (2018) mencatat bahwa korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan jaminan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Beberapa kendala dan tantangan di antaranya adalah substansi UU yang ada belum memadai dan menjangkau segala bentuk kekerasan seksual, jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) yang masih terbatas, hukum yang ada belum memberi ruang yang luas dalam penanganan yang terintegrasi dengan sistem pemulihan pada korban dan budaya kekerasan yang telah meresap serta tertanam dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini selanjutnya berupaya menggali lebih jauh lagi respons negara dalam hal ini pemerintah di Indonesia, terhadap kasus KSBE yang terus meningkat tiap tahunnya.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berasal dari paradigma interpretivis dan konstruktivis, yang berusaha untuk memahami secara mendalam subjek penelitian daripada memprediksi hasil, seperti dalam paradigma positivis (Denzin & Lincoln 2011). Interpretivisme berusaha untuk membangun pengetahuan dari pemahaman sudut pandang individu yang unik dan makna yang melekat pada sudut pandang tersebut (Creswell & Poth 2018). Penelitian ini juga berperspektif feminis seperti yang disampaikan oleh Cook dan Fonow, sebab penelitian dilakukan oleh, untuk, dan tentang perempuan merupakan untuk tujuan emansipatoris merupakan penelitian feminis (Cook & Fonow 1985). Berbeda dengan penelitian yang bersifat umum, penelitian yang berperspektif feminis, secara eksplisit menyatakan keberpihakannya. Bukan mementingkan metode riset, tetapi bagaimana hasil riset digunakan untuk bisa menjawab berbagai kondisi hidup perempuan yang merugi akibat gender (seperti mengalami opresi, menjadi objek kekerasan, kebutuhan khusus sebagai perempuan terabaikan, dan sebagainya). Dengan kata lain, orientasinya cenderung pada kehendak memahami dan menjawab masalah yang dialami perempuan sebagai akibat dari ideologi gender. Para feminis percaya bahwa ideologi gender yang berlaku kerap merugikan perempuan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pribadi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan sumber data penelitian diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi (Hasudungan et al. 2020). Dengan kata lain, peneliti menggunakan data sekunder (Heaton 2012; Tight 2019b dalam Putera et al. 2022) yakni pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, atau setiap kumpulan data yang tidak diperoleh oleh penulis, atau "analisis data yang dikumpulkan oleh orang lain" (Boslaugh 2007 dalam Martins et al. 2018). Peneliti menggunakan sumber-sumber data, seperti jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, laporan hasil penelitian, *e-book* yang sebagian besar terkait dengan isu-isu kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender *online*.

Memahami Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

Till (1980) mengklasifikasikan perilaku pelecehan seksual ke dalam lima kategori: (1) komentar atau perilaku seksis; (2) ajakan untuk melakukan aktivitas seksual dengan janji atau imbalan; (3) rayuan seksual yang tidak pantas dan menyinggung, tetapi tidak ada sanksinya; (4) paksaan untuk melakukan aktivitas seksual dengan ancaman hukuman; dan (5) kejahatan dan pelanggaran seksual. Setelah melakukan uji coba yang ekstensif, muncul saran (Fitzgerald et al. 1995) untuk mengubah klasifikasi jenis-jenis pelecehan seksual menjadi tiga kategori: kekerasan berbasis gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual.[3] Ketiga jenis pelecehan seksual tersebut dapat terjadi secara *offline* maupun *online*. Namun, karena sifat maya dari dunia maya, sebagian besar ekspresi pelecehan seksual yang ada di Internet

muncul dalam bentuk kekerasan berbasis gender dan perhatian seksual yang tidak diinginkan (Barak 2005).

Definisi tradisional tentang kekerasan mungkin tidak cukup untuk menangani semua bentuk kekerasan daring. Perkembangan pesat teknologi dan ruang digital, termasuk melalui kecerdasan buatan, pasti akan memunculkan manifestasi kekerasan daring yang berbeda dan baru terhadap perempuan (Šimonović 2018). Hukum yang lama mungkin tidak dapat menjelaskan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan melalui telepon seluler, internet, *platform* media sosial, dan/atau email. Oleh karena itu, hukum yang ada mungkin tidak dapat melindungi perempuan dari jenis pelecehan baru ini. Selain itu, istilah-istilah seperti pelecehan siber, kekerasan *online*, kekerasan digital, dan kekerasan siber sering kali digunakan secara bergantian dan dapat membingungkan. Pelecehan secara *online* atau siber, salah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan siber, telah dideskripsikan sebagai tindakan atau perilaku yang menyiksa, mengganggu, meneror, menyinggung perasaan, atau mengancam seseorang melalui email, pesan instan, atau sarana digital lainnya dengan tujuan untuk melukai orang tersebut (Hazelwood & Koon-Magnin 2013).

Definisi KSBE sering kali dikenal juga dengan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)[4]. Di Indonesia, istilah KBGO belum secara resmi digunakan oleh lembaga negara (Rahmawati & Saputri 2022). Komnas Perempuan misalnya, telah menaruh perhatian pada kasus-kasus kekerasan dalam ranah siber sejak Catatan Tahunan (Catahu) 2016. Namun hingga saat ini, Komnas Perempuan masih menggunakan istilah yang beragam untuk menjelaskan kejahatan berbasis gender *online*, seperti kejahatan siber (*cyber crime*) pada 2016, kejahatan siber pada 2017, kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis *cyber* pada Catahu 2018 dan Catahu 2019. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan menggunakan terminologi KtP berbasis siber. Sementara dalam Catahu Komnas Perempuan 2021, Komnas Perempuan menggunakan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)[5]. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menggunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sesuai dengan Pasal 4 UU TPKS. KSBE dapat terjadi melalui berbagai media; ruang obrolan, situs jejaring sosial, pesan, email, iklan, tautan otomatis, atau *spam*. KSBE semakin memperluas kesenjangan digital yang sudah ada sebelumnya terkait gender dengan menciptakan hambatan terhadap kesetaraan dan partisipasi penuh di dunia maya (Jane 2020).

KSBE juga telah dicirikan oleh para analis sebagai serangkaian gambar atau teks yang agresif atau melecehkan secara seksual yang disampaikan melalui media digital (Chowdhury et al. 2019). Kekerasan seksual siber juga diartikan sebagai perilaku verbal atau nonverbal yang tidak diinginkan yang bersifat seksual secara *online* dengan tujuan atau efek melanggar martabat seseorang dengan menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung perasaan (Šimonović 2018). Selanjutnya, diketahui bahwa kekerasan seksual di dunia maya terjadi dalam proporsi yang tinggi terutama di kalangan generasi muda (Reed et al. 2020). Meskipun penelitian dan akun pelecehan seksual secara tatap muka selalu berkembang, penelitian yang sangat terbatas telah dilakukan terhadap pelecehan seksual dalam konteks dunia maya. Sebagai akibatnya, sebagian besar dari apa yang diketahui tentang pelecehan seksual berbasis Internet, berasal dari penelitian yang dilakukan pada pelecehan seksual tatap muka serta perilaku Internet terkait lainnya di media sosial (Schenk 2008).

Diperkirakan satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka (WHO 2021). Demikian pula, kekerasan siber terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya pelecehan dan penindasan siber, telah meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Studi menunjukkan bahwa di Uni Eropa, misalnya, 73 persen perempuan menjadi sasaran pelecehan *online* (Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Dasar 2014). Sebuah survei di Jerman terhadap lebih dari 9.000 pengguna internet nasional, berusia 10 hingga 50 tahun, juga menemukan bahwa perempuan secara signifikan lebih mungkin mengalami pelecehan dan penguntitan di dunia maya dibandingkan laki-laki (Straude-Müller et al. 2012). Penggunaan berbagai jejaring sosial dan teknologi *online* meningkatkan dan mengubah fenomena kekerasan seksual dalam berbagai aspek. SAFEnet (2020) mengungkapkan bahwa selama *platform-platform* digital memiliki fitur interaktif antar pengguna, maka dia sudah berpotensi menjadi ruang kekerasan digital. Pemanfaatan berbagai teknologi komunikasi digital ini memungkinkan korban dan pelaku berada di lokasi berbeda dengan jarak jauh, seperti beda kota, beda provinsi, bahkan beda negara. Selanjutnya. Kuklytė (2018) menguraikan bahwa terdapat beberapa model pelecehan seksual di dunia maya yang disediakan

bertujuan untuk berkontribusi pada pengertian konseptual tentang kelompok-kelompok yang rentan, apa yang bisa menjadi konsekuensi pada tingkat yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Model Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Berbagai Tingkatan

Tingkat Interpersonal	**Tingkat Perusahaan**	**Tingkat Negara**
Pelecehan seksual siber/pemerkosaan virtual/*grooming seksual online*.	Pelecehan seksual siber/ketidakpantasan siber di lingkungan kerja.	Tindakan *hybrid* besar-besaran melalui jejaring sosial terhadap negara tertentu.
Konsekuensi	**Konsekuensi**	**Konsekuensi**
Kerugian psikologis. Kurangnya pemahaman dan kemampuan siber. Kurangnya literasi dan etika computer.	Kerugian finansial. Kerugian nonfinansial. Kerugian psikologis. Masalah sosio-demografik.	Kerugian psikologis. Kerugian politik. Masalah sosio-demografik.

Sumber: Kuklytė (2018)

Tingkat negara misalnya, menunjukkan insiden KSBE beroperasi di tingkat diplomasi digital sebagai konflik hibrida – serangan siber besar-besaran terhadap minoritas (anak-anak, remaja perempuan) yang menyebabkan masalah sosial-demografis dan memengaruhi isu-isu politik tanpa penggunaan kekuatan militer (Maurer & Janz 2014). Tingkat interpersonal mendefinisikan KSBE di antara individu yang tidak memiliki hubungan apa pun (tidak saling mengenal). Penyebaran yang tidak tepat dan diskriminasi gender yang terjadi di antara anak-anak, remaja, siswa, dan siapa pun yang terpapar dan berinteraksi menggunakan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk memulai dan terlibat dalam koneksi video atau pertemuan tatap muka dengan korban. Selain itu, tingkat anonimitas yang tinggi dan ketidakseimbangan kekuatan memungkinkan komunikasi destruktif yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan kerusakan psikologis.

Penelitian telah menemukan bahwa perempuan lebih mungkin mengalami bentuk kekerasan *online* yang parah dibandingkan laki-laki, seperti pelecehan dan penguntitan di dunia maya (Brody & Vangelisti 2017). Penguntitan di dunia maya dikenal dengan istilah "*cyberstalking*", berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kuklyte (2018) di atas merupakan kategori model pelecehan sekual di tingkat interpersonal. *Cyberstalking* telah digunakan untuk menggambarkan berbagai perilaku yang melibatkan: (a) ancaman dan/atau pelecehan yang berulang-ulang; (b) melalui penggunaan surat elektronik atau komunikasi berbasis komputer lainnya; dan (c) yang dapat membuat orang yang berakal sehat merasa takut atau khawatir akan keselamatannya (Fisher et al. 2000; Departemen Kehakiman AS 2000 dalam Finn 2004). National Institute of Justice (1996) memperkirakan bahwa 8 persen perempuan dan 2 persen laki-laki pernah dikuntit pada suatu waktu dalam hidup mereka. Berkenaan dengan kampus, ada beberapa bukti bahwa penguntitan mungkin memiliki profil yang berbeda dari penguntitan secara nasional. Sebuah penelitian National Institute of Justice (1998) terhadap 4.446 mahasiswi di 223 perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat menemukan bahwa 13,1 persen perempuan mengatakan bahwa mereka telah dikuntit selama periode 7 bulan pada tahun 1997, dan 24,7 persen dari semua korban melaporkan bahwa penguntitan tersebut termasuk penguntitan pada email (Fisher et al. 2000).

Perusahaan dalam konteks ini dapat mewakili analisis perilaku antar pekerja di jejaring sosial dengan sasarannya pekerja perempuan. Kekerasan seksual siber yang terjadi di antara pekerja atau pimpinan terhadap bawahannya telah dianalisis oleh Giumetti et al. (2016). Kekerasan seksual siber dapat menyebabkan kerusakan finansial dan nonfinansial, juga merugikan kesejahteraan dari pegawai yang bersangkutan, termasuk kesehatannya. Hal ini diperkuat oleh Marganski (2018, hlm. 21) bahwa kejahatan berbasis teknologi yang dapat dinilai melalui lensa feminis adalah pelecehan di tempat kerja, yang dapat mencakup mulai dari bahasa kasar yang dikomunikasikan secara elektronik kepada karyawan dalam konteks pekerjaan mereka (misalnya *blogger online*, kritikus video game, reporter olahraga, dan penulis lain yang posisinya disorot oleh publik)

hingga intimidasi dan ancaman cedera serius, bahaya, atau kematian terhadap seseorang. Dengan demikian, umumnya korban menerima dampak dari penghinaan, direndahkan hingga akibat lain dari standar ganda seksualitas yang tertanam dalam sistem patriarki. Tidak jarang pula korban menarik diri dari forum bahkan keluar dari pekerjaannya akibat tekanan psikologis sehingga akan berdampak pula pada kondisi ekonomi dari korban (akibat kehilangan pekerjaan).

Salah satu contoh KSBE pada tingkat perusahaan di antaranya dapat dilihat berdasarkan survei *Inter-Parliamentary Union* tahun 2016 yang tercantum dalam laporan *Association for Progressive Communications* (*APC*) tahun 2017 menemukan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama kekerasan psikologis - termasuk komentar seksis dan misoginis, gambar yang merendahkan martabat, pengeroyokan, ancaman, dan intimidasi yang dilakukan terhadap anggota parlemen perempuan. Seorang anggota parlemen Eropa menceritakan bahwa dalam kurun waktu empat hari, ia menerima lebih dari 500 ancaman pemerkosaan di Twitter. Sementara seorang anggota parlemen dari Asia mengatakan bahwa ia menerima informasi tentang anaknya disertai usianya dan lokasi sekolahnya kemudian mengancam akan menculiknya.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terjadi karena Relasi Kuasa yang Timpang

Fenomena internet dan fenomena teknologi tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengacu pada isu gender. Teori konstruksi sosial teknologi (*social construction of technology*) menunjukkan bahwa teknologi dibentuk secara sosial dalam konteks sosial tertentu (Dixon et al. 2014, hlm. 2). Senada disampaikan oleh Bimber (2000) bahwa internet merupakan arena interaksi kelas yang mendominasi dan didominasi. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga terjadi di Internet karena latar belakang sosial-ekonomi dan gender. Kemapanan ekonomi, keterampilan, dan keahlian dalam menggunakan komputer dan gawai menjadi modal bagi laki-laki untuk melakukan upaya legitimasinya. Pengetahuan dan penguasaan aplikasi pengolah teks dan gambar lebih bersahabat dengan laki-laki karena penciptanya masih didominasi oleh laki-laki. Van Zoonen dalam Royal (2008), menjelaskan hubungan ini dengan melihat hubungan antara teori feminis dan teknologi informasi. Ia menulis bahwa beberapa publikasi mengidentifikasi eksklusi perempuan dalam penemuan, penciptaan, dan desain teknologi baru. Pada akhirnya, situasi ini menyebabkan adanya perilaku seksis dan dominasi patriarki di Internet. Kondisi ini tentu saja akan merugikan perempuan, baik di Internet maupun di dunia nyata.

Keberadaan perempuan akan selalu dianggap sebagai *second sex* (de Beauvoir 1989). Di sisi lain, dominasi patriarki akan semakin menguat dengan adanya pendudukan dunia baru ini. Dengan kata lain, mengutip apa yang disampaikan Marganski dan Melander (2021, hlm. 22), teknologi telah digunakan sebagai media untuk melakukan agresi dan menampilkan maskulinitas terhadap mereka yang sudah tertindas. Kontrol ruang yang didominasi oleh laki-laki dapat diterjemahkan menjadi penindasan bagi kelompok yang terpinggirkan. Forum Tata Kelola Internet 2015 juga mencatat berbagai dampak dari KBGO, termasuk dampak psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan bunuh diri, penyensoran diri, pembatasan mobilitas, dan kerusakan pada prospek karier (SAFEnet 2022). Selain itu, laporan ini juga menyatakan bahwa dampak KTPAP tidak terbatas pada individu tetapi dapat meluas ke masyarakat luas, menciptakan masyarakat yang membuat perempuan merasa tidak aman, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki serta ketidaksetaraan meningkat, dan budaya seksisme serta kebencian terhadap perempuan semakin menguat.

Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. Relasi kuasa menjadi alat penindasan. Ia ditentukan oleh hubungan hierarkis. Posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi. Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Pelaku merupakan pihak yang memiliki kuasa dalam suatu relasi dengan korban. Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki kuasa tersebut. Dengan memiliki kekuasaan, otomatis yang bersangkutan memiliki pengaruh termasuk terhadap orang-orang yang ia jadikan korban kasus kekerasan seksual. Sebuah studi oleh UN Women mencatat bahwa Kekerasan Seksual Siber, seperti halnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan di luar jaringan/secara langsung, harus didekati dari sudut pandang lintas sektoral. Di dunia maya, berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang berkaitan dengan, misalnya, usia, ras, kemiskinan, dan orientasi seksual memengaruhi kelompok perempuan yang berbeda dan membuat mereka sangat rentan terhadap kekerasan -- kekerasan

seksual siber juga dibentuk oleh faktor-faktor yang serupa.

Penelitian siber yang menekankan gender telah berkembang pesat dalam tiga tahun terakhir, sebagian dibuktikan dengan banyaknya penelitian relevan yang muncul dalam bentuk abstrak disertasi. Studi Carstarphen dan Lambiase (1998) menunjukkan bahwa hambatan gender di ruang siber sebagian disebabkan oleh masalah bahasa dan kode serta retorika ruang siber dimodelkan berdasarkan struktur kekuasaan dan hierarki wacana dominasi. Demikian pula, dalam sebuah studi etnografi, Cushing (1996) menemukan kurangnya suara dan aktor perempuan di Internet, menunjukkan bahwa ritual dan pola bahasa laki-laki mendominasi. Bahkan, konten di Internet sering kali menghasilkan kekerasan simbolik melalui kata-kata, gambar, dan komunikasi yang bernada kebencian dengan latar belakang rasis atau seksis -- seksisme siber (Heitmeyer & Hagan 2005). Lebih lanjut, Schroeder (2020) menjelaskan bahwa algoritma sangat memengaruhi bagaimana gender dialami, diproses, dan disirkulasi ulang dalam budaya konsumen kontemporer. Dengan demikian, ketika konsumen dan peneliti merangkul konsepsi gender yang lebih luas, pasar daring tampaknya bekerja untuk menuliskan kembali gagasan stereotip tentang gender. Penelitian-penelitian ini telah membuktikan bahwa perubahan zaman menuju dunia yang lebih modern tidak dapat membiarkan perempuan menjadi subjek bagi dirinya sendiri.

Dominasi dan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan di dunia maya adalah bukti kuat dari dominasi patriarki. Seks, bagaimanapun, lebih mementingkan status sebagai penentu utama posisi masyarakat. Sebagai kelompok sosial yang dominan, laki-laki terlibat dalam perilaku yang menciptakan struktur sosial hierarkis yang mendominasi sistem patriarki. Oleh karena itu, kekuasaan sosial tercermin dalam diri laki-laki sebagai fungsi dari status maskulin mereka yang berkuasa (Veevers & Henley 1979). Seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu, siber seksisme merupakan kekerasan yang bersifat *soft violence* karena terjadi ketika ada relasi antara orang-orang yang tidak ingin tahu bahwa dirinya menjadi target, dalam artian korban siber seksisme tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Selain itu, dalam praktiknya, hal ini juga dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari di Internet. Kuatnya dominasi patriarki di masyarakat menjadi akar dari seksisme di dunia nyata dan di dunia maya. Patriarki selalu memandang perempuan sebagai objek. Oleh karena itu, perempuan sering mengalami ketidakadilan, stereotip, marginalisasi, atau bahkan kekerasan dan pelecehan. Masyarakat telah mengadopsi norma-norma patriarki dalam segala aspek dan telah menjadi gaya hidup. Karenanya, sistem patriarki dikonstruksi menjadi sesuatu yang tampak alamiah dan biasa saja (Lerner dalam Rakoczy 2004). Dapat dikatakan bahwa teknologi digital ataupun Internet bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada KSBE. Banyak konteks dari berbagai perspektif yang membuat kekerasan ini terjadi, dan utamanya pada kekerasan berbasis gender adalah konteks struktur relasi kuasa dan patriarki yang mengakar – berkontribusi besar menjadi penyebabnya.

Upaya Merespons dan Mencegah Keberulangan Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

Seperti halnya kekerasan seksual yang terjadi secara *offline* yang sering kali tidak ditangani secara serius atau tidak mendapat tanggapan dan solusi yang efektif, kasus KSBE juga sering kali terabaikan sehingga para korban/penyintas harus berjuang sendiri dalam menghadapi kasus yang ia alami tanpa dukungan dari berbagai pihak, khususnya negara/pemerintah. Dalam Laporan *United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from a Human Rights Perspective* (Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Dampaknya tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan *Online* dari Perspektif Hak Asasi Manusia) pada tahun 2018 dijelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan agar aktor negara maupun nonnegara tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menyidik, dan menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh sektor privat, seperti penyelenggara sistem elektronik atau penyedia internet (SAFEnet 2022). Meskipun tidak ada kerangka hukum standar internasional yang secara khusus mengatur Kekerasan Seksual Siber, berbagai instrumen telah mengakui intensitas masalah ini dan membahas perlunya mengembangkan Undang-Undang yang jelas serta pedoman penuntutan. Rekomendasi 35 dari The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) memperluas definisi kekerasan terhadap perempuan di luar ruang fisik dengan memasukkan "lingkungan yang

dimediasi teknologi". Dengan demikian, menangani kekerasan *online* dan kekerasan yang difasilitasi oleh Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) terhadap perempuan (United Nations 2017).

Beberapa negara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2022) mengungkapkan bahwa terdapat tujuh negara yang telah mempunyai aturan terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), antara lain Jerman, Inggris Raya, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan, walaupun hanya tiga negara yang memiliki aturan yang cukup komprehensif. Ketiga negara yang dimaksud adalah Australia, Filipina, dan Pakistan yang memiliki kebijakan khusus mengenai KSBE, sedangkan negara lainnya menjerat tindakan KSBE dengan tindakan kejahatan di media internet secara umum. Pentingnya peraturan atau kebijakan pemerintah untuk mencegah KSBE adalah legislasi dan penegakan hukum, perubahan budaya organisasi-sosial, pendidikan, dan pelatihan bagi kelompok yang berpotensi menjadi korban serta kelompok yang berpotensi menjadi pelaku (Paludi & Paludi 2003; Sbraga & O'Donohue 2000). Perundang-undangan diperlukan untuk menetapkan batas-batas yang tegas dan jelas untuk perilaku yang berhubungan dengan seks antarpribadi dan untuk mendefinisikan sanksi yang melekat pada perilaku yang melanggar hukum (Wiener & Gutek 1999; Riger 1991). Perundang-undangan juga memainkan peran sosial yang penting dalam mengkomunikasikan konteks sosial tentang apa yang diterima dan apa yang tidak diterima dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, berfungsi sebagai tanda yang jelas tentang nilai dan moral. Penegakan hukum diperlukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang sehingga tidak hanya menjadi deklarasi teoritis. Meskipun legislasi dan penegakan hukum merupakan prioritas utama di dunia nyata dan terjadi di semua masyarakat, kegunaannya di dunia maya hanya bersifat parsial karena beberapa alasan yang sudah diketahui.

Bagaimana dengan pemerintah Indonesia sendiri? Pada prinsipnya, di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk juga di dalamnya pengaturan terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media internet. Pengaturan terkait tindak pidana melalui media elektronik dalam UU ITE diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE. Namun demikian, pengaturan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE ini dalam penegakan hukumnya sering kali menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan rumusan formulasi delik tidak jelas terkait dengan frasa "konten melanggar kesusilaan". Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam hal merumuskan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seharusnya memuat rumusan dan penjelasan yang bersifat umum tidak hanya terkait tindak pidananya saja. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut dapat dijadikan payung hukum atau suatu pedoman bagi para penegak hukum (Fitania & Wirasila 2019).

Selanjutnya, Indonesia mengalami pasang surut proses pembahasan Undang-Undang yang membahas secara khusus terkait kekerasan seksual. Perjalanan UU TPKS selama 2 tahun merupakan masa pembelajaran yang sangat penting. UU TPKS akan menjadi sebuah tonggak baru, payung hukum yang dapat memberi kepastian dan percepatan pemenuhan hak-hak korban, memberikan keadilan atas korban serta melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, kehadiran UU TPKS menjadi salah satu upaya perlindungan dari berbagai tindak kekerasan seksual pada segmentasi kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan anak-anak. Karakteristik interseksional, seperti usia, ras, dan disabilitas, antara lain, membuat kelompok tersebut lebih rentan dan menandai mereka untuk menjadi sasaran yang lebih sering mengalami berbagai tindak kekerasan seksual. Terkait dengan KSBE, UU TPKS kemudian menguraikan secara spesifik mengenai hal tersebut, yang dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) huruf i jo Pasal 14 (a) yang secara garis besar menegaskan bahwa yang dimaksud perilaku KSBE adalah di antaranya: melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; serta melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Kebijakan lainnya yang perlu diapresiasi adalah kehadiran Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang juga mengakomodir tentang Kekerasan Seksual Siber (KSS) pada Pasal 5 (1) yang menyatakan bahwa kekerasan

seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada ayat (2), meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan KSS, namun diuraikan beberapa jenis kekerasan seksual yang termasuk KSS dalam permendikbud tersebut, yakni 1) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban; 2) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; 3) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; 4) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Demikian pula dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang melakukan dua langkah untuk mendukung pelaksanaan pengaturan dalam UU TPKS dengan membuat aplikasi untuk pelaporan TPKS serta melakukan komunikasi publik untuk pencegahan.

Meskipun secara kebijakan, negara tampaknya mulai memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap isu kekerasan seksual di indonesia, namun perjalanan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu dikawal oleh berbagai pihak. Sesungguhnya, jika berbicara tentang kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan Undang-Undang dalam arti keberpihakan negara terkait kebijakan saja, tetapi juga butuh perubahan budaya agar perempuan dan laki-laki itu menjadi lebih setara dalam pemenuhan haknya sebagai manusia dan warga negara dengan memberikan edukasi pada kedua belah pihak. Artinya, perlu untuk membangun sensitivitas dan kesadaran bersama di kalangan masyarakat. Kurangnya sensitivitas akan mengaburkan esensi kehadiran UU TPKS dan peraturan lainnya yang mendukung penghapusan kekerasan seksual, khususnya KSBE. Sebagai contoh, sering kali meningkatnya KSBE sering tidak sejalan dengan penanganan dan perlindungan korban. Tidak jarang, seseorang yang menjadi korban justru dikriminalisasi atau mengalami reviktimisasi. Selama ini, korban KSBE sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan psikologis, seperti malu, takut, dan relasi kuasa yang menghambat korban untuk melapor. Seluruhnya merupakan imbas dari budaya patriarki. Selain itu, kepentingan menjaga nama baik keluarga atau masyarakat yang membuat korban terhambat melapor. Hal ini terjadi pada kasus yang menimpa seorang artis perempuan berinisial RK yang konten intim dirinya tersebar luas tanpa izin. Ironisnya, perbincangan mengenai RK justru berpusat pada dirinya sebagai sosok dalam konten itu, alih-alih fakta bahwa ia telah menjadi korban *non-consensual intimate image* (NCII) alias penyebaran konten intim nonkonsensual[6]. Selanjutnya, RK juga dikriminalisasi dengan adanya laporan masyarakat atas dirinya dalam konten intim tersebut ke pihak kepolisian. Padahal, dengan penjelasan dalam UU TPKS bahwa NCII merupakan bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik, seharusnya RK diposisikan sebagai korban dan mendapatkan perlindungan. Kemudian pelaku penyebaran konten tersebut harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Konde 2023).

Temuan lain terkait penanganan KSBE adalah banyak korban KSBE akhirnya memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka ke polisi, atau meninggalkan kasus ini sendirian, atau memilih untuk pindah tempat tinggal, atau hanya memilih rute mediasi. Masalah lain yang muncul adalah sulitnya mencari saksi dan bukti kuat sehingga kasus yang dilaporkan oleh korban tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Dalam kasus KSBO yang memiliki bukti cukup kuat, polisi juga tidak segera melanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam banyak kasus, korban akan diminta untuk menjalani mediasi dengan pelaku dan disarankan untuk tidak melanjutkan kasus ini (Intania & Satria 2022).

Perlu juga menjadi perhatian bahwa di Indonesia, dengan konsep tata kelola pemerintahan yang berjenjang seperti adanya pemerintah tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maka keberadaan UU TPKS perlu secara masif lebih disosialisasikan. Sering kali di level daerah, pemahaman-pemahaman istilah, seperti KSBE, KBGO, KBGS, dan sebagainya kurang diketahui. Padahal pelaporan kasus-kasus KSS seperti halnya kasus kekerasan seksual dalam bentuk lainnya lebih banyak terjadi di daerah. Istilah-istilah dalam KSS masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak, khususnya aparat penegak hukum (APH) di daerah. Hal ini akan diperparah dengan rendahnya sensitivitas APH terhadap isu-isu gender dan ketimpangan gender. Seperti yang disampaikan oleh SAFEnet (2020) bahwa proses dan penegakan hukum adalah kunci utama yang harus direformasi dalam penanganan KBGS. Terkadang sikap aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban dan bertendensi menyalahkan korban (*victim blaming*). Mereka terkadang gagap dengan teknologi digital dan modus-modus kekerasan siber. Proses hukum yang panjang tidak menjawab karakteristik dari kekerasan *online.* Pengamanan alat bukti, sampai

pada evaluasi pasal-pasal karet justru berpotensi mengkriminalisasi korban alih-alih melindunginya di ranah hukum.

Penutup

Negara dalam hal ini pemerintah telah memiliki komitmen dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual siber di Indonesia, meskipun bentuk kekerasan seksual siber yang tercantum dalam kebijakan yang telah ada belum mengakomodasi keragaman bentuk dari kekerasan seksual siber tersebut. Selain itu, negara juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Terlebih lagi, bila mengacu pada tata kelola pemerintahan yang mengharuskan berbagai kebijakan di tingkat pusat dapat diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Kekerasan seksual siber tidak hanya diselesaikan dengan kehadiran kebijakan namun penting untuk membangun kesadaran publik agar memiliki keberpihakan pada kelompok rentan dan kepeduliannya pada kebahayaan dari perkembangan teknologi yang tidak terkendali yang menghadirkan ketimpangan gender. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan karena begitu luasnya permasalahan kekerasan seksual siber yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan berbagai perspektif yang digunakan sebagai alat analisis. Karenanya, perlu kajian lanjutan yang lebih fokus pada bagaimana aktor-aktor yang mewakili pemerintah/negara dalam proses memformulasi kebijakan yang responsif gender. Khususnya, kekerasan seksual siber dan kolaborasi antar aktor pemerintah dalam mensinergikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual siber di Indonesia.

Daftar Pustaka

Areta A. H. et al. 2021. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6(4), hlm. 752–769. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art8.

Association for Progressive Communications (APC). 2017. "Online Gender-Based Violence: A Submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences", *apc.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf.

Barak, A. 2005. "Sexual Harassment on the Internet", *Social Science Computer Review*, Vol. 23(1), hlm. 77--92. https://doi.org/10.1177/0894439304271540.

Barker, K. & Jurasz, O. 2019. "Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism?", *Journal of International Affairs*, Vol. 72(2), hlm. 95--114. https://www.jstor.org/stable/26760834.

Bimber, B. 2000. "Measuring the Gender Gap on the Internet", *Social Science Quarterly*, Vol. 81(3), hlm. 868–876. http://www.jstor.org/stable/42864010.

Brody, N. & Vangelisti. A. L. 2017. "Cyberbullying: Topics, Strategies, and Sex Differences", *Computers in Human Behavior*, Vol. 75, hlm. 739–748. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.020.

Carstarphen, M. G. & Lambiase, J. 1998. "Domination and Democracy in Cyberspace: Reports from the Majority Media and Ethnic/Gender Margins", *Cyberghetto or Cybertopia? Race, Class, and Gender*. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2143136.

Chowdhury, N. H. et al. 2019. "The Impact of Time Pressure on Cybersecurity Behaviour: a Systematic Literature Review", *Behaviour and Information Technology,* Vol. 38(3), hlm. 1--19. DOI:10.1080/0144929X.2019.1583769.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. 1992. "General Recommendation No. 19: Violence Against Women", *legaltools.org*, diakses pada 10 April 2024, di https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. 2017. "General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19", *ohchr.org*, diakses pada 10 Februari 2024, di https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based.

Cook, J. A. & Fonow. M. M. 1985. "Knowledge and Women's Interests: Issues of Epistemology and Methodology in Feminist Sociological Research", *Sociological Inquiry*, Vol. 56(1), hlm. 2–9. DOI:10.1111/j.1475-682X.1986.tb00073.x.

Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (2nd ed.)*. Sage: Thousand Oaks, CA.

Creswell, J. W. & Poth, C. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc: Thousand Oaks.

Cushing, P. J. 1996. "Gendered Conversational Rituals on the Internet: An Effective Voice is Based on more than Simply What One is Saying", *Anthropologica*, Vol. 38(1), hlm. 47--80. https://doi.org/10.2307/25605819.

De Beauvoir, S. 1989. *The Second Sex*. Vintage Books: New York.

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage: Thousand Oaks, CA.

Dixon, L. J. et al. 2014. "Gendered Space: The Digital Divide between Male and Female Users in Internet Public Access Sites", *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 19 (4), hlm. 991--1009. https://doi.org/10.1111/jcc4.12088.

Finn, J. 2004. "A Survey of Online Harassment at a University Campus", *Journal of Interpersonal Violence,* Vol. 19(4), hlm. 468–483. DOI: 10.1177/0886260503262083.

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. 2000. *The Sexual Victimization of College Women*. National Institute of Justice, Bureau of Justice Statistics: Washington, DC.

Fitania, S. E. & Wirasila, A. A. N. 2019. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 (1), hlm. 1--16. https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/id-48513.

Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., & Drasgow, F. 1995. "Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances", *Basic and Applied Social Psychology*, Vol. 17(4), hlm. 425–445. https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_2.

Giumetti, G. W. et al. 2016. "Linking Cyber Incivility with Job Performance through Job Satisfaction: The Buffering Role of Positive Affect", *Psi Chi Journal of Psychological Research*, Vol. 21, hlm. 230--240. https://doi.org/10.24839/2164-8204.JN21.4.230.

Hasudungan, A. N., Sariyatun, Joebagio, H., & Sartika, L. D. 2020. "Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong dari Resolusi Konflik hingga Pendidikan Perdamaian di Maluku", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 5(1), hlm. 37–50. https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784.

Hazelwood, S. D. & Koon-Magnin, S. 2013. "Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States: A Qualitative Analysis", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 7 (2), hlm. 155–168.

Heaton, J. 2012. What is Secondary Analysis? In J. Goodwin (Ed.), *SAGE Secondary Data Analysis: Vol 1: Using Secondary Sources and Secondary Analysis*. SAGE Publications Ltd: Thousand Oaks, CA.

Heitmeyer, W. & Hagan, J. 2005. *International Handbook of Violence Research*. Kluwer Academic Publisher: Amsterdam.

Intania, H. & Satria, W. 2022. "Analisis Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis *Online* dalam Konstruksi Hukum di Indonesia", *LITERATUS Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya*, Vol. 4(2), hlm. 410–417. http://journal.neolectura.com/index.php/Literatus/article/view/729/624.

Jane, E. 2020. Online Abuse and Harassment. In K. Ross (ed.), *The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication*. John Wiley & Sons: New Jersey. http://dx.doi.org/10.1002/9781119429128.iegmc080.

Jatmiko, M. I. et al. 2020. "Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology during the Pandemic", *The Journal of Society & Media*, Vol. 4(2), hlm. 319--347. DOI:10.26740/jsm.v4n2.p319-347.

Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2018. "CATAHU 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada April 2024, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara*. Komnas Perempuan: Jakarta.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. "CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada Juli 2011, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan.

Kompasiana. 2023. "Non-Consensual Intimate Images Violence (NCII) dan Reviktimisasi Korban", *kompasiana.com*, diakses pada 1 Maret 2024, di https://www.kompasiana.com/cecyliaputri7595/647c2a2708a8b57cb127d052/non-consensual-intimate-images-violence-ncii-dan-rentannya-reviktimisasi-korban.

Konde.co. 2023. "Aktivis: Artis RK adalah Korban Penyebaran Konten, Stop Kriminalisasi", *konde.co*, diakses pada 1 Maret 2024, di https://www.konde.co/2023/05/aktivis-artis-rk-adalah-korban-penyebaran-konten-stop-kriminalisasi/.

Kuklytė, J. 2018. "Cybersexual Harassment as ICTs Development Consequences: A Review", *European Journal of Business Science and Technology*, Vol. 4(2), hlm. 187--195. doi: 10.11118/ejobsat.v4i2.137.

Marganski, A. 2018. "Feminist Theory & Technocrime: Examining Gender Violence in Contemporary Society", *Technocrime and Criminological Theory*, hlm. 11--34. DOI:10.4324/9781315117249-2.

Marganski, A. J. & Melander, L. A. (2021). Technology-Facilitated Violence Against Women and Girls in Public and Private Spheres: Moving from Enemy to Ally. In J. Bailey. Et al. (Eds.), *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse.* Emerald Publishing Limited: Leeds. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211046.

Martins, S. F. et al. 2018. "Secondary Data in Research – Uses and Opportunities", *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, Vol. 17(04), hlm. 1--4. DOI:10.5585/ijsm.v17i4.2723.

Maurer, T. & Janz, S. 2014. *The Russia-Ukraine Conflict: Cyber and Information Warfare in a Regional Context*. International Relatios and Security Network: Zurich, Switzerland.

Paludi, M. & Paludi, C. 2003. *Academic and Workplace Sexual Harassment: A Handbook of Social Science, Legal, Cultural, and Management Perspectives*. Praeger: Westport, CT.

Putera, P. B. et al. 2022. "Using Convergent Parallel Mixed Methods and Datasets for Science, Technology, and Innovation Policy Dynamics Research in Indonesia", *ASEAN Journal on Science and Technology for Development,* Vol. 39 (2), hlm. 61--68. DOI:10.29037/ajstd.845.

Rahmawati, M. & Saputri, N. 2022. "Jauh Panggang dari Api; Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia SAFEnet", *awaskbgo.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://awaskbgo.id/kerangkahukum/.

Rakoczy, S. 2004. "Religion and Violence: The Suffering of Women", *Agenda*, Vol. 18(61), hlm. 29–35. https://www.jstor.org/stable/4066596.

Reed, E., Wong A., & Raj, A. 2020. "Cyber Sexual Harassment: A Summary of Current Measures and Implications for Future Research", *Violence Against Women*, Vol. 26(12–13), hlm. 1727–1740. DOI: 10.1177/1077801219880959.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Riger, S. 1991. "Gender Dilemmas in Sexual Harassment Policies and Procedures", *American Psychologist*, Vol. 46(5), hlm. 497--505. DOI:10.1037/0003-066X.46.5.497.

Royal, C. 2008. "Framing the Internet", *Social Science Computer Review*, Vol. 26(2), hlm. 152--169. https://doi.org/10.1177/0894439307307366.

SAFEnet. 2020. "Bangkitnya Otoritarian Digital: Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019", *safenet.or.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Laporan-Situasi-Hak-Digital-Indonesia-2019.pdf.

SAFEnet. 2022. "Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *awaskbgo.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di http://awaskbgo.id/publikasi.

Sbraga, T. P. & O'Donohue, W. 2000. "Sexual harassment", *Annual Review of Sex Research*, Vol. 11, hlm. 258--285.

Schenk, S. 2008. "Cyber-Sexual Harassment: The Development of the Cyber-Sexual Experiences Questionnaire", *McNair Scholars Journal*, Vol. 12 (1), hlm. 82--91. https://scholarworks.gvsu.edu/mcnair/vol12/iss1/8.

Schroeder, J. E. 2020. "Reinscribing Gender: Social Media, Algorithms, Bias", *Journal of Marketing Management*, Vol. 37(3-4), hlm. 376--378. https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1832378.

Šimonović, D. 2018. "A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from a Human Rights Perspective", *digitallibrary.un.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://digitalliibrary..un..orrg//rreecord/164160.

Soomro, T. R. & Hussain, M. 2019. "Social Media-Related Cybercrimes and Techniques for their Prevention", *Appl. Comput. Syst*, Vol. 24(1), hlm. 9–17. DOI: https://doi.org/10.2478/acss-2019-0002.

Straude-Müller, F., Hansen, B., & Voss, M. 2012. "How Stressful is Online Victimisation? Effects of Victim's Personality and Properties of the Incident", *European Journal of Developmental Psychology*, Vol. 9(2), hlm. 260–274. https://doi.org/10.1080/17405629.2011.643170.

Till, F. J. 1980. *Sexual Harassment: A Report on the Sexual Harassment of Students*. National Advisory Council on Women's Educational Programs: USA.

United Nations. 2017. "General Recommendation No. 35 (2017) on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19 (1992)", *ohchr.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based.

UN Women. 2024. "Placing Gender Equality at the Heart of the Global Digital Impact", *unwomen.org* , diakses pada 10 Maret 2024, di https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-03/placing-gender-equality-at-the-heart-of-the-global-digital-compact-en.pdf.

Veevers, J. E. & Henley, N. M. 1979. *Body Politics: Power, Sex, and Nonverbal Communication*. Cambridge University Press: Cambridge.

Vilić, V. 2013. "Possibilities of Privacy Rights Abuses in Social Networks and Practical Protective Measures", *International Scientific and Practical Conference*, No. 458, hlm. 187--192. https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0101.02009v.

Virginaputri, I. 2021. "Sisi Gelap Kekerasan Gender: Menanti Keadilan bagi Korban", *urbanasia.com*, diakses 10 Maret 2024, di https://www.urbanasia.com/sisi-gelap-kekerasan-gender-menanti-keadilan-bagi-korban-U41713.

Wiener, R. L. & Gutek, B. A. 1999. "Advances in Sexual Harassment Research, Theory, and Policy", *Psychology, Public Policy, and Law*, Vol. 5(3), hlm. 507–518. https://doi.org/10.1037/1076-8971.5.3.507.

World Health Organizations (WHO). 2021. "Devastatingly Pervasive: 1 in 3 Women Globally Experience Violence", *who.int*, diakses pada 20 Maret 2024, di https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence.

Catatan Akhir

1. Sejarah kejahatan di dunia maya di industri teknologi informasi dapat ditelusuri kembali ke akhir tahun 1970-an. Seiring berjalannya waktu, kejahatan ini telah berkembang dari spam sederhana menjadi bentuk yang lebih canggih, seperti virus dan malware. Istilah "kejahatan dunia maya" mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada dunia maya melalui perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Penjahat dunia maya sering kali menargetkan individu yang rentan, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang teknologi dan kerentanannya. Penjahat ini mengeksploitasi pengguna yang mudah tertipu menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data pribadi (Soomro & Hussain 2019).
2. Agathokakological atau agathokakologis adalah kata sifat yang artinya terdiri dari kebaikan dan kejahatan. Kata ini tidak umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, namun memiliki dasar sejarah dan linguistik.
3. Pelecehan gender melibatkan komunikasi verbal dan visual yang tidak diinginkan serta komentar yang menghina individu karena jenis kelamin mereka atau yang menggunakan rangsangan yang diketahui atau dimaksudkan untuk memancing emosi negatif. Ini termasuk perilaku seperti memposting gambar-gambar porno di tempat umum atau di tempat-tempat yang sengaja menghina, menceritakan lelucon yang chauvinistik, dan membuat komentar yang merendahkan gender. Perhatian seksual yang tidak diinginkan mencakup berbagai macam perilaku, mulai dari disentuh tanpa izin, menyebabkan rasa takut atau tertekan, panggilan dan pelecehan seksual, hingga pemerkosaan dan kekerasan

seksual. Perhatian seksual yang tidak diinginkan dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, serta antara orang yang berjenis kelamin sama dan berlawanan jenis. Pemaksaan seksual ada dalam sebuah kontinum, mulai dari pemerkosaan secara fisik hingga bentuk-bentuk tekanan nonfisik yang memaksa anak perempuan dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar kehendak mereka. Dasar dari pemaksaan adalah bahwa perempuan tidak memiliki pilihan dan menghadapi konsekuensi fisik atau sosial yang berat jika dia menolak ajakan seksual (Barak 2005).

4. KBGO atau *Online Gender-Based Violence* (OGBV) menurut *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women* merupakan suatu perbuatan yang akan berakibat terhadap kerugian secara seksual, fisik, dan psikologi, serta membuat perempuan merasakan penderitaan dengan mencakup perilaku berupa pemaksaan, pengancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup pribadi dan publik. Adapun terminologi perempuan telah mencakup terhadap seluruh gender yang mengalami tindak kekerasan seksual sehingga KBGO diartikan sebagai kekerasan berbasis gender di ruang media digital (Areta et al. 2021). Menurut *Association for Progressive Communications* (APC), KBGO adalah KBG yang dilakukan, didukung, atau diperparah sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan email (Association for Progressive Communications 2017).

5. UU TPKS selanjutnya menggunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai istilah hukum untuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh informasi, teknologi, dan elektronik. Sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Meskipun begitu, istilah tersebut menunjuk kepada fenomena yang sama, yaitu segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Di samping itu, Komnas Perempuan juga telah merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai berikut: "(Yaitu) setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung, atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan TIK yang menyasar seorang perempuan atau memengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, mengakibatkan atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi"(Komnas Perempuan 2021).

6. *Non-Consensual Intimate Images Violence* (NCII) merupakan salah satu kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), yang mana pelaku memanfaatkan kontem intim/seksual (foto dan/atau video) yang memperlihatkan korban, dengan tujuan mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauan pelaku. Penggunaan istilah yang lebih berperspektif korban dapat menjadi langkah awal untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kasus serta menumbuhkan empati terhadap korban. Korban dari NCII bisa saja mengalami bentuk kekerasan yang bermacam-macam, tidak hanya terbatas pada penyebaran konten melalui media digital seperti media sosial, korban bisa saja menerima ancaman penyebaran konten intim non-konsensual untuk memaksa atau mengintimidasi korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban. Bentuk lain dari NCII adalah produksi konten intim yang dilakukan secara non-konsensual, seperti merekam korban secara diam-diam, dengan paksaan, ataupun dengan memanfaatkan teknologi artifisial *intelejen* seperti *deepfake* (Kompasiana 2023).

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 29 No. 1, 2024, 31—45
copyright @ 2024 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v29i1.983
DDC: 305

Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital

The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection

Lidwina Inge Nurtjahyo

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

lidwina.inge@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

Despite Indonesia has enacted the Anti-Sexual Violence Law, cases of sexual violence on social media platforms continue to occur and are not easy to resolve. There are problems in implementing regulations in the digital space: criminalization of the victim, regulations that do not accommodate women's experiences, and the issue of evidence. This article discusses digital sexual violence cases, focus on the non-consensual sharing of intimate content and trespassing of private spaces. How regulations are still unable to provide a safe space in the digital sphere. This article is based on literature research including analysis of regulations, court verdict, and some news about sexual violence in digital sphere. The author uses a feminist legal studies perspective in the analysis.

Keywords: digital sexual violence, personal data protection, trespassing boundaries between private and public space

Abstrak

Sungguhpun sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi kasus kekerasan seksual berbasis digital di media sosial terus terjadi dan tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat permasalahan penerapan peraturan di ruang digital, seperti kriminalisasi terhadap korban, peraturan yang tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, dan alat bukti. Artikel ini membahas kasus-kasus kekerasan seksual di ruang digital, dengan fokus pada pembagian konten intim tanpa persetujuan dan penerobosan ruang privat. Bagaimana regulasi masih belum mampu memberikan ruang aman di ranah digital. Data didasarkan pada kajian literatur mencakup analisis peraturan perundangan, putusan hakim yang relevan, dan sejumlah berita mengenai kekerasan seksual di ruang digital. Penulis menggunakan perspektif kajian hukum feminis dalam analisisnya.

Kata kunci: kekerasan seksual digital, perlindungan data pribadi, pelanggaran batas antara ruang privat dan ruang publik

Pendahuluan

Artikel ini membahas bagaimana sejumlah peraturan perundangan merepresentasikan cara pandang negara terhadap posisi korban kekerasan seksual berbasis digital. Fokus artikel ini adalah pada bentuk kekerasan seksual berupa penyebarluasan konten intim nonkonsensual atau sering disebut sebagai *nonconsensual dissemination of intimate images* (NCII), tujuannya beragam. Baik untuk tujuan mempermalukan mantan pasangan, tindakan ini sering disebut juga sebaga*i revenge porn* atau dalam rangka memperoleh kepuasan seksual ataupun keuntungan finansial.

Pada interaksi digital saat ini, orang tak dikenal dengan leluasa dapat ikut serta mengomentari foto atau video yang diunggah orang lain pada media sosial. Kasus yang menimpa salah satu penyanyi Indonesia, menunjukkan orang yang tak dikenal mengomentari unggahan foto anak penyanyi tersebut. Komentar yang diberikan merujuk pada istilah yang biasa digunakan komunitas pedofilia, yaitu 'Loli' (Febrian 2017). Istilah Loli sebetulnya mengacu pada kata 'Lolita', untuk menyebut anak-anak yang memiliki rupa cantik dan dapat menggugah hasrat seksual (Connolly 2009)[1]. Salah seorang kolega Penulis juga terpaksa menutup akunnya sementara dan menghapus semua foto anak-anaknya. Ia menemukan bahwa foto anak-anaknya diunggah ulang dengan diberi komentar 'anak-anak cantik' oleh akun media sosial milik seseorang asing. Ternyata akun media sosial tersebut mengunggah berbagai foto anak dalam beragam pose yang diambil dari berbagai akun media sosial orang lain. Nampaknya, akun yang bersangkutan memiliki sejumlah pengikut yang juga menampilkan foto profil laki-laki dewasa.

Penguntitan dan peretasan terhadap ruang privat pada dunia digital dapat berkembang menjadi kekerasan seksual. Misalnya, ketika orang tak dikenal mengirim pesan melalui jalur pribadi kepada kita, padahal sebelumnya tidak pernah

berinteraksi baik dalam dunia nyata maupun digital. Pesannya mengandung konten seksual yang bersifat nonkonsensual. Pesan tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pihak penerimanya. Pada kasus satu artis di atas, bahkan orang tak dikenal mengirim ajakan untuk berinteraksi dan mengikutinya sampai ke apartemen yang bersangkutan, selain mengirimkan konten yang bermuatan seksual (Hadiansyah 2023). Artinya, tindakan penguntitan dan peretasan ruang privat di dunia digital selain dapat mengandung aspek kekerasan seksual, juga dapat berlanjut pada ruang pertemuan secara fisik. Kasus kekerasan seksual digital yang dibahas dalam tulisan ini fokus pada kasus kekerasan seksual berupa penyebarluasan konten intim nonkonsensual.

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki serangkaian perangkat aturan terkait penyebaran konten intim nonkonsensual. Asumsinya, tindakan-tindakan di ruang digital yang sudah mengandung tindak kekerasan seksual tersebut dapat dicegah, dikendalikan, dan ditangani. Serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, terkait dengan interaksi di ruang digital adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi—meskipun disusun jauh sebelum kasus-kasus kekerasan seksual di dunia digital marak terjadi dan produk peraturan ini sering justru potensial mengkriminalisasi korban kekerasan seksual terutama yang terjadi di ruang digital; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perangkat hukum diharapkan dapat menjadi pagar pelindung, tetapi dalam praktiknya ternyata belum berdampak pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual digital. Tulisan ini secara khusus mendiskusikan beberapa hal berikut ini. Pertama, mengapa keberadaan serangkaian aturan itu belum dapat secara signifikan menghentikan kejahatan seksual berbasis digital? Kedua, bagaimana negara yang mempersepsikan posisi korban kekerasan seksual berbasis digital melalui perangkat aturan hukumnya baik yang mengatur tentang ruang digital ataupun tentang kekerasan seksual, secara khusus pada konteks Indonesia? Ketiga, perspektif apa yang muncul secara kuat di dalam perangkat aturan tersebut? Apa konsekuensinya bagi korban kekerasan seksual, terutama dalam hal ini perempuan korban?

Metode Penelitian

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan bahan-bahan sekunder dan juga pengamatan interaksi di ruang sosial media. Analisis bahan-bahan sekunder mencakup berbagai macam peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual berbasis digital, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis terhadap peraturan perundangan dilakukan dengan memilih pasal yang relevan dengan kata kunci: konten elektronik, muatan yang mengandung ketelanjangan, dan kekerasan seksual di ruang digital.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang kemudian diajukan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Banten dan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN (Andomo 2023) merupakan refleksi dari permasalahan. Kedua putusan ini dipilih karena perkara yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut merupakan perkara kekerasan seksual fisik sekaligus berbasis digital. Akan tetapi, ternyata proses hukum hanya menyoroti aspek penyebaran konten intim nonkonsensual (di ruang digital), bukan kekerasan seksualnya sendiri. Kemudian putusan pengadilan tinggi membatalkan sebagian putusan sebelumnya, yaitu hukuman tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang terkait dengan larangan bagi terpidana untuk mengakses internet selama delapan tahun. Putusan dalam kasus ini jelas menggambarkan bagaimana perspektif aparat penegak hukum yang tidak memiliki literasi dan sensitivitas terhadap kekerasan seksual berbasis digital. Alasan lain dipilihnya putusan ini adalah karena saat itu telah berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetapi proses hukum difokuskan pada aspek penyebaran konten yang masuk kategori dilarang, dalam Undang-Undang ITE.

Data berupa berita tentang kekerasan seksual berbasis digital dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci dalam pencarian digital, yaitu kekerasan seksual, ruang digital, UU TPKS, dan kriminalisasi korban kekerasan seksual. Dipilih tiga berita tentang lima kasus yang relevan, kemudian ditelusuri unggahan konten dan komentar tanggapan terhadap konten tersebut.

Pemilihan tiga kasus tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu penelusuran dan analisis. Adapun ketiga kasus tersebut, pertama, kasus penyebaran konten intim nonkonsensual di Pandeglang Banten, yang kemudian diproses melalui jalur hukum. Kedua, kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, seorang remaja perempuan mengambil keputusan berat untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah konten intim nonkonsensual yang melibatkan dirinya tersebar di lingkungan masyarakat sekitarnya (Bere & Assifa 2023). Kasus ketiga adalah kasus yang dialami oleh dua orang perempuan yang disunting fotonya sehingga menjadi seolah bugil dan disebarluaskan oleh perusahaan pengelola pinjaman secara *online* yang meminjamkan uang kepada dua perempuan ini (Assifa 2021).

Menurut perspektif hukum feminis, produk hukum menyerap, merepresentasikan nilai di dalam masyarakat—termasuk juga nilai patriarki, oleh karenanya tidaklah pernah bersifat objektif. Pengalaman perempuan, dengan memerhatikan konteks kelas sosial dan ekonomi, sering tidak diperhitungkan pada kebanyakan produk hukum yang diproduksi oleh kelompok pemegang otoritas di dalam masyarakat (Fineman 2005). Cara pandang ini berbeda dengan paradigma ilmu hukum positif atau arus umum yang menganggap hukum adalah norma positif, bersifat general, dan mestinya objektif (West 2018). Dengan demikian, hukum perlu dilihat secara kritis melalui cara memeriksa, apakah teks hukum itu sudah mempertimbangkan konstruksi gender yang dapat berdampak pada pembatasan akses atas hak bagi laki-laki dan perempuan. Apakah produk hukum tersebut mengakomodir perlindungan bagi kelompok yang rentan karena konstruksi gender atau malahan dapat mengakibatkan ketidakadilan kepada mereka yang justru perlu dilindungi oleh hukum itu (Irianto & Nurtjahyo 2020). Dengan kata lain, perlu ditelaah apakah suatu aturan hukum dapat berdampak merugikan anak dan perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin.

Pada kajian hukum berperspektif feminis ini, penting untuk berpikir bahwa analisis yang dilakukan bukan dengan tujuan 'membenarkan perempuan'. Pada gurauan yang biasa dilontarkan oleh para sarjana hukum konvensional ketika mendengar kajian hukum berperspektif feminis, mereka akan mengatakan bahwa 'kalau perempuan itu melakukan tindak pidana maka harus dibenarkan'. Tentu tidak. Letak analisisnya bukanlah pada tindak pidananya. Akan tetapi, pada tiga hal (Irianto & Nurtjahyo 2020): Pertama, apakah suatu substansi aturan baik pada tataran teks maupun ketika diterapkan akan memberi dampak yang dapat berbeda terhadap laki-laki dan perempuan; bahkan memberikan beban yang lebih berat bagi perempuan? Kedua, apakah tafsir dari suatu aturan hukum dilekatkan dengan konstruksi tentang gender dan patriarki oleh aparat penegak hukum? Ketiga, bagaimana dampak dari tafsir itu terhadap perempuan?

Pada konteks tulisan ini, substansi hukum yang perlu diperiksa adalah peraturan perundangan yang mengatur tentang pelindungan korban dalam kasus kekerasan seksual digital. Serangkaian peraturan di Indonesia telah mengatur bahwa konten yang menggambarkan keintiman, tubuh, dan seksualitas perempuan adalah masuk ke dalam konten yang dilarang untuk dibuat dan disebarluaskan. Akan tetapi, apakah kemudian persepsi kebertubuhan dalam peraturan-peraturan tersebut justru menyudutkan korban dan bukan menyasar pada pelaku? Itulah yang perlu dibahas. Apakah kemudian peraturan perundangan tersebut juga mengakomodir bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten intim tersebut dapat terjadi bukan berdasarkan konsen melainkan atas dasar paksaan dan dengan demikian termasuk dalam bentuk kekerasan seksual? Pada kasus kekerasan seksual digital, yang terjadi justru adalah objektifikasi tubuh perempuan dan seksualitasnya. Sayangnya, tubuh dan seksualitas perempuan dianggap tabu untuk dibicarakan sehingga menutup akses bagi pengutamaan pengalaman korban (Tambunsaribu & Widiantini 2021, hlm. 83). Dampaknya, dapat dibaca pada narasi tentang kasus-kasus kekerasan seksual digital yang dibahas pada tulisan ini, terdapat serangkaian pengabaian terhadap pengalaman dan bahkan penderitaan korban (perempuan).

Kasus kekerasan seksual digital sebetulnya memiliki karakteristik dan dampak yang serupa dengan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah fisik. Kesamaan tersebut adalah bahwa tindak kekerasan yang dilakukan karena persoalan relasi kekuasaan yang timpang antar gender. Kekerasan seksual baik yang terjadi pada interaksi tatap muka maupun di ruang digital merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan/atau alat reproduksi seseorang. Dampak dari kekerasan tersebut menimbulkan kerugian pada korban baik kerugian berupa luka fisik, trauma psikologis, dan kerugian sosial ekonomi politik. Unsurnya masih sama dengan KS di dunia nyata dengan dampak yang lebih luas dan mendalam. Kekerasan seksual digital ini oleh Attrill et al. (2015) didefinisikan sebagai tindakan mengakses dan mendistribusikan konten yang

merugikan, menyakitkan, atau berbahaya. Konten yang disebarkan itu berbentuk materi daring. Akibat yang kemudian timbul dari perbuatan penyebaran tersebut adalah kerugian emosional, psikologis, dan/atau fisik. Bentuk materi yang didistribusikan tersebut menurut tim peneliti Cyber Safe (2017), bisa bermacam-macam, termasuk namun tidak terbatas pada surat elektronik, pesan teks yang dikirimkan secara daring dan mengandung konten eksplisit secara seksual yang tidak diinginkan; pernyataan yang tidak pantas atau menyinggung dan mengandung konten seksual yang disampaikan di situs jejaring sosial atau ruang obrolan internet; pengiriman ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual melalui surat elektronik maupun pesan teks lainnya yang dikirimkan secara daring.

Pada tulisan ini, digunakan istilah kekerasan seksual digital mengingat bahwa pada beberapa referensi misalnya Catahu Komnas Perempuan digunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), kemudian SAFEnet menggunakan istilah yang sama juga. Penulis menggunakan istilah kekerasan seksual digital mengingat konteks terjadi kejahatan tersebut melibatkan media berupa ruang digital.

Perbedaan antara kasus kekerasan seksual digital dengan kasus kekerasan seksual fisik adalah penggunaan teknologi digital sebagai media untuk melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, perlu dipahami meskipun tindakan kekerasan seksual ini pada konteks waktu tertentu terjadi di ruang digital, tetapi tindakan tersebut dapat berawal dari suatu tindakan fisik ataupun berujung pada dilakukannya suatu tindakan fisik. Contohnya pada suatu kasus *grooming* yang terjadi di ruang digital pada *platform* Facebook, pelaku mengamati kebiasaan korban dan kemudian melakukan pendekatan kepada korban dengan berinteraksi di ruang internet. Pelaku memaksa korban mengirimkan gambar-gambar intim korban dan kemudian dilanjutkan dengan pemerasan. Kemudian pelaku minta bertemu dengan korban dan dalam pertemuan tersebut pelaku melakukan tindak kekerasan seksual secara fisik berupa pemaksaan hubungan seksual/perkosaan. Dengan demikian, aksinya tidak terbatas pada ruang digital karena berlanjut dengan kekerasan seksual secara fisik.

Kekerasan seksual di ruang digital menjadi sangat berkembang pesat saat terjadi pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemi, hampir semua aktivitas kerja dan belajar berlangsung di rumah secara daring. Tidak hanya bekerja dan belajar, tetapi juga interaksi antar manusia yang tadinya berlangsung sebagian besar secara tatap muka, kemudian beralih menjadi interaksi di ruang digital atau melalui layar (Nurtjahyo 2020). Hal tersebut terjadi pada awal 2020 sampai dengan pertengahan 2023.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan yang dipublikasi setiap tahun secara berurutan menampilkan data terkait dengan kasus kekerasan seksual di ruang digital ini. Saat terjadi pandemi Covid-19, Komnas Perempuan mencatat bahwa terjadi lonjakan kasus kekerasan berbasis gender pada ruang digital dari 241 kasus pada 2019, naik menjadi 940 kasus pada 2020. Pada Catahu Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat bahwa sejumlah 1.371 kasus terjadi di ruang digital pada ranah personal (pelaku adalah pacar, mantan pacar, dan mantan suami). Kemudian sejumlah 1.658 kasus kekerasan seksual terjadi di ruang digital pada ranah publik. Angka kasus ini pada 2023 menurut Komnas Perempuan menurun. Lembaga ini mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) pada ruang personal yang dilaporkan kepada lembaga pemberi layanan sebanyak 821 kasus. Kemudian kasus kekerasan seksual di ruang digital yang terjadi di ranah publik—dilakukan oleh orang asing ataupun kenalan yang berinteraksi di media sosial—sebanyak 383 kasus. Sayangnya, penurunan angka ini tidak menggambarkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia berkurang. Akan tetapi, terjadi kembali pergeseran wilayah atau format tindakan dari kekerasan seksual pada ruang digital kembali ke kekerasan seksual yang terjadi pada interaksi secara tatap muka.

Bagaimana Peraturan Perundangan Indonesia mengaturnya? Bagian selanjutnya dari tulisan ini membahas beberapa peraturan yang relevan dengan perlindungan data pribadi di ruang digital maupun mengatur interaksi di ruang digital. Adapun peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal yang relevan dengan pembahasan mengenai kekerasan seksual di ruang digital salah satunya adalah Pasal 1. Di dalam Pasal ini, diatur mengenai lingkup dan bentuk dari data elektronik. Dari sekian banyak bentuk tersebut, beberapa di antaranya yang sering ditemukan mengandung konten intim yang disebarluaskan secara nonkonsensual adalah tulisan, suara, gambar,

foto, dan surat elektronik, namun tidak disebutkan mengenai rekaman video. Rekaman suara, tangkapan layar percakapan tertulis atau surat elektronik yang mengandung konten intim memang kerap ditemukan disebarluaskan. Akan tetapi, pada konteks Indonesia yang lebih sering kemudian ditemukan penyebarluasan pada berbagai *platform* sosial media adalah foto dan rekaman video. Pada Pasal 1 dari UU ITE ini, terkandung persepsi negara bahwa informasi elektronik terdiri dari tulisan, suara, gambar, termasuk foto, dan belum mengakomodir fakta bahwa pada beberapa kasus kekerasan seksual berbasis digital berbentuk format video sebagaimana dapat dicermati dari Pasal 1.

Secara khusus tindakan kekerasan seksual pada ruang digital memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang ITE karena memang Undang-Undang ini dikhususkan untuk mengatur interaksi berbagi informasi. Akan tetapi, dalam konteks berbagi informasi tersebut di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai beberapa kriteria perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang tersebut diatur di dalam Pasal 27 UU ITE. Kriteria dari perbuatan yang dilarang tersebut yang relevan dengan isu kekerasan seksual terdapat pada Ayat (1) dari Pasal 27 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penjelasan tentang muatan yang melanggar kesusilaan sebenarnya tidak ditemukan pada bagian Penjelasan UU ITE. Akan tetapi, apabila merujuk pada KUHP – secara khusus pada KUHP Baru yang ditetapkan dalam format Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pada bagian Penjelasan, di Penjelasan Pasal 406 huruf a, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan "adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan". Dengan demikian, pada kasus penyebarluasan konten intim nonkonsensual – di dalam konten itu sendiri mengandung aspek yang 'mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual dan seterusnya…' maka dapat terjadi bahwa korban kekerasan seksual di ruang digital yang tubuh dan seksualitasnya dibagikan sebagai sebuah konten dengan mempergunakan format apa pun, dapat menjadi pihak yang 'melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual dan seterusnya.' Apalagi konten tersebut tersebar di ruang publik. Apabila pihak penegak hukum tidak berhati-hati dalam memeriksa kasus kekerasan seksual di ruang digital, terutama kasus yang berbentuk penyebarluasan konten intim nonkonsensual, dapat terjadi bahwa korban—khususnya perempuan korban—kemudian akan berpotensi mengalami kriminalisasi karena dianggap memenuhi aspek: melanggar kesusilaan dan membuat dapat diaksesnya konten tersebut. Terutama korban pada kasus pembuatan konten tersebut terjadi karena korban mengalami paksaan atau dimanipulasi untuk akhirnya membiarkan dirinya diambil gambar (berupa foto ataupun video).

Pada kasus yang terjadi di Pandeglang Banten, korban justru mengalami perekaman atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Pada situasi tersebut, korban dalam keadaan tidak berdaya karena selain mengalami kekerasan fisik dari pelaku, juga menderita kekerasan secara psikologis. Kasus tersebut telah memperoleh putusan pengadilan negeri maupun putusan pengadilan tinggi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang kemudian putusannya naik kasasi ke Pengadilan Tinggi Banten dan menghasilkan Putusan PT Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Pada Putusan Pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim mampu untuk memahami bahwa korban mengalami kekerasan. Dengan demikian, baik proses pembuatan konten maupun penyebarluasannya itu pun bukan atas kehendak atau konsensus korban. Fokus dari Majelis Hakim adalah pada pelaku sebagai pembuat dan penyebarluas konten tersebut sehingga perlu diajukan pertanyaan secara kritis. Apabila kekerasan dan paksaan yang dialami seorang korban tidak terjadi dalam bentuk fisik misalnya tidak didahului pemukulan, penyeretan, penjambakan, apakah aparat penegak hukum dapat memahami bahwa telah terjadi kekerasan, paksaan, dan manipulasi terhadap korban terutama dalam konteks pembuatan konten digital yang mengandung kekerasan seksual?

Pasal berikutnya dari UU ITE yang juga menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan isu mengenai kekerasan seksual di ruang digital adalah Pasal 44. Pada Pasal ini, diatur bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan. Alat bukti tersebut adalah kesaksian dari para saksi, kesaksian ahli, dokumen-dokumen yang relevan, hasil pemeriksaan – sebagaimana diatur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian juga dalam Pasal 44 terdapat alat bukti lain yang dipersyaratkan berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pada konteks bukti berupa Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 dari Undang-Undang ITE, maka dapat saja bukti tersebut berbentuk foto, video, atau rekaman suara. Semua bukti digital tersebut justru menampilkan kembali konten intim dari korban yang disebarluaskan secara nonkonsensual. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Dalam hal ini, bahkan oleh orang yang tidak dia kenal?

Produk hukum lainnya yang juga mengatur tentang konten intim di dalam ruang digital adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai cakupan hal apa saja yang dimaknai sebagai pornografi, namun Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Problematikanya sudah terlihat pada Pasal 1 dari UU Pornografi, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kutipan tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang konten yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Pornografi tersebut. Konten bisa jadi diambil dalam kondisi para pihak yang terlibat di dalamnya berada pada kesadaran penuh dan memberikan persetujuan atas dasar kesadaran penuh itu. Namun, bisa jadi diambil karena terdapat relasi kuasa yang timpang. Sebagai gambaran, misalnya relasi pacaran yang toksik sebagaimana dialami oleh R dalam Kasus Pandeglang, atau karena persoalan utang piutang seperti misalnya dalam kasus yang terjadi pada dua orang perempuan yang fotonya dimanipulasi dan disebarluaskan sebagai foto telanjang oleh oknum dari lembaga pengelola pinjaman *online* (Assifa 2021).

Pasal lainnya di dalam UU Pornografi yang juga relevan dengan persoalan penyebarluasan konten intim di ruang digital adalah Pasal 4 ayat (1). Pada Pasal tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan produk pornografi. Adapun produk pornografi yang dimaksud itu adalah yang secara eksplisit memuat aktivitas persenggamaan. Semua bentuk persenggamaan dilarang, termasuk juga yang menyimpang, yaitu kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi yang melibatkan anak.

Pasal 4 dan Ayat (1) UU Pornografi, prinsipnya mengatur bahwa orang dilarang membuat, menyebarluaskan, memperbanyak, atau bahkan menawarkan segala hasil produksi yang mengandung aspek pornografi. Aspek pornografi tersebut telah disebutkan dalam Pasal 1 dan diperjelas lagi bentuk-bentuknya pada Pasal ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak memperhitungkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat saja terjadi karena salah satu pihak yang terlibat di dalam pembuatannya berada di bawah ancaman, paksaan, bahkan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis.

Kemudian pada bagian berikutnya dari Undang-Undang Pornografi ini, yaitu di Pasal 8, terdapat larangan bagi orang untuk terlibat dalam pembuatan muatan pornografi. Pada Pasal tersebut diatur bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi." Pasal ini sekilas netral, objektif, dan 'aman' ketika diterapkan. Akan tetapi, justru korban kekerasan seperti dipaksa untuk direkam, diambil gambarnya/difoto, dan kemudian hasil rekaman atau foto tersebut dijadikan alat untuk memaksa yang bersangkutan melaksanakan kehendak pelaku. Akibatnya, korban kekerasan berkat Pasal 8 ini justru dapat terancam dipidanakan. Sungguh sangat ironis dan bertentangan dengan rasa keadilan. Terutama apabila aspek persetujuan dari korban ini tidak digali mendalam oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa korban berada di dalam paksaan dan bukan karena kehendak bebasnya melakukan hal tersebut.

Pada kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital, secara khusus penyebarluasan konten intim nonkonsensual, selain mengandung aspek kekerasan terhadap tubuh dan seksualitas seseorang, pada tindakan penyebarluasan konten intim nonkonsensual ini sebetulnya terkandung persoalan pelindungan data pribadi. Sayangnya, di dalam Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), pelindungan data pribadi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual di ruang digital tidak atau belum tercakup. Sebetulnya pada Pasal 4 dari UU PDP, diatur bahwa data pribadi terdiri dari data yang bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum. Pada konteks korban kekerasan seksual di ruang digital yang data pribadinya tersebar luas tanpa konsensus dari pihak korban tersebut, maka semestinya pelindungan data pribadi dapat masuk pada pengaturan di ayat (1) dari Pasal 4 UU PDP, pada bagian data pribadi yang bersifat spesifik.

Dapat disimpulkan bahwa sejumlah aturan ini ternyata belum secara signifikan dapat menjadi tembok pelindung. Terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan saat berselancar dan berinteraksi di ruang digital, khususnya perempuan, remaja, dan anak. Padahal ruang digital diharapkan dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berekspresi dengan bebas. Sebagai contoh, pada konteks India, ruang digital dijadikan ruang untuk bergerak bagi perempuan sebagai respons terhadap perlunya perubahan budaya, khususnya pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat modern. Ruang digital menjadi wilayah tempat perempuan mempersepsikan pahlawannya dan suara alternatifnya melawan kekerasan berbasis gender. Khususnya ketika perempuan berupaya melawan kekerasan berbasis budaya patriarki, termasuk kekerasan seksual perkosaan yang kerap terjadi di India (Chakraborty 2022).

Makna penting ruang digital bagi perempuan, selain menyediakan tempat untuk bergerak secara lebih leluasa dalam melawan kekerasan berbasis gender, juga menjadi ruang komunikasi yang membantu perempuan memenuhi kebutuhan afeksinya. Pada penelitian Miller (2018) berkaitan dengan perempuan pekerja migran berkebangsaan Filipina, ia menemukan bahwa para perempuan pekerja migran dari Filipina sangat terbantu dengan internet. Mereka dapat berkomunikasi dengan keluarganya, terutama anak-anak dengan lebih cepat. Komunikasi yang dilakukan melalui surat elektronik maupun media sosial bagi para perempuan tersebut dengan anak-anaknya mengurangi jarak dan waktu yang harus dilalui oleh surat. Dengan demikian menurut Miller, dunia digital mengurangi keterpisahan antara ibu dengan anak-anaknya (Miller 2018). Semestinya internet dapat digunakan dengan sehat. Akan tetapi, ternyata tidak hanya hal baik yang terjadi di dalam dunia digital.

Sebetulnya, Indonesia secara khusus memiliki satu produk hukum lagi terkait dengan upaya penanganan kekerasan seksual. Dalam rangka memberikan pelindungan dari kekerasan seksual yang mengintai di ruang digital, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara khusus mengatur bahwa salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pula kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Adapun unsur-unsur dari KSBE ini diatur di dalam Pasal 14. Pada Pasal 14 ayat (1) diatur bahwa perbuatan yang termasuk dalam KSBE dan dengan demikian pelakunya dapat dipidana adalah perekaman atas gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten intim atau konten seksual yang diambil secara nonkonsensual, perbuatan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menerimanya dan bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual pengirimnya, dan/atau melakukan penguntitan dan/atau pelacakan terhadap orang yang dijadikan objek informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan seksual. Semua perbuatan ini apabila dilakukan, ancamannya adalah pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 14 ayat (2) diatur pula apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memeras atau mengancam, menyesatkan dan/atau memanipulasi seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukannya suatu perbuatan, atau justru untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Adapun pidananya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Konteks Ayat ini adalah merujuk pada perbuatan perekaman atau pengambilan gambar konten intim tersebut secara nonkonsensual dilakukan oleh seseorang dalam rangka memeras atau mengancam korbannya untuk mengikuti kemauan pelaku. Aturan dalam Ayat ini berdasarkan fakta kasus di lapangan menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada ruang digital dapat kemudian berlanjut menjadi kekerasan seksual yang bersifat fisik. Sebaliknya, kekerasan seksual yang bersifat fisik, juga dapat kemudian diikuti dengan kasus kekerasan seksual yang berupa penyebarluasan konten intim nonkonsensual itu pada ruang digital. Kedua alur kekerasan tersebut terjadi baik pada kasus Pandeglang bahwa korban dipaksa untuk mengikuti kemauan pelaku dengan ancaman bahwa rekaman hubungan intim korban

dengan pelaku akan disebarluaskan. Akan tetapi, di sisi lain pula, rekaman tersebut juga merupakan rekaman terhadap kekerasan seksual fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbeda halnya dengan kasus penyebarluasan konten intim yang dilakukan terhadap kedua perempuan oleh perusahaan pinjaman *online*. Pada kasus tersebut, pelaku memanipulasi foto kedua korban dengan teknologi digital dan kemudian mengancam menyebarluaskannya untuk memaksa korban memenuhi kehendak pelaku.

Pasal 14 UU TPKS nampaknya memberi angin segar bagi pelindungan korban kekerasan seksual di ruang digital, khususnya korban kasus penyebarluasan konten intim nonkonsensual. Akan tetapi, terdapat catatan khusus berkaitan dengan Pasal 14 UU ini. Catatan khusus tersebut terletak pada Ayat (3), diatur bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dari UU TPKS masuk di dalam kategori delik aduan. Kecuali apabila korban kasus kekerasan seksual tersebut adalah anak atau penyandang disabilitas. Artinya, dalam penanganan kasus penyebarluasan konten intim nonkonsensual, kasus hanya dapat ditangani atau pihak pemegang otoritas dalam hal ini aparat penegak hukum baru dapat turun tangan apabila korban menyampaikan aduan atau laporan.

Mempersoalkan Kekerasan Seksual Berbasis Siber

Seperti kita pahami bersama, pada kasus kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik, korban sering kali merasa takut dan malu untuk melapor. Rasa takut dan malu ini juga dialami oleh para korban baik dalam kasus Pandeglang, NTT, maupun dua perempuan dari Semarang dan Sukabumi. Dengan demikian, terkait Ayat (3) dari Pasal 14 UU TPKS ini sangat dibutuhkan kehadiran pendamping yang dapat menguatkan korban sehingga korban dapat memperoleh kesempatan memulihkan diri sekaligus menyiapkan strategi untuk melapor. Strategi di sini termasuk juga bagaimana mengumpulkan bukti – yang dalam konteks kekerasan seksual di ruang digital tidak selalu mudah karena pelaku dapat dengan cepat melenyapkannya.

Pasal 14 ayat (3) juga kurang mengakomodir fakta di lapangan bahwa tidak semua daerah di Indonesia dapat mengakses edukasi atau sosialisasi terkait dengan prosedur pelaporan, strategi pengumpulan data. Betul bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia dapat menggunakan internet. Akan tetapi, belum tentu memahami persoalan pelaporan apabila mengalami kekerasan seksual, perundungan, atau bahkan pembocoran data pribadi pada ruang digital.

Pada analisis hukum berperspektif feminis, aturan hukum diperiksa dengan hati-hati untuk melihat apakah aturan tersebut mengakomodir pengalaman dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara setara dan adil (Irianto & Nurtjahyo 2020). Setelah memeriksa aturan tersebut, peneliti kemudian perlu untuk memeriksa pula bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, apa konsekuensi dari penerapan aturan tersebut bagi laki-laki dan perempuan. Apakah terdapat situasi atau dampak yang diderita lebih berat oleh jenis kelamin dan atau gender tertentu sebagai akibat dari penerapan aturan hukum tersebut? Berdasarkan kebutuhan untuk memeriksa konsekuensi dari penerapan aturan tersebut pada masyarakat, maka pada bagian berikut ini dibahas pula tiga kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Pertama, kasus yang terjadi di Pandeglang melibatkan pelaku bernama A dan korban bernama R (bukan nama sebenarnya). Kasus Pandeglang ini sudah melalui proses hukum yang melibatkan Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi Banten (karena pelaku kemudian mengajukan banding). Adapun putusan pengadilan untuk kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan PT Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Kedua, kasus yang terjadi di NTT menimpa Nona (bukan nama sebenarnya), yang merupakan seorang remaja dan pelajar. Nona, akibat rasa malu karena kasus yang menimpanya, kemudian mengambil keputusan bunuh diri. Ketiga, kasus yang terjadi di Semarang dan Sukabumi, berkaitan dengan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* kepada dua perempuan yang dianggap gagal melakukan kewajiban pembayaran pinjaman mereka. Intimidasi tersebut melibatkan ancaman penyebarluasan foto kedua perempuan yang telah dimanipulasi menjadi foto bugil.

Kasus Pandeglang

Kasus ini merupakan kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi Banten. Narasi posisi kasus diambil dari bagian posisi kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang kemudian diajukan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Banten dan menghasilkan Putusan PT Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Kemudian untuk kronologi pelaporan kasus ini dan reaksi dari pelaku, dilengkapi melalui

analisis berita dari koran daring. Selanjutnya, kasus ini disebut sebagai Kasus Pandeglang.

Pada Kasus Pandeglang ini, pelaku yang bernama A, merekam proses perkosaan yang ia lakukan terhadap korban bernama R (bukan nama sebenarnya). Video tersebut kemudian dikirim A kepada kakak dari R. A bahkan mengirim video tersebut melalui media sosial dengan fitur *view once*. A berharap video tersebut dapat hilang setelah disaksikan. Pihak penerima, yaitu kakak laki-laki R kemudian melaporkan kasus ini pada pihak berwajib.

Belakangan terungkap bahwa A berkali-kali melakukan tindak kekerasan baik secara seksual maupun fisik kepada R. A sempat mengancam R untuk menyebarluaskan video mereka ketika berhubungan badan dengan alasan supaya R tetap bersama dia (dan R kerap mengalami pemukulan). R merasa tidak tahan dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan A. Kemudian A mengirimkan video tersebut kepada kakak R. Kekerasan yang dilakukan oleh A ini, terlepas dari aspek perkosaan dan penyebarluasan konten intim nonkonsensual sudah diatur di dalam UU TPKS merupakan bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di dalam hubungan berpacaran.

Pada konteks hubungan berpacaran, di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran ini. Padahal kerap terjadi bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual bahkan pada salah satu pihak saat menjalin relasi pacaran (Dhewy 2017). Meskipun tindak pidana kekerasan seksual sendiri diatur dalam UU TPKS, tetapi pada UU tersebut tidak diatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks hubungan berpacaran. Berbeda halnya dengan konteks keluarga. Secara khusus di dalam Pasal 1 dari UU TPKS, yaitu pada Butir 7 disebutkan tentang batasan dari keluarga, yaitu (semua) orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas – misalnya orang tua atau kakek/nenek, atau ke bawah—misalnya anak dan/atau cucu. Mereka yang masih termasuk di dalam lingkup keluarga menurut Pasal 1 Butir 7 UU TPKS juga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga—dalam hal ini paman/bibi dengan kemenakan atau cucu kemenakan. Kemudian juga orang yang memiliki relasi karena hubungan perkawinan, dalam hal ini istri atau suami, atau anak tiri dengan orang tua tirinya, termasuk dalam lingkup keluarga. Pasal ini juga menganut tafsir bahwa orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban masih termasuk dalam lingkup keluarga. Misalnya, anak yang diadopsi atau mereka yang bekerja dan tinggal di rumah tersebut (menjadi tanggungan dari pihak saksi dan/atau korban). Dengan demikian, menjadi amat penting untuk mengakomodir pengaturan mengenai bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada korban yang memiliki relasi pacaran dengan pelaku kekerasan tersebut. Akan tetapi, ini pasti dapat menimbulkan serangkaian tantangan mengingat bahwa di dalam sebagian masyarakat berlaku standar ganda bahwa hubungan berpacaran dianggap sebagai tidak sehat, melanggar norma moral dan agama—karena terdapat anggapan bahwa dalam hubungan berpacaran tersebut dapat terjadi hubungan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Faktanya, dengan melakukan hubungan berpacaran secara sembunyi-sembunyi karena khawatir dihujat masyarakat, orang menjadi sangat rentan untuk mengalami kekerasan seksual karena sangat rentan untuk menerima ancaman dari pelaku apabila tidak menuruti kehendak pelaku. Relasi kuasa antara korban dan pelaku dalam hubungan berpacaran menjadi sangat timpang, mengingat pelaku dapat dengan mudah mengancam korban untuk menyebarluaskan status hubungan mereka. Hal tersebut juga akan mempermudah pelaku untuk menggunakan foto atau rekaman yang mengandung konten intim korban untuk mengancam dan memanipulasi korban.

Pada konteks kasus Pandeglang, ketika kasus ini ditangani, pihak R bahkan didorong untuk berdamai dengan pelaku. Keluarga R sempat ditemui oleh salah satu jaksa. Kemudian dalam pertemuan tersebut jaksa tersebut menyatakan bahwa R sebaiknya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jaksa tersebut menjelaskan kepada kakak R bahwa adiknya selaku korban telah diwakili oleh jaksa—dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan pembicaraan tersebut, yang dinarasikan oleh kakak R dalam artikel yang ditulis Andomo, pihak jaksa menjelaskan bahwa mereka merangkap sebagai penasihat hukum korban (Andomo 2023). Hal ini tentu tidak tepat karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) seyogyanya mewakili negara dan dengan demikian menjalankan tugasnya untuk memberikan dakwaan bagi pelaku sekaligus memenuhi hak korban dalam rangka mengakses keadilan. Kewenangan JPU ini sesungguhnya diatur dalam Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal tersebut diatur bahwa seorang penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan sekiranya ditemukan terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal

110 ayat (3) dan ayat (4); memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini; melaksanakan penetapan hakim. Secara ringkas, tidak ada bagian kewenangan JPU untuk 'mewakili korban' melainkan dalam hal ini JPU adalah representasi negara yang memberikan dakwaan bagi pelaku karena telah melanggar peraturan perundangan.

Dengan demikian, dalam rangka membantu korban memahami hak-haknya pada proses hukum, diperlukan seorang penasihat hukum atau pendamping korban. Penasihat hukum dan/atau pendamping korban dibutuhkan perannya dalam rangka memberikan pertimbangan, menguatkan dan memulihkan korban sehingga mampu hadir diproses persidangan dan dapat memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Peran pendamping ini sesuai dengan Pasal 1 Butir 14 dari UU TPKS bahwa pendamping, merupakan pihak yang dipercaya oleh korban dan memiliki kompetensi mendampingi korban untuk mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Adapun pihak yang dapat menjadi pendamping korban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) adalah petugas LPSK; petugas UPTD PPA; tenaga kesehatan; psikolog; pekerja sosial; tenaga kesejahteraan sosial; psikiater; pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Tidak disebutkan kehadiran JPU sebagai pendamping atau penasihat korban.

Catatan menarik lainnya adalah penggunaan UU ITE untuk kasus ini, alih-alih UU TPKS. Dasar dari penggunaan UU ITE ini ketika merujuk pada hasil wawancara terhadap kakak korban maupun aparat penegak hukum, adalah adanya anggapan aparat penegak hukum bahwa yang menjadi masalah hukum adalah penyebarluasan konten intimnya. Tidak dipersoalkan bahwa konten dalam video tersebut adalah rekaman tindak perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jangan-jangan pada titik ini, anggapan aparat penegak hukum bahwa kasus penyebarluasan video tersebut lebih tepat dibawa ke UU ITE disebabkan karena korban dan pelaku dianggap saling mengenal dan terdapat hubungan berpacaran. Dengan demikian, diasumsikan oleh aparat penegak hukum bahwa terjadinya kekerasan seksual adalah hal yang sangat samar.

Kemudian dari pernyataan aparat penegak hukum itu pun terlihat adanya anggapan bahwa penyebarluasan konten intim nonkonsensual masuk ke ranah UU ITE. Bukan masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Sebetulnya UU TPKS penting dirujuk, terutama secara khusus pada pasal yang sesuai di dalam UU TPKS berkaitan dengan kekerasan seksual dalam ruang digital. Anggapan aparat penegak hukum bahwa kehadiran kekerasan seksual di dalam kasus R adalah samar, merupakan bagian dari penolakan secara sadar yang dikembangkan di dalam masyarakat yang patriarkis bahwa kekerasan seksual itu merupakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bagaimana tubuh dan seksualitas sebagai ruang privat yang tidak diakui hingga tingkat praktik hukum negara—termasuk juga kekerasan yang melingkupinya (Tambunsaribu & Widiantini 2021).

Pelaku dalam kasus ini juga tidak menyatakan penyesalannya. Ia mengatakan hanya sedang sial jadi tertangkap (Andomo 2023). Proses kasus ini tidak berdasarkan UU TPKS melainkan hanya menggunakan UU ITE. Akan tetapi, Majelis Hakim dapat mengungkapkan fakta bahwa R sesungguhnya merupakan korban dan tidak mengetahui bahwa ketika ia dipaksa melakukan hubungan badan, dirinya direkam oleh A. Pada kasus ini, A mendapat hukuman enam tahun penjara dan di Tingkat Pengadilan Negeri bahkan Majelis Hakim menjatuhkan pula hukuman tambahan delapan tahun tidak diperkenankan menggunakan internet. Akan tetapi hukuman tambahan tersebut dianulir oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten.

Pada konteks hukuman tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut merupakan suatu terobosan hukum. Akan tetapi, memang kemudian persoalan teknisnya adalah pihak mana yang dapat melakukan upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hukuman tersebut.

Catatan lainnya terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten adalah bahwa pada kasus ini yang merupakan kasus kekerasan seksual, ternyata nama korban tidak sepenuhnya disamarkan. Pada salah satu butir di bagian Putusan, tercantum nama lengkap

Korban. Semestinya nama korban disamarkan[2], terutama apabila putusan diterbitkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan diterbitkannya putusan pada Direktori tersebut, maka publik atau masyarakat dapat mengakses dengan bebas Putusan tersebut.

Kasus Nona di NTT

Pada kasus Nona (bukan nama sebenarnya), seorang remaja perempuan berusia di bawah 17 tahun mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa malu. Nona berpacaran dengan Jong (bukan nama sebenarnya). Mereka kemudian sempat bertukar foto tanpa busana. Akan tetapi, rupanya salah satu teman mereka mengetahui. Teman ini kemudian tanpa persetujuan Jong maupun Nona, menyebarluaskan foto tersebut ke internet melalui akun Facebook-nya. Akibatnya, teman-teman Nona di sekolah pun mengetahui. Hal tersebut membuat Nona merasa malu setelah konten intim nonkonsensual yang melibatkan dirinya tersebar di lingkungan masyarakat sekitarnya (Bere & Assifa 2023). Rasa malu tersebut mendorong Nona mengakhiri hidupnya. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian setempat.

Pada kasus Nona, pengiriman konten intim dilakukan di antara Nona dan Jong secara konsensual. Akan tetapi, bahwa kemudian foto Nona tersebar luas di media sosial akibat perbuatan teman Nona atau Jong tersebut, bukan merupakan konsensus. Tindakan penyebarluasan ke media sosial oleh pihak ketiga tersebut masuk dalam aturan pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS bahwa perbuatan yang termasuk dalam KSBE dan dengan demikian pelakunya dapat dipidana adalah perekaman atas gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten intim atau konten seksual yang diambil secara nonkonsensual dan atau perbuatan mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menerimanya dan bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual pengirimnya. Akan tetapi, perlu dikonfirmasi kembali apakah pihak ketiga yang menyebarluaskan foto tersebut termasuk ke dalam kategori anak, dengan demikian ia harus diperlakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Perlu digali lebih dalam pula, apakah pihak ketiga selaku penyebar konten tersebut memperolehnya di luar pengetahuan dan atau persetujuan Nona maupun Jong.

Pada kasus ini, sebagai catatan, edukasi tentang batasan interaksi dan berbagi berita di ruang digital menjadi sangat penting. Khususnya bagi anak dan remaja. Bagaimana kemudian berbagi data pribadi, termasuk dalam hal ini foto seseorang yang dia bagikan pada ranah pribadi kemudian tanpa konsensus yang bersangkutan tersebar luas. Pemahaman tentang konsekuensi berbagai informasi pada ruang digital menjadi penting bagi anak dan remaja – juga perempuan. Khususnya bagi pelaku yang menyebarkan foto Nona di ruang publik dan menyebabkan konsekuensi yang amat fatal.

Korban Manipulasi Foto oleh Perusahaan Pinjaman Online

Kasus ketiga yang dibahas di dalam tulisan ini adalah kasus yang dialami oleh dua orang perempuan yang disunting dan dimanipulasi sedemikian rupa foto mereka. Akibatnya, foto kedua perempuan ini menjadi seolah bugil dan disebarluaskan oleh perusahaan pengelola pinjaman *online* yang meminjamkan uang kepada dua perempuan ini (Assifa 2021). Adapun kedua korban tersebut berasal dari daerah yang berbeda. Satu korban berasal dari Semarang dan korban lainnya berasal dari Sukabumi.

Modus dari perusahaan pemberi pinjaman *online* tersebut pada kasus yang terjadi di Semarang adalah dengan menawarkan pinjaman secara mudah tanpa agunan. Korban saat itu memerlukan uang dalam rangka membeli kebutuhan susu anaknya. Sementara pada kasus di Sukabumi, pihak korban bahkan tidak merasa mengajukan pinjaman tetapi menemukan ada sejumlah uang masuk di dalam rekeningnya. Setelah beberapa hari, pihak pemberi pinjaman kemudian mulai melakukan serangkaian penagihan. Awalnya para korban berupaya untuk tetap membayar tagihan tersebut. Akan tetapi, utang tersebut membengkak karena bunga yang sangat besar dan berkembang cepat. Akibatnya, para korban tidak lagi mampu untuk melunasi utang tersebut.

Pada saat para korban dianggap gagal melunasi utang tersebut, pihak pemberi pinjaman *online* kemudian mulai menghubungi para korban dengan kata-kata kasar dan mengintimidasi. Puncaknya adalah ketika pemberi pinjaman *online* kemudian menyunting dan memanipulasi foto para korban sehingga nampak bahwa para korban ini tidak berbusana. Kemudian para korban diancam akan disebarluaskan foto tersebut. Para korban ini terlanjur takut dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Akan tetapi, karena terus mendapatkan intimidasi, para korban ini menjadi takut bertemu dengan orang lain, terganggu dalam melaksanakan pekerjaannya karena rasa khawatir foto hasil manipulasi

itu akan tersebar dan diketahui masyarakat luas. Para korban pun mengalami kerugian finansial karena terus-menerus dipaksa memenuhi tuntutan pelaku untuk mengirimkan sejumlah uang, para korban ini merasa tidak tahan. Mereka kemudian menyampaikan kepada suami dan keluarga besarnya. Akhirnya, para korban dengan didampingi keluarga masing-masing, melapor kepada pihak kepolisian.

Pada kasus yang dialami oleh kedua korban dari Semarang dan Sukabumi ini, persoalan perlindungan data pribadi menjadi isu penting, selain persoalan kekerasan seksual yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pinjaman *online* tersebut. Pada konteks kasus ini, sangat relevan ketika proses hukum dilakukan pada perusahaan pemberi pinjaman *online* tersebut, Pasal 35 dan Pasal 36 UU ITE dimasukkan dalam dakwaan maupun bagian pertimbangan putusan hakim. Pasal 35 secara khusus mengatur bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dengan melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan (penyuntingan), dan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana disebutkan pada Pasal tersebut, kemudian tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dapat dipidana. Perusahaan pinjaman *online* tersebut bukan hanya melakukan intimidasi, mempermalukan, bahkan juga masuk ke ruang aman korban tanpa konsensus korban. Bahkan perusahaan tersebut memanipulasi dan mengubah foto korban sehingga kemudian menimbulkan kerugian serius bagi diri korban, berupa trauma dan kerugian sosial finansial sebagaimana dikemukakan para korban.

Kasus intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ini ternyata merupakan kasus yang kerap terjadi kepada perempuan. Salah satu hal yang mendorong perempuan untuk melakukan peminjaman uang tersebut secara *online* adalah karena persyaratan yang mudah, pencairan cepat, dan dana yang dipinjam pun tidak besar. Pada salah satu penelitian terkait dengan keterlibatan perempuan dalam jaringan pinjaman *online* yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) memperlihatkan bahwa terlibatnya perempuan, secara khusus ibu rumah tangga, dengan pinjaman *online* adalah karena mereka berada dalam kondisi yang memerlukan dana segera. Para perempuan yang menjadi narasumber adalah mereka yang tidak memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Lestari et al. 2021). Berbeda halnya dengan para perempuan korban perusahaan pinjaman *online* di Semarang dan Sukabumi, yang memiliki pekerjaan sebagai guru. Ancaman dari perusahaan yang memberikan pinjaman *online* tersebut menjadi sangat 'mengena', 'tepat sasaran' dalam hal membuat para korban ini khawatir, malu, dan takut karena mereka adalah orang yang memiliki pekerjaan sebagai guru, dikenal dan dihormati banyak orang. Dengan demikian, para korban ini merasa bahwa harus menjaga citranya di depan murid, orang tua murid, maupun kolega sesama guru. Ancaman penyebarluasan foto bugil mereka meskipun itu merupakan foto hasil manipulasi teknologi, menjadi hal yang sangat mengerikan bagi kedua guru ini.

Pada ketiga kasus dalam bagian pembahasan, baik yang berasal dari Putusan Pengadilan maupun berita koran daring, ternyata meskipun telah ada UU TPKS yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual digital, masih dibutuhkan adanya perbaikan pada beberapa aturan lainnya. Baik UU ITE maupun UU Pornografi misalnya, masih fokus pada pemidanaan atas pembuatan dan penyebarluasan konten yang memuat tubuh dan seksualitas perempuan terutama dengan unsur ketelanjangan atau aktivitas seksual. Belum diakomodir persoalan 'niat', pihak yang menjadi otak dari perbuatan tersebut, apakah ada intimidasi atau manipulasi di balik pembuatan dan atau penyebarluasan konten tersebut.

Kemudian juga dari perspektif aparat penegak hukum, masih ditemukan cara pandang yang mengabaikan bahwa kekerasan seksual digital merupakan kekerasan seksual. Bukan sekadar persoalan pelanggaran susila atau pornografi belaka. Konsekuensi dari cara pandang bahwa kekerasan seksual digital merupakan persoalan pelanggaran susila, maka penanganannya akan dilakukan terfokus pada upaya untuk menegakkan tabu atas seksualitas yang tidak pantas diungkapkan di muka umum. Upaya penghukuman juga dilakukan dalam rangka menegakkan kembali moral masyarakat kepada siapa pun yang dianggap terlibat termasuk dalam hal ini korban. Berbeda halnya apabila kasus-kasus kekerasan seksual digital ini dipandang sebagaimana adanya kekerasan seksual maka upaya penanganan akan terfokus pada bagaimana mencegah kerusakan yang lebih hebat dengan menghentikan peredaran konten tersebut serta memulihkan korban dan menjerakan pelaku. Dengan cara pandang ini, maka disadari bahwa dalam kasus kekerasan seksual digital telah jatuh korban yaitu dia yang tubuh dan seksualitasnya dijadikan objek dalam konten tersebut. Konsekuensinya, tindakan mengkriminalisasi korban dapat dicegah.

Isu penting lainnya berkaitan dengan persoalan kekerasan seksual digital ini adalah fakta bahwa aparat penegak hukum sering tidak dapat memahami bahwa korban pada kasus semacam ini mengalami dampak yang sama hebatnya dengan korban dalam kasus kekerasan seksual secara fisik. Pada kasus kekerasan seksual digital, korban menderita rasa malu yang hebat. Kondisi korban ini perlu dipahami oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, upaya memediasi korban dengan pelaku, atau menghentikan proses kasus kekerasan seksual digital tersebut tidak boleh terjadi karena faktanya telah jatuh korban.

Penutup

Terdapat dua hal penting di dalam penanganan kekerasan seksual di ruang digital; yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital di Indonesia. Kedua, rekomendasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di ruang digital.

Adapun tantangan yang dihadapi pada penanganan kasus kekerasan seksual pada ruang digital antara lain: Pertama, tafsir aparat penegak hukum terhadap konsep kekerasan seksual itu sendiri masih sering kali bersifat konvensional. Artinya, tindakan yang dianggap masuk dalam kategori kekerasan seksual menurut sebagian aparat penegak hukum di Indonesia mesti tindakan fisik yang dampaknya terhadap korban pun harus kelihatan secara fisik. Padahal kekerasan seksual di ruang digital tidak semuanya diikuti dengan tindakan fisik. Kemudian dampaknya pun sama beratnya dengan kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik. Dari ketiga kasus yang dibahas, dampak-dampak tersebut yang dapat dipetakan antara lain adalah trauma sampai tidak ingin bertemu orang, enggan berinteraksi lagi dengan orang lain dalam media sosial, kerugian finansial akibat dari pemerasan yang juga dilakukan pelaku, depresi sampai menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dialami oleh R pada kasus Pandeglang, bahkan dapat menimbulkan keputusan korban untuk bunuh diri sebagaimana terjadi pada kasus di NTT.

Selain soal tafsir mengenai batasan tindakan yang dapat disebut sebagai tindak kekerasan seksual, aparat penegak hukum di dalam melakukan proses hukum pada kasus kekerasan seksual baik yang terjadi secara fisik maupun di ruang digital masih merasa perlu mengulik historisitas seksual korban. Riwayat seksual korban dan hubungan korban dengan pelaku sering kali menjadi kendala bagi korban baik untuk diproses kasusnya ataupun untuk memperoleh keadilan. Polisi dan Jaksa pada kasus R di Pandeglang menganggap bahwa kasus tersebut bukanlah kasus kekerasan seksual sehingga kemudian mengalihkan kasusnya ke ranah kasus terkait dengan teknologi informasi. Kemudian pertimbangan atas historisitas seksual korban pada beberapa putusan hakim berdampak pada putusan yang mengandung sanksi yang tidak terlalu berat karena dianggap 'kerusakan' yang terjadi tidaklah seberat yang menimpa korban yang belum pernah melakukan hubungan seksual (Ramadhan 2016).

Tantangan kedua adalah persoalan literasi digital masyarakat. Pada kasus R, A mengira bahwa karena ia telah mengirim video itu dengan mempergunakan fitur sekali lihat, video tersebut akan lenyap. A lupa bahwa jejak digital tak mudah terhapus dan dapat berkali-kali diteruskan, disimpan, dibagikan. Pada kasus Nona di NTT, teman Jong dan Nona yang menyebarluaskan foto Nona di Facebook, tidak memperhitungkan konsekuensi bahwa sekali foto tersebut diunggah ke ruang digital maka akan menyebar dengan cepat. Mungkin oknum tersebut juga tidak menyadari konsekuensi bahwa korban, dalam hal ini Nona, ketika mengetahui fotonya tersebar, menjadi cemas, malu, depresi, dan kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya. Pada kasus kedua guru di Semarang dan Sukabumi, perusahaan pinjaman *online* dalam rangka memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya, telah melampaui batas dengan menggunakan foto kedua korban, memanipulasinya secara digital, dan menyebarluaskan foto tersebut. Pihak perusahaan tersebut tidak memperhitungkan tindakannya bahwa hal itu merupakan pelanggaran dua produk hukum sekaligus, yaitu UU ITE dan UU TPKS.

Tantangan ketiga, berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ruang digital. Mereka mengalami trauma, rasa takut, malu yang sama dengan korban kekerasan seksual secara fisik. Bagaimana mekanisme yang tepat yang terjangkau oleh para korban kekerasan seksual di ruang digital untuk berlindung atau bahkan sekadar konseling menguatkan diri. Upaya perlindungan korban menjadi penting, jangan sampai terulang kasus Nona di NTT yang kemudian karena merasa tidak dapat memperoleh jalan keluar, akhirnya memutuskan mengakhiri hidup. Dengan demikian, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi penting untuk menjangkau dan memberikan pelindungan, termasuk juga memberikan konseling dalam rangka pemulihan korban (Iskandar 2021). Kehadiran LPSK mestinya

bukan hanya bagi korban kekerasan seksual fisik tetapi juga korban dan saksi pada kasus kekerasan seksual di ruang digital yang juga sebetulnya sama menderitanya. Pada kasus kekerasan seksual di ruang digital, bahkan pelaku dapat dengan mudah mengetahui lokasi tempat korban berada, meneror korban tanpa kenal ruang dan waktu secara terus-menerus menggunakan media sosial.

Bagaimana kemudian strategi menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di ruang digital. Pertama, edukasi terhadap aparat penegak hukum mengenai konsep kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS menjadi penting. Tujuannya supaya aparat penegak hukum memahami bahwa bukan hanya perkosaan atau percobaan perkosaan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya yang berada di garda depan berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan, dapat merespons dengan tepat apabila menerima laporan masyarakat berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di ruang digital.

Kedua, perlu ada edukasi tentang bagaimana berinteraksi, berselancar, berbagi informasi dengan aman di ruang digital dan edukasi ini penting dilakukan secara terstruktur, masuk dalam kurikulum. Artinya, bukan hanya melalui webinar, seminar, dan *workshop*. Akan tetapi, perlu masuk di dalam materi pengajaran di kelas sejak dari pendidikan dasar tentang informasi apa yang boleh dibagikan atau tidak boleh dibagikan di ruang digital, bagaimana bersikap respek terhadap orang lain di ruang digital, bagaimana menjaga data diri tetap aman di ruang digital dan sebagainya.

Ketiga, kehadiran dan peran LPSK menjadi penting dalam rangka memberikan perlindungan korban kekerasan seksual di ruang digital. Dengan demikian, perlu diperluas lingkup perlindungan yang diberikan.

Daftar Pustaka

Andomo, S. 2023. "Buka Jalan ITE Pidanakan Pelaku Kekerasan Seksual", *Jaring.id,* diakses pada 25 Maret 2024, di https://jaring.id/bukan-jalan-ite-pidanakan-pelaku-kekerasan-seksual/.

Assifa, F. 2021. "Sebar Foto Bugil Jadi Alat Teror Pinjol pada 2 Korbannya Guru Wanita", *Kompas.com,* diakses pada 26 Maret 2024, di https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/074500565/sebar-foto-bugil-jadi-alat-teror-pinjol-pada-2-korbannya-guru-wanita-?page=all.

Attrill, A. 2015. *Cyberpsychology*. Oxford University Press: UK.

Bere, S. M. & Assifa, F. 2023. "Siswi SMA TTU Bunuh Diri karena Foto Bugilnya Beredar di Media Sosial", *Kompas.com,* diakses pada 20 Maret 2024, di https://regional.kompas.com/read/2023/09/30/111957778/siswi-sma-ttu-bunuh-diri-karena-foto-bugilnya-beredar-di-media-sosial?page=all.

Chakraborty, D. 2022. "The (Counter) Politics of Digital Comics in India: Reading Literature of the Digital Space", *Journal of International Women's Studies,* Vol. 24(6), hlm. 1--11. https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2983&context=jiws.

Connolly, J. W. 2009. *A Reader's Guide to Nabokov's "Lolita"*. Academic Studies Press: USA. https://doi.org/10.2307/j.ctt1zxsk0k.7.

Cyber Safe. 2017. "Cyber Violence Against Women & Girls Report", *stoponlineviolence.eu,* diakses pada 12 April 2024, di https://www.stoponlineviolence.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cybersafe_Report_200623_web.pdf.

Dhewy, A. 2017. "Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015--2019", *Jurnal Perempuan,* Vol. 22(1), hlm. 55--64. https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/163/165.

Febrian, P. P. 2017. "Marah Besar dengan Kaum Pedofil, Nafa Urbach Hapus Semua Foto Anak", *Detik Hot,* diakses pada 28 Maret 2024, di https://hot.detik.com/celeb/d-3598351/marah-besar-dengan-kaum-pedofil-nafa-urbach-hapus-semua-foto-anak.

Fineman, M. A. 2005. "Feminist Legal Theory", *Journal of Gender, Social Policy & the Law,* Vol. 13(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2132233.

Hadiansyah, S. 2023. "Anya Geraldine Diikuti Stalker Selama Seminggu hingga ke Apartemen, Pelaku Sampai Spam DM yang Bikin Risih", *Liputan 6,* diakses pada 20 Maret 2024, di https://www.liputan6.com/showbiz/read/5438635/anya-geraldine-diikuti-stalker-selama-seminggu-hingga-ke-apartemen-pelaku-sampai-spam-dm-yang-bikin-risih.

Irianto, S. & Nurtjahyo. L. I. 2020. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Iskandar, L. 2021. "LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Perempuan,* Vol. 26(2), hlm. 91--101. https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/581/413.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2021. "Catatan Tahunan 2020", diakses pada 22 Maret 2024, di https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. "Catatan Tahunan 2021", diakses pada 22 Maret 2024, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. "Catatan Tahunan 2022", diakses pada 22 Maret 2024, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/

catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2024. "Catatan Tahunan 2023", diakses pada 22 Maret 2024, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan.

Lestari, G. A., Naibaho, N., & Nurtjahyo, L. I. 2021. "Pinjaman Online (Pinjol) dan Perempuan: Kerentanan Keamanan Data Pribadi pada Inklusivitas Keuangan Berbasis Teknologi Finansial", *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI untuk Indonesia,* Vol. 4(1), hlm. 607--615. Badan Penerbit FHUI: Depok.

Miller, D. 2018. Digital Anthropology. In F. Stein (Eds.), *The Open Encyclopedia of Anthropology*, http://doi.org/10.29164/18digital.

Nurtjahyo, L. I. 2020. "Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?", *Theconversation.com,* diakses pada 21 April 2024, di https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230.

Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN.

Pengadilan Negeri Pandeglang. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

Ramadhan, C. 2016. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual", *Kompas cetak*, hlm. 7.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Suadnyana, I.W.S. 2022. "Polisi Tangkap Pria Kenalan Facebook Pemerkosa Gadis di Denpasar", *detikbali*, diakses pada 4 Juni 2024, di https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6224578/polisi-tangkap-pria-kenalan-facebook-pemerkosa-gadis-di-denpasar.

Tambunsaribu, R. D. & Widiantini, I. 2021. "Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Perempuan,* Vol. 26(2), hlm. 79--90. https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/586/415.

West, R. 2018. "Women in the Legal Academy: A Brief History of Feminist Legal Theory", *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works,* 2119, hlm. 977--1003. https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2119/.

Catatan Akhir

1. Lolita sebetulnya merupakan nama dari tokoh di dalam sebuah novel karya Vladimir Nabokov berjudul "Lolita" (1955) yang menggambarkan hubungan yang tidak biasa antara seorang laki-laki dewasa dengan anak perempuan berusia 13--14 tahun bernama Lolita. Digambarkan pada novel tersebut bahwa tokoh utama laki-laki memiliki ketertarikan seksual pada Lolita. Novel ini banyak dibahas di dalam artikel dan buku ilmiah pula (Connolly 2009).
2. Penulis tidak menyebutkan di halaman putusan mana terdapat nama korban dalam rangka tidak menyebarluaskan data korban lebih jauh.

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 29 No. 1, 2024, 47—57
copyright @ 2024 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v29i1.962
DDC: 305

Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS

Challenging the Domination of Patriarchal Law: Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating the Implementation of Anti Sexual Violence Law

Desintha Dwi Asriani[1] & Defirentia One Muharomah[2]

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada[1] & Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada[2]
Jalan Socio Yusticia Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta[1] & Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Jalan Pogung Kidul, Sleman[2]

desintha@ugm.ac.id[1] & defirentiaone90@mail.ugm.ac.id[2]

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

This article describes the experiences and reflections of women activists in facing the challenges of advocating for the issue of sexual violence and the implementation of Anti Sexual Violence Law (UU TPKS) at the community level. A qualitative research method with a feminist perspective was deployed and thus data collection was conducted through interviews with women activists from different regions such as Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta. This study develops the perspectives of sociology of law and feminism to understand the extent to which internal and external aspects influence the implementation of the TPKS Law in the community including gender issues in it. The study results show that the implementation of UU TPKS needs to be seen as a complex and non-linear process due to the challenges of legal plurality reflected by the diversity of customary/local laws in a number of communities in Indonesia. Thus, special efforts are needed that not only focus on the provision of legal products, but also on how the legal products, such as UU TPKS, could be seen as inputs that have targets on the transformation of legal culture to the community level.

Keywords: sexual violence crime law, women activists, sexual violence, legal plurality

Abstrak

Artikel ini mendokumentasikan pengalaman dan refleksi para aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan mengadvokasi isu kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di level komunitas. Metode penelitian kualitatif berperspektif feminis digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan aktivis perempuan yang berasal dari daerah yang berbeda, seperti Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Studi ini mengembangkan perspektif sosiologi hukum dan feminisme untuk memahami sejauh mana aspek internal dan eksternal berpengaruh terhadap implementasi UU TPKS di komunitas termasuk isu gender. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai proses yang kompleks dan tidak linier karena tantangan pluralitas hukum yang terefleksikan dalam keragaman hukum adat/lokal di sejumlah komunitas di Indonesia. Diperlukan upaya khusus yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk hukum, tetapi juga pada seberapa besar produk hukum seperti UU TPKS dapat dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum hingga di level komunitas.

Kata kunci: UU TPKS, aktivis perempuan, kekerasan seksual, pluralitas hukum

Pendahuluan

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa aktivis perempuan memainkan peran penting dalam membuat perubahan dan pengembangan kebijakan gender (Anyidoho et al. 2021; Zahwa 2021; Dhewy & Sandiata 2019). Demikian halnya pada isu kekerasan, gerakan advokatif juga diinisiasi oleh aktivis perempuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban yang menuntut keadilan dengan mengungkapkan pengalaman kekerasan seksualnya. Pascareformasi, aktivis perempuan di Indonesia telah berhasil menginisiasi perubahan dengan mendorong disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, seperti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004), Undang-Undang tentang Penghapusan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007), dan Undang-Undang Pornografi (2008) (Lihat Poerwandari et al. 2018).

Undang-undang merupakan simbol produk hukum yang menggambarkan sistem norma yang bekerja untuk mengatur masyarakat tertentu (Klugman 2017). Akan tetapi, ideologi patriarki masih sering menjadi dasar nilai yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender bahkan dalam struktur hukum (Saraswati 2020) termasuk di Indonesia. Misalnya, substansi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (1974/2019) yang dianggap bias gender karena merefleksikan suami sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara perempuan dikaitkan dengan istri yang berperan sebatas mengelola urusan rumah tangga. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang justru berakhir pada penanganan hukum yang tidak ramah terhadap korban (Asriani 2020; Fitri et al. 2021; Kamilla 2021; Nirmalasari & Sarwono 2021).

Pada bulan April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) telah disahkan. Pengesahan ini merupakan sejarah baru bagi aktivis perempuan Indonesia karena dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk memperjuangkan landasan hukum formal yang sah bagi kasus kekerasan seksual yang trennya meningkat setiap tahunnya. Secara substansial, penegakan UU TPKS didukung untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah kekerasan seksual yang belum pernah disebutkan secara komprehensif dalam undang-undang sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas, undang-undang ini dianggap sejalan dengan gagasan feminis tentang pentingnya menempatkan kelompok termarginalisasi seperti pengalaman korban sebagai pusat dari seluruh rangkaian penyelidikan (Eddyono 2021).

Dengan merujuk UU TPKS, upaya untuk membongkar praktik kekerasan dapat dilakukan dengan menempatkan perempuan atau korban kekerasan sebagai titik awal untuk menentukan keputusan yang adil. Namun di sisi lain, keragaman pembentukan hukum adat/hukum lokal di Indonesia (Priambodo 2018; Manullang 2021) kemudian menjadi corak dalam sistem penanganan kasus kekerasan, pemerkosaan, dan pelecehan di level komunitas (Harahap & Hasibuan 2022; Nafi et al. 2016). Beberapa di antaranya tercantum dalam hukum tertulis, seperti *Hukum Sharia*, sementara yang lain didasarkan pada perjanjian kolektif yang tidak tertulis. Contoh penggunaan hukum yang tidak tertulis diilustrasikan dalam kasus pemerkosaan yang diselesaikan melalui pernikahan atau denda yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban dan keluarga (Nafi et al. 2016). Terlepas dari kelokalan atas struktur hukum yang diberlakukan, implementasi hukum adat/lokal di sejumlah komunitas juga mendapatkan kritik dari feminis terutama ketika mendiskusikan tentang sejauh mana implementasi hukum tersebut memiliki komitmen terhadap perwujudan keadilan gender (Afrianty 2018; Febriandi et al. 2021; Hodgson 2017; Zurnetti & Muliati 2022).

Penggunaan hukum adat/lokal yang sudah diberlakukan jauh sebelum disahkannya UU TPKS kemudian diasumsikan sebagai tantangan bagi proses implementasi UU TPKS itu sendiri. Meskipun UU TPKS adalah undang-undang dengan perspektif gender yang kuat, keragaman hukum adat juga mencerminkan apa dan bagaimana struktur keadilan telah lebih dulu dikonstruksikan. Akibatnya, masyarakat cenderung merujuk pada sistem hukum tertentu yang dianggap lebih merepresentasikan kelokalan mereka sebagai komunitas tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa norma-norma informal yang diinternalisasikan dan direproduksi oleh masyarakat dapat menjadi tantangan utama dalam reformasi sosial yang diformulasikan di tingkat nasional (Adeney-Risakotta 2016; Klugman 2017) termasuk dalam kaitannya dengan isu gender dan seksualitas (Asriani et al. 2023). Studi ini berupaya mengeksplorasi batas pengetahuan antara hukum formal yang dihasilkan di tingkat nasional dan keragaman hukum informal yang masih diberlakukan oleh masyarakat lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tantangan baik secara struktural maupun budaya pada proses implementasi kebijakan yang memayungi isu seputar kekerasan seksual di Indonesia.

Sementara itu, meskipun dokumentasi tentang tantangan yang dihadapi aktivis perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan gender telah banyak dilakukan, studi yang secara khusus membahas pengalaman aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan gender di komunitas lokal masih relatif sedikit (Poerwandari et al. 2018; Wariyatun 2019; Sigiro & Takwin 2021). Secara umum, studi sebelumnya menunjukkan bahwa lingkungan budaya dan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk normalisasi perilaku kekerasan (WHO 2013) yang menciptakan hambatan lebih lanjut pada implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pada tingkat keluarga,

penerimaan budaya kekerasan meningkatkan faktor risiko untuk semua jenis kekerasan dalam hubungan personal. Selain itu, toleransi sosial terhadap perilaku kekerasan dapat dipelajari di masa kanak-kanak, melalui penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga, media, maupun dalam konteks lain. Sikap toleransi ini, untuk beberapa masyarakat Indonesia diadopsi dan menyebabkan perempuan yang hidup dengan kekerasan percaya bahwa kekerasan disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri dan dengan demikian mereka pantas dihukum (Hayati et al. 2013). Selain itu, sulit bagi korban untuk membuat laporan dan mendapatkan bantuan hukum.

Beberapa studi menjelaskan bahwa norma dapat berpotensi menjadi pelindung, pendukung, dan pendorong perilaku atau tindakan kekerasan. Dengan merefleksikan pengalaman masyarakat Uganda, Rottach & Gribble (2020) menjelaskan ketidaksetaraan gender tetap menjadi hambatan untuk implementasi kebijakan di masyarakat, terutama ketika tujuan kebijakan bertentangan dengan norma budaya dan gender yang kaku. Meskipun banyak penelitian serupa yang mengeksplorasi hambatan budaya dalam menangani kekerasan seksual, penelitian lainnya juga menyoroti tantangan struktural (Marye & Atav 2022; Anyidoho et al. 2020). Sebuah studi yang dilakukan di Arab Saudi menemukan bahwa undang-undang yang mengatur kerangka kerja untuk intervensi kekerasan di ranah domestik diadopsi pada tahun 2013, tetapi aturan tersebut tidak pernah diterapkan. Di Arab Saudi, kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena stigma sosial dan tafsir terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, pengumpulan data tentang masalah ini tidak diizinkan dan tidak diakui dalam kebijakan (Alquaiz et al. 2021). Dalam kasus lainnya seperti terjadi di Ekuador menunjukkan bahwa kebijakan kekerasan berbasis gender tidak dapat dikembangkan karena kurangnya sumber daya keuangan (Carvajal 2020). Selain itu, kurangnya investasi dalam infrastruktur pelatihan di negara-negara pendapatan rendah dan menengah, yang merupakan hambatan untuk memperluas skala program yang efektif (Marye & Atav 2022; Smyth et al. 2021) menekankan pentingnya pelatihan penegak hukum dan petugas peradilan untuk bersimpati kepada perempuan korban kekerasan dan tidak menyalahkan mereka atas kekerasan yang dialaminya. Stigmatisasi oleh polisi, perempuan korban kekerasan kesulitan dalam mencari bantuan (UN Women 2021b). Dalam kasus lain, pemerintah yang telah membangun sistem peringatan bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan bahkan tidak memperhitungkan kemampuan korban untuk menggunakan layanan (Marye & Atav 2022).

Di Indonesia, pengesahan UU TPKS dapat berkontribusi pada penguatan pemahaman masyarakat secara lebih luas tentang kekerasan seksual. Sebelumnya, masyarakat Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mendefinisikan kekerasan seksual tetapi hanya terbatas pada pemerkosaan dan pencabulan (Herawati et al. 2021; Nurmalasari & Waluyo 2022). Pemahaman yang sempit ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap perlindungan komprehensif terhadap korban. Misalnya, penggunaan KUHP mengarah pada laporan kasus pemerkosaan yang harus diselesaikan dengan informasi yang menggambarkan penetrasi penis ke dalam vagina. Sementara dalam beberapa kasus, perkosaan dapat dilakukan menggunakan berbagai alat (Nurmalasari & Waluyo 2022). Begitu juga, berbagai bentuk kekerasan seksual tidak dijelaskan secara memadai dalam KUHP tersebut. Berdasarkan kasus yang dilaporkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan 2021) mencatat bahwa kekerasan seksual memiliki spektrum yang beragam, mulai dari bentuk, kejadian, dan faktor penyebab.

Secara historis, Komnas Perempuan memulai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada tahun 2012. Namun, proses pembuatan kebijakan direncanakan ulang berkali-kali karena Program Legislasi Prioritas Nasional. Ada banyak pro dan kontra yang terjadi, tidak hanya di antara politisi tetapi juga masyarakat (BBC News Indonesia 2022). Setelah menunggu 10 tahun, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya secara resmi diadopsi menjadi hukum pada tahun 2022. Namun demikian, upaya mengatasi kekerasan seksual tampaknya lebih rumit karena internalisasi ideologi patriarki yang telah dilakukan lebih lama melalui norma dan praktik budaya. Keberadaan UU TPKS bisa jadi sulit untuk membendung budaya menyalahkan korban karena pluralitas hukum yang diadopsi di beberapa komunitas lokal dapat memungkinkan penggunaan perangkat yang ditujukan untuk melemahkan posisi perempuan dalam proses peradilan.

Berdasarkan pada identifikasi literatur dan konteks munculnya UU TPKS, studi ini berupaya memperluas kajian yang membahas tentang berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan berperspektif gender

di level komunitas sehingga dapat berkontribusi untuk memperkaya literatur seputar kekerasan berbasis gender, sosiologi hukum, dan advokasi sosial.

Dalam upaya menganalisis dinamika seputar implementasi UU TPKS, studi ini menggunakan perspektif sosiologi hukum karena dapat berfungsi untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa keputusan atas pembuatan hukum tertentu harus dibuat (Cotterrell 2017). Di satu sisi, hukum dapat menjadi simbol penting untuk menentukan keadilan. Namun, bagaimana formalitas hukum dirumuskan juga tidak terpisahkan dari internalisasi individu atau kelompok terhadap norma-norma yang mengatur kehidupannya sehari-hari (Silbey 2019). Friedman (1969) berpendapat bahwa ada tiga aspek yang memengaruhi kerja sistem hukum, seperti struktur hukum (*legal structure*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal culture*). Sementara struktur dan substansi adalah aspek yang berkaitan dengan lembaga dan produk hukum, budaya hukum mengacu pada nilai-nilai dan norma yang menentukan apakah hukum tertentu dapat diterapkan. Studi ini, secara spesifik menggunakan aspek budaya hukum yang dibedakan menjadi dua kategori, seperti budaya hukum internal dan eksternal untuk mengerangkai tantangan dalam implementasi UU TPKS. Aspek budaya hukum internal berkaitan dengan kapasitas aktor di balik penegakan hukum secara umum, sedangkan aspek eksternal mengacu pada budaya yang telah atau sedang diyakini oleh masyarakat.

Perspektif feminis digunakan untuk memahami isu-isu berbasis gender dalam aspek budaya hukum internal dan eksternal tersebut. Hal ini merujuk pada kritik utama feminis bahwa proses pembuatan dan implementasi hukum di satu sisi mengadopsi gagasan tentang netralitas, objektivisme, dan rasionalisme (Calhoun & MacKinnon 1990). Akan tetapi, struktur hukum sering kali sulit untuk menempatkan pengalaman berbasis perempuan sebagai dasar untuk menentukan mekanisme keadilan itu sendiri (Conaghan 2013). Calhoun & MacKinnon (1990) berpendapat bahwa struktur hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan mencerminkan dan memperkuat hubungan kekuasaan patriarki. Perspektif feminis ini juga bermanfaat untuk memahami praktik agentik di kalangan para aktivis perempuan dalam melawan normalisasi kekerasan seksual di komunitas melalui gerakan advokatif yang dilakukan baik pada level individu maupun secara kolektif.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis karena memiliki kepentingan untuk mengeksplorasi pengalaman aktivis perempuan dalam membela dan memberdayakan kelompok marginal perempuan (Lykke 2010; Ramazanoglu & Holland 2002). Studi ini juga merupakan penelitian reflektif karena menempatkan refleksi pengalaman personal informan sebagai aktivis perempuan sebagai input data utama.

Pengumpulan data dilakukan pada Juli--Oktober 2023 melalui wawancara mendalam dengan aktivis perempuan yang telah bekerja dalam menangani masalah kekerasan seksual di komunitas. Pertanyaan wawancara mencakup pengalaman mereka membela dan membantu korban kekerasan seksual sebelum dan setelah UU TPKS disahkan.

Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu informan pertama yang telah direkomendasikan bergulir memberikan informasi tentang informan yang potensial untuk diwawancarai berikutnya. Jaringan peneliti di komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terutama yang bekerja pada isu perempuan, gender, dan kekerasan terhadap perempuan merupakan modalitas untuk mendapatkan rekomendasi informan utama tersebut. Informan utama untuk wawancara tersebut adalah para aktivis perempuan yang berasal dari Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Mereka rata-rata telah bekerja pada isu kekerasan terhadap perempuan lebih dari lima tahun. Studi ini tidak secara spesifik menganalisis konteks sosial-budaya masing-masing daerah asal dari informan tersebut. Namun, studi ini memberikan informasi singkat yang menekankan karakter dominan dari daerah-daerah tersebut. Misalnya, Aceh adalah daerah yang memiliki hukum lokal tertulis seperti *Hukum Sharia*, sementara Flores dan Banjarmasin mewakili wilayah yang memiliki hukum adat yang tidak tertulis. Oleh karena itu, pengalaman aktivis perempuan dari Aceh, Flores, dan Banjarmasin mencerminkan tantangan implementasi UU TPKS di daerah-daerah yang memegang hukum berbasis masyarakat dengan kuat. Sementara itu, pengalaman aktivis perempuan dari Semarang dan Yogyakarta adalah data yang menunjukkan bahwa banyak tantangan yang masih dihadapi oleh aktivis perempuan meskipun UU TPKS cenderung lebih mudah untuk digunakan di daerah yang tidak mengadopsi hukum adat/lokal.

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan transkrip terhadap hasil rekaman wawancara untuk kemudian dilakukan pengkodean. Pengkodean dengan menggunakan kata kunci, seperti kekerasan, pelecehan, perempuan, UU TPKS, dan penegak hukum dilakukan untuk mengategorikan bentuk dinamika dan tantangan yang dihadapi informan. Sementara itu. analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yakni disusun dengan menggunakan tema-tema berbasis pada pengalaman spesifik para informan. Selain itu, dikembangkan juga analisis naratif yakni berbasis pada narasi informan yang dituliskan secara berurutan dan membentuk alur cerita terkait isu atau topik tertentu. Penelitian ini menggunakan inisial ketika menyampaikan testimoni informan.

Bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan menyajikan temuan penelitian yang dibagi ke dalam dua bagian *Pertama,* terkait dengan refleksi informan atau aktivis perempuan tentang bagaimana wacana seputar kekerasan seksual telah direproduksi di level komunitas. *Kedua,* tentang pengalaman aktivis perempuan mendampingi korban kekerasan seksual yang tantangannya cukup beragam karena bangunan struktur hukum yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Refleksi tentang Dinamika Isu Kekerasan Seksual di Komunitas

Menurut aktivis perempuan, wacana yang berkembang seputar isu kekerasan seksual di komunitas sangat dinamis. Di satu sisi, kekerasan seksual masih dianggap sebagai isu privat yang cenderung tabu jika harus diungkapkan secara terbuka pada publik. Norma gender tradisional yang diperkuat dengan pengaruh hukum adat biasanya menjadi dasar untuk mencegah korban atau perempuan mengambil tindakan lebih lanjut atas kasus kekerasan yang dialami. Ketika terjadi kekerasan, korban sering diminta untuk diam karena budaya tabu yang tidak hanya berdampak pada stigma yang diberikan korban tapi juga keluarga besar.

> "Dalam budaya kita, saya masih menemukan bahwa ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dia cenderung diam" (DS 2023, Wawancara 30 Juni).

Menurut DS, seorang aktivis yang memiliki pengalaman mendampingi korban di wilayah dengan hukum adat yang kuat seperti Kalimantan, internalisasi nilai primordialisme juga menyebabkan masyarakat ragu tentang bagaimana mereka harus bereaksi terhadap kasus kekerasan seksual. Secara umum, masyarakat lebih suka merujuk pada cara-cara yang sudah biasa mereka saksikan. Misalnya, ketika diketahui bahwa pelaku dan korban adalah orang asing, maka keduanya akan diusir dari desa. Namun, jika keduanya penduduk asli, kasus akan ditutupi agar tidak mencemarkan nama komunitas/desa. Mekanisme tersebut cenderung didasarkan pada sistem hukum adat yang sudah lama diberlakukan dan seolah-olah disepakati oleh seluruh warga yang tinggal bersama. Karena telah berlangsung lama, penanganan yang lebih bersifat informal tersebut tampak telah menjadi norma dan dianggap normal.

Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak pernah sampai pada ranah hukum formal menjadikan masyarakat menganggap pelecehan terhadap perempuan adalah praktik yang dibolehkan. Hal ini seperti yang digambarkan pada candaan seksis yang direproduksi dalam pergaulan sehari-hari komunitas. DS menyampaikan:

> "Hal-hal yang kami anggap sebagai pelecehan tidak akan dianggap sebagai pelecehan. Juga, laki-laki seperti paman, ayah, dan saudara laki-laki lain dalam keluarga sering membuat cerita tentang pelecehan seksual sebagai lelucon" (DS 2023, Wawancara 30 Juni).

Internalisasi pengetahuan yang berbeda dan diperkuat dengan munculnya solidaritas di level keluarga, pertemanan, dan komunitas secara perlahan melahirkan persepsi bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak sehingga korban mulai berani berbicara dan bahkan melaporkan kasusnya kepada penegak hukum, seperti polisi. Selama kegiatan advokasi, aktivis perempuan juga menemukan tren yang berbeda. Mereka mengakui bahwa komunitas mulai menyadari bahwa kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus, yaitu korban dan keluarga ingin melaporkan ke polisi. Biasanya, mereka datang ke LSM atau mencoba menghubungi aktivis perempuan untuk meminta bantuan hukum. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan LA berikut ini:

> "Mereka (korban) biasanya membutuhkan bantuan hukum (dan menghubungi LSM) setelah polisi mengatakan tidak ada cukup bukti dalam laporan. Mereka datang ke LSM karena takut jika laporannya benar-benar tidak dapat diproses" (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

Meskipun stigma masih diberikan kepada korban kekerasan seksual, perasaan empati terhadap korban sering menyebabkan keluarga korban melaporkan kasus yang dialami ke polisi. Karena merasa ada perlakuan yang tidak adil menimpa anggota keluarganya, mereka

menganggap bahwa polisi dapat menangkap dan memberikan hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, para keluarga korban sering kali bersiasat dengan membuat laporan tetapi hanya menyampaikan kepada perwakilan dari LSM yang mendampingi dan tidak menceritakannya kepada para tetangga. Seperti yang disampaikan GE berikut ini:

> "Pernah saya didatangi oleh ayah korban untuk dibantu proses laporannya ke polisi yang dilakukannya tapi juga berharap tindakannya tersebut tidak sampai diekspos oleh media dan para tetangga. Ayah korban tersebut khawatir jika putrinya akan dirundung oleh tetangga dan teman-temannya" (GE 2023, Wawancara 4 Agustus).

Ketika ditanya tentang tanggapan masyarakat terhadap masalah kekerasan secara umum, informan lain, IR, juga mengonfirmasi perubahan perilaku di antara masyarakat itu sendiri. Menurutnya, masyarakat berangsur memiliki kesadaran untuk mengungkap kasus kekerasan, terutama yang terkait dengan anak-anak. Jika ada kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, orang tua tidak akan ragu untuk melaporkannya:

> "Jika korban (kekerasannya) adalah anak-anak, ya, orang-orang relatif sadar untuk membuat laporan segera, karena dukungan yang cukup luas. Tetapi untuk orang dewasa, korban didorong untuk membuat laporan hanya jika mereka tidak lagi tahu bagaimana menyelesaikannya secara adat" (IR 2023, Wawancara 2 Oktober).

Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk membawa masalah kekerasan terhadap anak-anak ke bidang hukum juga dipengaruhi oleh praktik-praktik baik dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, apabila terdapat kasus pelecehan anak, polisi dan jaksa cenderung bersedia memberikan tanggapan cepat.

Narasi yang menggambarkan tantangan yang dihadapi aktivis perempuan dalam mendampingi korban kekerasan seksual, termasuk upaya untuk mengatasinya merefleksikan kritik sekaligus praktik agentik yang berperan menjadikan pengetahuan tentang isu seksualitas sebagai masukan untuk melakukan perubahan hingga ranah hukum. Hal ini juga menggambarkan tentang pentingnya UU TPKS untuk segera diimplementasikan dan memastikan adanya ketersediaan sumber daya layanan keadilan yang berpusat pada korban kekerasan seksual (Sigiro & Takwin 2021).

Berdasarkan pengalaman dan refleksi aktivis perempuan, studi ini menemukan bahwa implementasi UU TPKS tidak serta-merta dapat dilakukan meskipun sudah disahkan. Sebaliknya, sejumlah tantangan justru muncul karena pertentangannya dengan budaya hukum yang berbeda dan sudah berlangsung lama menjadi landasan sebuah komunitas dalam mengatur warganya. Dapat dikatakan bahwa pembuatan kebijakan dan kehadiran aparat penegak hukum bukanlah produk akhir dari proses advokasi kebijakan, tetapi sejauh mana budaya masyarakat cukup mendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut (Eddyono, 2021; Silbey, 2019; Klugman 2017).

Bentuk dan Tantangan Advokasi Kasus Kekerasan Seksual

Bagian ini memaparkan tentang pengalaman aktivis perempuan saat mengadvokasi isu kekerasan seksual di level komunitas. Terdapat dinamika yang beragam karena proses implementasi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada wilayah yang UU TPKS belum disosialisasikan secara masif, informan menceritakan kesulitannya dalam membantu korban menyelesaikan kasus kekerasan seksualnya melalui sistem hukum formal. Menurut aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam studi ini, banyak korban merasa bahwa laporan mereka tidak direspons dengan cepat oleh aparat penegak hukum. Situasi ini terjadi di sebagian besar di daerah dengan hukum adat yang ketat, seperti Kalimantan, Flores, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti yang disampaikan oleh informan GE berikut ini:

> "(Keluarga korban) melaporkan kasusnya ke polisi. Pada waktu itu, ayah korban merasa putus asa dengan perlakuan polisi karena sudah hampir 1 bulan bolak-balik ke kantor polisi tapi laporannya tidak juga ada perkembangan. Lalu ayah korban tersebut bercerita kepada temannya dan disarankan menghubungi LSM agar dapat dibantu. Pada saat itulah, ayah korban menghubungi saya" (GE 2023, Wawancara 14 September).

Selama mengadvokasi, GE berupaya untuk memetakan faktor-faktor utama yang menghalangi proses pelaporan, termasuk apakah alur pelaporan sudah benar, adanya indikasi penipuan, dan komitmen aparat penegak hukum. Dalam prosesnya, menurut GE, problem yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tentang masalah gender dan kekerasan seksual.

> "Itu benar bahwa polisi belum memiliki perspektif tentang bagaimana menangani korban kekerasan seksual" (GE 2023, Wawancara 14 September).

Secara teknis, para aparat tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang prosedur hukum yang harus disediakan dalam merespons dan menanggapi kekerasan seksual yang dilaporkan. Keterbatasan pemahaman tersebut termasuk kurangnya perspektif gender sehingga cara penegak hukum dalam mendefinisikan bukti justru membebani korban. Misalnya, korban diminta untuk memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa kasus pelecehan yang dilaporkan sebenarnya adalah hubungan dua orang dewasa yang saling menyukai. Namun bagi korban, upaya untuk mengumpulkan bukti bahwa terdapat unsur paksaan membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, korban juga memiliki kebutuhan lain terkait dengan pemulihan psikologis dan sosial karena trauma. Pada situasi yang demikian, GE menyampaikan bahwa strategi yang dilakukannya adalah dengan pendekatan kultural. GE berupaya melakukan negosiasi dengan pemegang kekuasaan lembaga kepolisian agar memberikan delegasi kepada pihak kepolisian yang sedang menangani kasus kekerasan tersebut:

> "Jadi, setelah kami melakukan audiensi dengan para pimpinan di lembaga kepolisian, kepala polisi yang bertugas waktu itu berjanji untuk memanggil para penyidik. Saya dan teman-teman aktivis lainnya waktu itu mengatakan kalau akan menyebarkan kasus ini di media sosial jika polisi masih lambat memberikan penanganan" (GE 2023, Wawancara 14 September).

Sebagai konsekuensi dari proses yang rumit, dalam beberapa kasus, korban dan keluarga memilih untuk "menyerah" dengan lembaga formal, seperti kepolisian. Pada kondisi inilah, korban dan keluarga mempertimbangkan untuk kembali merujuk pada hukum adat. Namun, ketika bergantung pada mekanisme adat, korban dan keluarga memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit menegosiasikan kepentingannya. Seperti yang juga disampaikan oleh GE saat dirinya membantu mengidentifikasi beberapa tawaran yang perlu disampaikan saat pertemuan adat agar korban dan keluarganya tetap diuntungkan:

> "Saya memiliki pengalaman membantu korban yang kebetulan juga tuna wicara. Saat itu, hanya karena gadis ini tuna wicara, para pemimpin adat menawarkan babi sebagai denda atas pelecehan yang dia terima. Kami jadi mempertanyakan bagaimana bisa begitu?" (GE 2023, Wawancara 14 September).

Ketika ditanya seberapa besar penegakan hukum adat dapat berpihak pada korban, GE menjelaskan bahwa hukum adat lebih berpeluang memberikan keuntungan kepada pelaku. Pertama, hukum adat biasanya tidak ditulis. Kemudian, dalam proses pengambilan keputusan, korban tidak pernah sama-sama dihadirkan sehingga perspektif dan aspirasi korban dalam proses penyelesaian kasusnya sendiri justru tidak menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah salah satu contoh narasi informan yang menggambarkan tentang bagaimana mekanisme hukum adat cenderung kembali menyulitkan perempuan korban kekerasan:

> "Misalnya ketika seorang gadis dilecehkan dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dendanya adalah gading gajah. Harga gading gajah sekitar 200 juta rupiah. Nah, dalam konteks ini, sekali lagi, gadis atau korban tidak pernah ditanya. Sebaliknya, ayahnya atau anggota keluarga laki-laki lainnya yang diundang ke pertemuan justru diminta untuk memutuskan apakah denda itu dapat diterima" (GE 2023, Wawancara 14 September).

Pada wilayah yang menerapkan instrumen hukum lokal khusus, seperti di Aceh menghasilkan tantangan yang berbeda. Menurut aktivis perempuan, kecenderungan kekerasan seksual terhadap perempuan relatif tinggi meskipun di wilayah yang menerapkan Hukum Islam. Situasi ini juga merupakan karakter khas daerah konflik yang memiliki faktor untuk meningkatkan kerentanan perempuan. Pada dasarnya, seperti yang diilustrasikan dalam situasi pertama, aktivis perempuan di Aceh juga mengalami tantangan budaya dalam membantu korban kekerasan seksual, terutama dalam kelompok orang dewasa atau kasus yang terjadi di luar pernikahan. Namun, menurut aktivis perempuan, sebagian besar aparat penegak hukum berpikir bahwa aturan yang digunakan untuk menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada orang dewasa sudah ditulis dalam *Qanun Jinayat*. Masalahnya adalah kekerasan seksual cenderung ditafsirkan sama dengan perzinaan. Berdasarkan *Qanun Jinayat*, korban yang melaporkan kasus mereka diminta untuk memberikan bukti langsung, seperti saksi yang melihat insiden yang dilaporkan. Persyaratan ini cukup sulit bagi korban karena kekerasan seksual sebagian besar terjadi di ranah personal. Selain itu, sesaat setelah mengalami kekerasan seksual, korban biasanya tidak segera bercerita bahkan dengan orang terdekat sehingga sulit untuk memberikan bukti langsung yang menggambarkan jejak kekerasan di dalam tubuh korban. Oleh karena itu, persepsi tentang bukti langsung yang tidak bersahabat dengan situasi korban lantas dijadikan sebagai alasan untuk melakukan reviktimisasi dengan tuduhan perzinaan. Berikut adalah pengalaman yang disampaikan LA:

> "Dalam *Qanun Jinayat*, jika kita menganalisisnya, dasar yang digunakan adalah konsep zina atau seks ilegal yang dilarang berdasarkan aturan Islam. Tapi sebetulnya kekerasan seksual dan zina itu berbeda. Jadi, jika ada korban pemerkosaan melaporkan, mereka akan diminta untuk memberikan bukti langsung. Saat bukti langsung lemah dan pelaku menyampaikan sumpah mereka sebanyak lima kali, yakni dengan mengucap: "Saya tidak melakukannya", maka korban justru bisa disalahkan" (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

Dengan mempertimbangkan sulitnya bernegosiasi dengan hukum lokal setempat yang didasarkan pada *Qanun Jinayat,* para aktivis perempuan dari LSM di Aceh biasanya memfokuskan kembali program advokasi mereka pada pemulihan korban. Seperti yang ditekankan oleh informan LA, upaya untuk mewujudkan keadilan gender terutama dalam kaitannya dengan isu kekerasan terhadap perempuan cenderung akan gagal selama hukum lokal seperti *Qanun Jinayat* belum diubah. Sementara penanganan kasus kekerasan seksual tidak terbatas pada bagaimana penghukuman pada pelaku. Namun, pemenuhan hak-hak korban, seperti proses pemulihan, juga merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini (dari sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan), aktivis perempuan di Aceh lebih berorientasi pada pemulihan korban dibandingkan dengan pendampingan proses hukum yang dalam banyak kasus justru berisiko merugikan korban itu sendiri. Seperti yang disampaikan LA berikut ini:

> "Jika korban merasa bahwa laporan mereka tidak diproses oleh polisi, mereka biasanya datang kepada kami. Kemudian kami menjelaskan tentang situasi hukum di Aceh, terutama berkaitan dengan *Qanun Jinayat*. Kemudian kami memberikan pilihan kepada korban. Namun, banyak korban akhirnya meninggalkan proses hukum formal dan beralih ke upaya pemulihan atau mengatasi dampak kekerasan yang dialami, seperti kehamilan yang tidak diinginkan" (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

LA menambahkan bahwa advokasi yang dilakukan pada saat ini, terutama setelah UU TPKS disahkan, adalah untuk meyakinkan para pemimpin agama dan aparat penegak hukum agar bersedia mengintegrasikan aspek UU TPKS dengan *Qanun Jinayat*. Namun, aspirasi semacam itu tidak mencerminkan bahwa aktivis perempuan menentang Hukum Islam. Namun, berdasarkan pengalaman dalam membantu korban kekerasan seksual, aktivis perempuan mengharapkan bahwa proses penanganan dapat mempertimbangkan kepentingan kelompok marginal, seperti perempuan atau korban kekerasan seksual. Misalnya, para penegak hukum lokal bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan pasal tentang pelecehan dan pemerkosaan dalam *Qanun Jinayat.* Dengan demikian, UU TPKS dapat diterapkan ketika kasus yang terkait dengan kekerasan seksual dilaporkan.

Di wilayah lain seperti Semarang dan Yogyakarta, peran hukum adat dan hukum lokal relatif lemah. Informan, IK pertama-tama, mengatakan bahwa untuk menangani kasus kriminal, termasuk kekerasan seksual, masyarakat biasanya memang mengacu pada hukum yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka:

> "Hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah hukum yang dianggap lebih dekat dengan hukum dasar. Pada kenyataannya, meskipun hukum nasional tersedia, peran hukum lokal tetap lebih kuat. Misalnya, Perpol (Peraturan Polisi) sering digunakan daripada Hukum Pidana" (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Maka, tidak seperti situasi lain yang disebutkan sebelumnya, pengalaman aktivis perempuan dalam membela korban kekerasan seksual di daerah seperti Semarang dan Yogyakarta menunjukkan bahwa di satu sisi, implementasi UU TPKS telah diterima dengan baik. Namun, ketika sampai pada proses hukum, aparat penegak hukum tetap sulit untuk secara otomatis memahami logika UU TPKS yang secara teknis ditujukan untuk menyediakan pelayanan yang lebih ramah dengan korban. Menurut IK, aparat penegak hukum masih perlu meyakinkan bahwa ketentuan yang dinyatakan dalam UU TPKS benar-benar dapat dilakukan. Di sinilah, peran aktivis perempuan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan isu hukum dan gender menjadi sangat menentukan. Berikut adalah kisah IK ketika dirinya membantu seorang atlet perempuan yang dilecehkan oleh pelatihnya:

> "(Pada saat itu, kata pihak berwenang) tidak ada bukti, karena tidak ada yang melihatnya secara langsung. Tetapi di UU TPKS, saksi yang saling berhubungan yang tidak melihat kasus tetapi saling tahu dapat digunakan sebagai bukti. Ternyata muridnya (teman korban) mengatakan: "Tidak ada yang dipanggil oleh pelatih." Ini berarti ada indikasi bahwa dia (pelaku) merencanakan tindakan-tindakannya karena latihan seharusnya dilakukan bersama-sama. Mengapa hanya dia (korban) yang dipanggil? Maka kesaksian itu tidak (dalam arti bahwa saksi itu) melihat (dengan langsung), tetapi kesaksiannya itu saling berhubungan" (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Berdasarkan pengalaman IK, dirinya sering menawarkan diri untuk menjadi pihak yang memberikan pendapat hukum untuk membantu membenarkan bukti tidak langsung yang disampaikan oleh korban

benar-benar masuk akal. Menurutnya, lepas dari telah dapat digunakannya UU TPKS, aparat penegak hukum masih tampak tidak yakin bahwa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dapat benar-benar diproses dengan cara pandang yang berbeda terkait dengan ketersediaan bukti. Seperti yang diceritakan oleh IK berikut ini:

> "Ya, dia (korban) melaporkan kasusnya ke polisi. Awalnya polisi bingung karena laporan itu tidak disertai dengan bukti (*direct*). Lalu ia bertanya lagi, "Apakah ini bukti?" (Saya katakan) Ya itu bisa, dan kasusnya adalah kategori 2 atau kategori 3 kekerasan fisik. (Polisi bertanya) "Di mana itu bisa?" (Kemudian saya berkata): "Ok, biarkan saya membuat *legal opinion*." Jadi saya buatkan itu *legal opinion*-nya untuk menyakinkan mereka" (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Merujuk pada kerangka budaya hukum yang dibangun oleh Freedman (1969), temuan studi ini juga menggambarkan adanya aspek internal dan eksternal yang menjadi tantangan. Aspek internal merujuk pada situasi aparat penegak hukum, mulai dari petugas polisi hingga jaksa yang memiliki keterbatasan perspektif yang kemudian berpengaruh terhadap cara merespons laporan dari korban kekerasan seksual. Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan di Ghana yang menjelaskan bahwa komitmen penguasa atau pemimpin terhadap isu gender merupakan tantangan terbesar dalam setiap implementasi kebijakan gender (Anyidoho et al. 2021). Dalam konteks Indonesia, komitmen dan perhatian tersebut ini tidak hanya merujuk pada pimpinan di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal, seperti ketua adat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama yang memiliki hak istimewa untuk mendefinisikan dan melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan hukum di komunitas. Selain itu, tantangan budaya hukum pada aspek internal juga digambarkan melalui perlakuan tidak sensitif oleh polisi seperti terbatasnya perasaan empati yang perlu ditunjukkan oleh aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan korban kekerasan seksual (Smyth et al. 2021).

Sementara itu, tantangan pada aspek eksternal tercermin pada masih tingginya penerimaan sosial terhadap pandangan stereotip dan diskriminatif yang menjadi dasar diberlakukannya hukum adat atau hukum lokal di komunitas. Penerimaan sosial ini juga menggambarkan karakteristik norma-norma informal yang dibangun dan dipertahankan melalui mekanisme solidaritas sosial di dalam masyarakat (Manullang 2021). Oleh karena itu, hukum yang datang dari luar sering kali mendapatkan penolakan karena tampak memiliki struktur yang berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai kolektif komunitas tertentu tersebut (Lon & Widyawati 2021). Dalam studi ini, hukum adat/hukum lokal masih dianggap lebih kontekstual dibandingkan dengan hukum nasional seperti UU TPKS.

Penggunaan hukum adat atau hukum lokal yang lebih diprioritaskan daripada hukum nasional, tidak berarti bahwa masyarakat sepenuhnya menolak untuk mendefinisikan kekerasan seksual sebagai salah satu kejahatan. Merujuk pada pengalaman informan, terlepas dari apakah UU TPKS telah diimplementasikan, dapat diprosesnya laporan kekerasan seksual melalui hukum adat menggambarkan adanya pengetahuan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan yang juga merupakan isu publik. Misalnya, aturan tentang denda yang menunjukkan bahwa secara umum kekerasan seksual telah dilihat sebagai pelanggaran dan menilai bahwa pelaku perlu dihukum. Meskipun begitu, dalam prosesnya, mekanisme hukum yang ditetapkan sering tidak atau belum terintegrasi dengan perspektif gender (Zahwa 2021). Hambatan dalam budaya hukum terkait erat dengan pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk memeriksa apakah prinsip-prinsip keadilan yang dipercaya dalam setiap proses hukum akan melemahkan atau bahkan mempertahankan dominasi patriarki. Sementara itu, faktor yang berkontribusi terhadap reproduksi kekerasan seksual adalah pembakuan norma gender tradisional yang menormalkan tindakan mengobjektifkan tubuh dan seksualitas perempuan (Hlavka 2014; Maryam 2017; Rollero & Tartaglia 2019). Penggunaan perspektif gender mempertanyakan tentang sejauh mana norma solidaritas di balik pengambilan hukum adat menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Dalam konteks yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa integrasi antara perspektif gender yang diupayakan menjadi dasar hukum nasional seperti UU TPKS dan internalisasi nilai-nilai yang menjadi fondasi dari hukum adat belum dilakukan secara optimal.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum negara bisa jadi bukan hasil akhir jika dikontekstualisasikan pada wilayah yang memiliki pluralitas hukum. Keragaman norma sosial, agama, dan adat istiadat menghasilkan reaksi yang berbeda terhadap UU TPKS. Untuk menyatukan konsep keadilan dan perspektif gender, diperlukan inisiatif khusus yang tidak hanya berorientasi terhadap ketersediaan produk

hukum, tetapi sejauh mana produk hukum tersebut berkontribusi pada perubahan budaya hukum yang lebih/semakin berkeadilan. Implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai satu rangkaian kegiatan yang kompleks (bukan linear) yang di dalamnya juga mencakup pengembangan pendidikan dan sosialisasi konsep adil dalam perspektif gender, termasuk metode pendekatan yang digunakan di level individu, komunitas, dan institusi hukum yang bentuknya beragam. Implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum hingga di level komunitas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bentuk pendekatan atau inovasi sosial yang dapat dikembangkan untuk menjadikan UU TPKS sebagai input/stimulan dalam melakukan perubahan budaya hukum yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual baik di level individu, komunitas, dan institusi.

Daftar Pustaka

Adeney-Risakotta, B. 2016. "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women", *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 27(3). https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1186422.

Afrianty, D. 2018. "Women's Responses to The Implementation of Islamic Law In Aceh", In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, hlm 8. https://doi.org/10.4324/9781315628837.

Alquaiz, A. M., Almuneef, M., Kazi, A., & Almeneessier, A. 2021. "Social Determinants of Domestic Violence Among Saudi Married Women in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia", *Journal of interpersonal violence*, Vol. 36, hlm (3--4), hlm. 1561–1585. https://doi.org/10.1177/0886260517746128.

Anyidoho, N. A., Crawford, G., & Medie, P. A. 2021. "The Role of Women's Movements in the Implementation of Gender-Based Violence Laws", *Politics and Gender*, Vol. 17(3), hlm 427–453. https://doi.org/10.1017/S1743923X19000849.

Asriani, D. D. 2020. "The Voices of Unmarried Pregnant Girls and the Girlhood Discourse in Yogyakarta, Indonesia", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 26(4), hlm. 528–542. https://doi.org/10.1080/12259276.2020.1859173.

Asriani D. D., Samderubun, G., & Pangestu, E. W. 2023. "Pengetahuan dan Keterampilan Artikulasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kalangan Perempuan Muda Asli Papua", *Jurnal Perempuan*, Vol. 28 (1). hlm 124--147. DOI: 10.34309/jp.v28i1.788.

BBC News Indonesia. 2022. "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" diakses pada 10 Juli 2023, di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691.

Calhoun, E. M. & MacKinnon, C. A. 1990. "Toward a Feminist Theory of the State", *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 11(2--3), hlm. 120--121. https://doi.org/10.2307/3346836.

Carvajal, A. E. 2020. "Covid-19 and the Limitations of Official Responses to Gender-Based Violence in Latin America: Evidence from Ecuador", *Special Issue: Covid-19 in Latin America and the Caribbean*, Vol. 39 (1), hlm. 7--11. https://doi.org/10.1111/blar.13188.

Conaghan, J. 2013. *Law and Gender*. Oxford University Press: Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199592920.001.0001.

Cotterrell, R. 2017. *Law, Culture and Society: Legal Ideas In the Mirror of Social Theory*. Routledge: London.

Dhewy, A. & Sandiata, B. 2019. "Kebaruan Politik dan Hukum sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT", *Jurnal Perempuan,* Vol. 24 (1), hlm. 77--87. DOI: 10.34309/jp.v24i1.313.

Eddyono, S. W. 2021. "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5(2), hlm. 176–201. https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011.

Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti. 2021. "Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia", *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 9(1), hlm 103–140. https://doi.org/10.21043/QIJIS.V9I1.8029.

Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. 2021. "Sexual Violence In Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 7(2), hlm. 153--167. https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869.

Friedman, L. M. 1969. "Legal Culture and Social Development", *Law & Society Review*, Vol. 4(1), hlm. 29--44. https://doi.org/10.2307/3052760.

Harahap, Z. A. A. & Hasibuan, Z. E. 2022. "The Dominance of Islamic Law over Customary Law in Indonesia in Marriage Law", *Italienisch*, Vol. 12, hlm. 868--873. http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/257.

Hayati, E. N. et al. 2013. "'Elastic Band Strategy': Women's Lived Experience of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia", *Global Health Action*, Vol. *6*, hlm. 1–12. https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.18894.

Herawati, R., Purwanti, A., & Pinilih, S. A. G. 2023. "The Bill Elimination on Sexual Violence: Importance for Indonesian Women", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10(2014), hlm. 687–694. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.81.

Hlavka, H. R. 2014. "Normalizing Sexual Violence", *Gender & Society*, Vol. 28(3). https://doi.org/10.1177/0891243214526468.

Hodgson, D. L. 2017. "Gender, Justice, and the Problem of Culture: From Customary Law to Human Rights in Tanzania", *Gender, Justice, and the Problem of Culture: From Customary Law to Human Rights in Tanzania*, hlm. 204. https://doi.org/10.2307/j.ctt2005s9m.

Kamilla, A. L. 2021. "Preventing the Wrongful Criminalization of Online Gender-based Violence Victims: A Look into Law No. 44 of 2008 on Pornography", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2(1), hlm. 32--40. https://doi.org/10.22146/jwk.2241.

Klugman, J. 2017. "Gender Based Violence and the Law", *World Development Report*, diakses pada 11 Juli 2023, di https://thedocs.worldbank.org/en/doc/232551485539744935-0050022017/original/WDR17BPGenderbasedviolenceandthelaw.pdf.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2021. "CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", diakses pada 11 Juli 2023, di https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19.

Lon, Y. S. & Widyawati, F. 2021. "Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage in Manggarai, Eastern Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 9(1). https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510.

Lykke, N. 2010. *Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing*. Routledge: New York.

Manullang, S. O. 2021. "Understanding the Sociology of Customary Law In the Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia", *Linguistics and Culture Review*, Vol. 5(S3). https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns3.1352.

Maryam, R. 2017. "Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14(4), hlm. 383–394. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/113.

Marye, S. & Atav, S. 2022. "Global Policies to Reduce Pandemic Intensified Violence against Women", *Nursing and Health Policy Perspective*, Vol. 39 (6), hlm. 1300--1307. https://doi.org/10.1111/phn.13099.

Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. 2016. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.77.

Nirmalasari, A. & Sarwono, B. 2021. "Symbolic Violence Manifestation Behind Victim Blaming Practice", *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, Vol. 558, hlm. 26--33. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.004.

Nurmalasari, N. C. & Waluyo, W. 2022. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Souvereignty*, Vol 1(1), hlm. 57--67.

Poerwandari, E. K., Munti, R. B., & Viemilawati, J. 2018. "Pro-women's Policy Advocacy Movements in Indonesia: Struggles and Reflections", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 24(4), hlm. 489–509. https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1538646.

Priambodo, B. B. 2018. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law", *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 2(2). https://doi.org/10.24843/ujlc.2018.v02.i02.p02.

Ramazanoglu, C. & Holland, J. 2002. *Feminist Methodology Challenges and Choices*. SAGE Publications Ltd: UK.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Rollero, C. & Tartaglia, S. 2019. "The Effect of Sexism and Rape Myths on Victim Blame", *Sexuality and Culture*, Vol. *23*(1). https://doi.org/10.1007/s12119-018-9549-8.

Rottach, B. & Gribble, J. 2020. "Four Actions to Change Gender Biases and Improve Policy Implementation", *Propel Health Project*, diakses pada 11 Juli 2023, di https://propel-health-project.medium.com/four-actions-to-change-gender-biases-and-improve-policy-implementation-7729f1e60db.

Saraswati, R. 2020. "Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence In Making the Decision to Divorce", *Identities*, Vol. 27(5), hlm. 557–573. https://doi.org/10.1080/1070289X.2019.1600313.

Silbey, S. S. 2019. "The Every Day Work of Studying the Law in Everyday Life", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. *15*, hlm. 1--8. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113326.

Sigiro, A. N. & Takwin, B. 2021. "Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'", *Jurnal Perempuan,* Vol. 26(02), hlm 143--158. DOI: 10.34309/jp.v26i2.595.

Smyth, C., Cullen, P., Breckenridge, J., Cortis, N., & Valentine, K. 2021. "Covid-19 Lockdowns, Intimate Partner Violence and Coercive Control", *The Australian Journal of Social Issues*, Vol. 56(3), hlm. 359–373. https://doi.org/10.1002/ajs4.162.

UN Women. 2021. "UN Women Impact Stories: Ending Violence against Women", *unwomen.org*, diakses pada 12 Juli 2023, di https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/11/brief-un-women-impact-stories-ending-violence-against-women.

Wariyatun, W. 2019. "Creating Zero Tolerance for Violence against Women", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 25(3), hlm. 459–467. https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1638047.

World Health Organization (WHO). 2013. "Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women WHO Clinical and Policy Guidelines", *iris.who.int*, diakses pada 13 Juli 2023, di https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85240/9789241548595_eng.pdf?sequence=1.

Zahwa, A. M. 2021. "Challenging the Patriarchal Barriers: The Role of Women Activists and their Advocacy for Domestic Violence in Semarang City, Central Java", *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 26(1), hlm. 85–103. https://doi.org/10.7454/mjs.v26i1.13518.

Zurnetti, A. & Muliati, N. 2022. "Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement Through Restorative Justice", *Cogent Social Sciences*, Vol. 8(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2090.

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 29 No. 1, 2024, 59—73
copyright @ 2024 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v29i1.984
DDC: 305

Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat

Building "Safe Spaces": Indigenous Women and Sexual Violence in Indigenous Communities

Melya Findi Astuti[1], Tracy Pasaribu[2], & Widya Anggraini[3]

KEMITRAAN Partnership for Governance Reform[123]
Jalan Taman Margasatwa 26C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550[123]

melya.findi@kemitraan.or.id[1], tracy.pasaribu@kemitraan.or.id[2], & widya.anggraini@kemitraan.or.id[3]

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

Sexual violence in indigenous communities occurs because of the social structure, namely the existence of layers that have different levels and authority in indigenous communities. This condition causes certain groups to feel entitled to commit violence against other groups. Apart from that, unequal power relations are one of the roots of problems in indigenous communities, which means that victims do not have the power to fight back and defend themselves. Women, children, and people with disabilities are groups that often experience violence, this is because there is no space in traditional communities that provides a sense of security and justice for them. This journal reviews the need to know the forms of violence in traditional communities so that we can then answer the challenges of solving the problem of sexual violence in traditional communities. Through research using ethnographic methods for 3 months, it was concluded that safe spaces can be a solution in overcoming sexual violence in indigenous communities through participation in four stages, namely: participation in decision making in the community including development planning, participation in prevention and recovery programs, participation in the education of traditional leaders , village, and key opinion leader (KOL), KOL as well as the participation of indigenous communities in the program evaluation.

Keywords: indigenous women, indigenous community, sexual violence, safe place, social protection, indigenous law

Abstrak

Kekerasan seksual di masyarakat adat terjadi karena tatanan sosial yaitu adanya lapisan-lapisan yang menunjukkan tingkat kewenangan yang berbeda di komunitas adat. Kondisi ini melatari kelompok tertentu merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Adanya ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu akar masalah di masyarakat adat yang menyebabkan korban tidak berdaya untuk melawan dan membela diri. Perempuan, anak, dan disabilitas merupakan kelompok yang sering kali mengalami kekerasan. Hal ini karena tidak adanya ruang dalam komunitas adat yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka. Artikel ini mengulas bentuk-bentuk kekerasan di komunitas adat dan berbagai tantangan dalam mencari solusi atas persoalan kekerasan seksual di komunitas adat. Melalui penelitian dengan metode etnografi selama 3 bulan, disimpulkan bahwa Ruang Aman dapat menjadi solusi dalam mengatasi kekerasan seksual di masyarakat adat melalui partisipasi empat tahapan, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di level komunitas termasuk perencanaan pembangunan; partisipasi dalam program pencegahan kekerasan dan pemulihan; partisipasi dalam mengedukasi pemimpin adat/desa/opini tetua adat (KOL), serta partisipasi komunitas adat dalam mengevaluasi program.

Kata kunci: perempuan adat, masyarakat adat, kekerasan seksual, ruang aman, perlindungan sosial, hukum adat

Pendahuluan

Persoalan perempuan adat perlu mendapatkan sorotan khusus ketika kita membicarakan persoalan masyarakat adat. Perempuan adat kerap diidentikkan atas tiga hal, yaitu penjaga pengetahuan atas kedaulatan pangan dalam keluarga dan komunitas, pemegang otoritas atas keberlangsungan sumber-sumber penghidupan bagi keluarga dan komunitas, serta sebagai pengampu wilayah kelola perempuan adat yang berkaitan erat dengan sumber penghidupan keluarga dan komunitas. Peran mereka ini menunjukkan bahwa para perempuan adat memiliki pemahaman atas keanekaragaman tanaman lebih luas dibanding laki-laki (Lope-Alzina 2020). Namun sayangnya, perhatian atas kebutuhan perempuan adat terabaikan dalam praktiknya. Mereka lebih rentan terhadap kekerasan akibat tidak adanya pemahaman berbasis gender dalam tingkat pengambilan keputusan—baik dalam aturan adat maupun di tingkat negara.

Perempuan dan anak perempuan adat menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang kompleks dan bersifat

interseksional, terkait dengan struktur patriarki, diskriminasi ras dan etnis, serta status sosial ekonomi. Bukti dari berbagai negara yang dilaporkan oleh *Human Rights Counci*l yang disiapkan oleh Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adat (*violence against indigenous women and girls*) menunjukkan bahwa perempuan adat sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang serius, seperti sterilisasi paksa, perdagangan manusia dan kekerasan seksual dalam konteks pengungsian atau migrasi, perdagangan manusia, pembunuhan terkait gender atau "demi kehormatan", pemindahan paksa, penculikan, kerja paksa, praktik tradisional yang berbahaya, dan kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik (IASG 2014).

Tindakan-tindakan kekerasan ini dilakukan oleh banyak aktor, antara lain negara, perusahaan swasta, kelompok kriminal, anggota komunitas adat, bahkan anggota keluarga. Kekerasan ini sebagian besar didorong oleh keinginan untuk menduduki dan mengendalikan wilayah dan sumber daya adat serta militerisasi yang menyertai upaya tersebut. Rangkaian kekerasan struktural pada keseharian hidup masyarakat adat juga berdampak pada kehidupan perempuan masyarakat adat. Pengalaman kebertubuhan mereka terabaikan akibat struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada kelas kedua. Hal ini mengakibatkan perempuan adat menjadi korban sehingga berimplikasi negatif pada pemenuhan hak asasi mereka (Corpuz 2015).

Salah satu contoh nyata adalah konflik yang terjadi akibat pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Rencana pembangunan tersebut berdampak pada warga di 3 (tiga) desa yang akan kehilangan rumah dan ladang/lahannya. Pada kasus ini, perempuan adat berada di garda terdepan menolak pembangunan waduk karena merasa mengalami kriminalisasi akibat kebijakan nonpartisipatif yang lebih bertujuan investasi. Demikian pula kasus penambangan pasir besi oleh satu perusahaan di Serawai Pasar Seluma, Bengkulu. Penambangan yang terjadi sejak tahun 2010 ini ditolak perempuan-perempuan adat karena berlokasi di wilayah adat serta telah merusak hutan adat (Sepriandi 2024). Dampak utamanya bagi perempuan adalah kehilangan ruang hidup baik untuk bermukim maupun berladang. Lebih dari itu, perempuan mengalami bertambahnya beban ganda karena bukan hanya menyediakan pangan untuk keluarga, namun juga dituntut mengedukasi perempuan muda agar memiliki pengetahuan tentang adat mereka. Ancaman atas kehadiran penambangan adalah mereka tidak lagi memiliki ruang-ruang untuk menegakkan dan mengembangkan yang sudah turun-temurun dijalani.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan adat jarang dilaporkan sehingga para pelaku sering kali mendapatkan impunitas—terutama ketika pelaku adalah mereka yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat adat. Contoh kasus di Desa Malancan, Kepulauan Mentawai yang desanya sudah memiliki peraturan desa dalam penanganan kekerasan seksual. Pemberian denda adat sebagai sanksi ternyata tidak membuat jera seketika, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki kekuatan seperti tetua adat atau tuan tanah (KEMITRAAN 2023).

Perempuan dan anak perempuan adat menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses keadilan, baik dalam komunitas mereka atau melalui lembaga-lembaga negara karena adanya diskriminasi, bias, ketakutan akan stigmatisasi, hambatan bahasa, dan risiko menjadi korban kembali. Dalam konteks ini, ketika mengalami kekerasan, perempuan dan anak perempuan adat tidak menerima proses pemulihan yang layak. Mereka juga menderita dampak trauma yang jika tidak ditangani, akan diteruskan ke generasi berikutnya (Raphael et al. 1998; Duran et al. 1998).

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di ranah personal dan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban atau dilakukan dalam relasi atau tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dari kekerasan (Komnas Perempuan 2023). Terkait hal tersebut, dalam FGD yang dilakukan dalam rangka menyusun Kertas Kerja Ruang Aman KS oleh KEMITRAAN serta hasil riset KS juga ditemukan bahwa pelaku adalah orang-orang terdekat korban, paman, saudara kandung termasuk orang yang dituakan dalam masyarakat adat. Pemulihan menjadi tantangan sendiri karena minimnya dukungan terhadap korban baik dari keluarga maupun komunitas.

Ada persoalan interseksional—sebagai bentuk irisan diskriminasi yang saling berhubungan antar banyak variabel kehidupan seseorang terkait identitasnya (Crenshaw 1989)—dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak perempuan adat dengan identitas atau karakteristik yang beragam. Ini terjadi pada situasi ketika perempuan dan anak perempuan adat yang tinggal jauh dari kampung halaman atau di daerah yang jauh dari kota-kota besar.

Salah satunya contoh kasus kekerasan seksual (KS) terhadap anak perempuan adat yang bersekolah di Ibu kota kabupaten yang diselesaikan dengan melalui mekanisme adat, yaitu denda sebesar 30 juta rupiah. Meski telah diselesaikan secara adat, namun jaringan koalisi di Sumatera Barat tetap membawanya ke ranah hukum (Hasil catatan lapangan dan wawancara dengan YCMM).

Perempuan adat dengan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan. Sebuah studi di Nepal pada tahun 2021 terhadap 210 perempuan adat baik penyandang disabilitas maupun nondisabilitas menunjukkan bahwa perempuan adat penyandang disabilitas mempunyai risiko kekerasan yang lebih tinggi. Hal ini karena adanya stigma negatif atas disabilitas dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan adat dan penyandang (NIDWAN 2023).

Untuk memahami terjadinya kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang sistematis, perlu menggunakan pendekatan interseksionalitas. Pendekatan ini mengajak kita untuk memahami bahwa pengalaman individu/kelompok berbeda dengan kelompok lainnya. Misalnya, pengalaman perempuan penyandang disabilitas berbeda dari kategori perempuan nondisabilitas pada umumnya. Hal ini juga akan berbeda lagi bagi perempuan yang berasal dari kelompok agama masyarakat atau etnis minoritas dan semua ini akan dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi perempuan (berdasarkan data olahan INKLUSI).

Diskriminasi terhadap masyarakat adat banyak terjadi karena persinggungan dengan gender, disabilitas, dan status dalam masyarakat adat. Kurangnya akses pendidikan juga dapat mengakibatkan hambatan bagi perempuan dan anak perempuan adat penyandang disabilitas dalam mengenali, mendefinisikan, dan menggambarkan kekerasan yang mereka hadapi (NIDWAN 2023). Selain itu, perempuan dan anak perempuan adat dapat mengalami hambatan dan kekerasan di dalam komunitasnya dan juga dapat menghadapi kekerasan dari aktor negara atau nonnegara di luar komunitas. Namun, hal ini tergantung pada karakter komunitas adat dan wilayahnya. Dalam komunitas tertentu, keberagaman orientasi seksual dan identitas gender dapat diterima komunitas adat, seperti keragaman gender dalam masyarakat Bugis di Sulawesi yang mengakui adanya lima gender—termasuk keberadaan *Bissu* yang dianggap memiliki kekuatan mistik dan berperan banyak dalam upacara adat Bugis (Suliyati 2018).

Penting untuk membedakan antara kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adat dan kekerasan berbasis gender yang menargetkan masyarakat adat secara keseluruhan (Koukkanen 2012). Hal ini terkait dengan pengakuan hak atas perempuan adat sebagai individu dan hak kolektif sebagaimana sudah diakui dalam The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) bahwa perempuan dan laki-laki adat adalah setara dan terjadinya kekerasan terhadap perempuan adat merupakan bukti terjadinya kegagalan pendekatan dalam memahami Hak Asasi Manusia. Saat ini, belum banyak yang melihat secara lebih detail apa yang dialami perempuan dan anak perempuan adat ketika mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang bersinggungan dengan identitas individu dan identitas kolektif mereka, khususnya bagaimana perempuan adat dan anak perempuan adat mengalami diskriminasi sistemik dalam sistem peradilan adat dan non-adat serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses keadilan yang efektif.

Keberadaan institusi pemerintah belum memberikan jaminan terlindunginya perempuan dari kekerasan karena masih bias gender. Sebagai perbandingan, di Papua, lembaga negara hanya menangani kasus yang dilaporkan dan belum proaktif dalam proses penyelidikan juga penyidikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kepolisian sebagai pihak pertama yang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga belum memberikan prioritas kasus terkait KS. Sementara itu, lembaga adat hanya memberikan sanksi berupa denda dan cenderung merugikan korban dan membatasi keinginan korban melanjutkan kasus kekerasan ke peradilan formal (Pona & Wahyuni 2002).

Pada konteks Indonesia, tidak banyak literatur yang berfokus pada kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat adat. Artikel ini berusaha untuk melakukan identifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual pada masyarakat adat dan melakukan analisa terhadap akar masalah terjadinya kekerasan seksual dalam masyarakat adat. Analisis ini mengarah pada upaya menemukan definisi atas "ruang aman" yang sesuai dengan konteks pada masyarakat adat. KEMITRAAN telah menyelesaikan Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual yang disusun berdasarkan tutur pengalaman para pendamping adat, akademisi, wawancara para ahli dan lembaga riset, studi literatur, dan data pendukung sekunder lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini telah diawali dengan penyusunan Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual pada tahun 2022 melalui FGD dengan pendamping lapangan dari 10 organisasi masyarakat sipil di 7 provinsi yang mendampingi masyarakat adat di 42 desa. Dalam proses penyusunannya telah dilakukan wawancara dengan akademisi, studi literatur, dan *review* terhadap 3 kebijakan yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA). Diskusi tersebut menemukan benang merah bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas adat merupakan praktik kekerasan berbasis gender (KBG) yang sudah langgeng terjadi di masyarakat adat. Kertas Kerja ini sudah disosialisasikan dan memperoleh banyak masukan terkait perlunya dilakukan riset terkait KS dalam lingkup masyarakat adat, khususnya yang menyoroti perempuan adat.

Kemudian KEMITRAAN melanjutkan usulan dari banyak pihak dengan melakukan riset etnografi bersama Laboratorium Antropologi (LAURA) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diselesaikan pada bulan Desember 2023. Riset ini mengambil dua lokasi, yaitu Desa Wangga Meti, Kecamatan Matawai La Pawu, Sumba Timur dan Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai. Metode riset yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan antropologi fenomenologi, etnosains, dan rasa-pengalaman (*senses-experience*). Proses penelitian lapangan dilakukan selama 3 bulan. Tiga peneliti lapangan tinggal di desa lokasi penelitian dan hidup bersama mereka. Ini termasuk mengikuti aktivitas sehari-hari masyarakat yang diteliti (partisipasi-observasi) dan melakukan wawancara etnografis (tidak terstruktur dan informal) dengan korban kekerasan seksual dan tetua adat/tokoh masyarakat.

Pemilihan 2 lokasi didasarkan pada perbedaan karakteristik 'hukum adat', kondisi geografi, dan status perempuan di tiap masyarakat. Perbedaan karakteristik ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menemukan perbedaan cara pandang (*ethnographic semantics*) dan rasa-pengalaman (*sense-experience*) masyarakat adat mengenai kekerasan seksual dan relasi sosial-kultural yang melingkupinya (Sturtevant 1964; Perchonock & Werner 1969; Ahimsa-Putra 1985). Riset ini mengidentifikasi bahasa lokal atau istilah yang berhubungan dengan kekerasan seksual sehingga akan terlihat pengetahuan khas masyarakat itu sendiri. Pandangan atau pengetahuan khas ini yang kemudian diperbandingkan antara dua komunitas yang diteliti. Pemilihan masyarakat adat di Desa Wanggameti, Sumba Timur karena masih menggunakan hukum adat terutama untuk penyelesaian kekerasan seksual. Desa Malancan di Kepulauan Mentawai dipilih karena telah memformulasikan hukum adat dalam peraturan desa serta mewakili karakteristik masyarakat adat yang ada di pesisir dan pulau terpencil.

Penelitian ini juga melakukan klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dengan pendekatan etnosains untuk mengungkap pandangan masyarakat adat terhadap kekerasan seksual. Bidang kajian penelitian etnosains berupaya memusatkan perhatian pada kebudayaan yang didefinisikan sebagai suatu bentuk yang ada dalam pikiran orang. Kemudian memunculkan sebuah persepsi, dalam hal ini ditafsirkan sebagai model untuk mengklasifikasi situasi sosial yang dihadapi (Sudarmin 2014). Pendekatan ini berupaya untuk mengetahui isu-isu sosial yang dianggap penting oleh warga sebuah masyarakat dan bagaimana mereka mengorganisir isu-isu tersebut dalam sistem pengetahuan asli masyarakat (*indigenous science*). Etnosains sendiri berfokus pada sistem pengetahuan dari masyarakat itu sendiri yang diekspresikan melalui bahasa/ujaran lokal (Sturtevant 1964; Perchonock & Werner 1969; Ahimsa-Putra 1985).

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat

Kekerasan seksual secara harfiah diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk komentar seksual maupun rayuan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan dan dalam situasi apa pun hingga sentuhan maupun paksaan secara fisik terhadap seksualitas seseorang. Kekerasan seksual mencakup sejumlah bentuk tindakan seksual nonkonsensual yang tidak diinginkan baik dalam bentuk komentar, ciuman, sentuhan seksual pada bagian tubuh, masturbasi paksa, percobaan pemerkosaan, dan pemerkosaan (Martiany 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual dijelaskan sebagai bentuk perilaku yang meliputi 9 bentuk kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual

fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam riset yang dilakukan oleh KEMITRAAN bersama LAURA UGM, dirumuskan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat adat. Bentuk-bentuk kekerasan ini kemudian digolongkan menjadi tiga bentuk kategori berdasarkan metode pendekatan etnosains, yaitu (a) kekerasan seksual berat; (b) kekerasan seksual menengah; dan (c) kekerasan seksual ringan. Kategori seksual berat digambarkan sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang organ intim perempuan, dalam arti terjadi pemaksaan alat kelamin yang tidak dikehendaki. Sementara kekerasan seksual dikategorikan sebagai menengah dan ringan apabila kekerasan yang dilakukan tidak menyerang fisik seseorang. Sementara yang dimaksud dengan bentuk kekerasan menengah dan ringan yang ditemui adalah perselingkuhan karena bentuk kekerasan seksual ini dianggap dapat merusak rumah tangga dan berdampak pada poligami serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual secara verbal, pengintaian, dan kawin lari (contoh Kawin Tangkap di Sumba Timur). Pengategorian ini dilakukan berdasarkan pengalaman perempuan adat yang dirumuskan dalam hasil penelitian yang dilakukan KEMITRAAN bersama LAURA UGM.

Riset KEMITRAAN bersama LAURA UGM yang dilakukan pada bulan September--November 2023 lalu menggali bentuk-bentuk kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat adat, yaitu Sumba Timur dan Mentawai. Dari kedua lokasi ini, bentuk kekerasan seksual yang terjadi kemudian dikategorikan menjadi tiga kategori seperti disebutkan di atas dan setiap wilayah memiliki istilahnya masing-masing.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

No.	Lokasi	Bentuk Kekerasan Seksual Berat	Bentuk Kekerasan Seksual Menengah	Bentuk Kekerasan Seksual Ringan
1.	Mentawai	Pemerkosaan yang dalam Bahasa setempat disebut dengan *Katotembai*	• Perselingkuhan – *Katoratcak*	• Pelecehan seksual verbal - *Katokailo*
2.	Sumba Timur	Pemerkosaan yang dalam Bahasa setempat disebut dengan *Paputa Rambang/Panjalu Dangu*	• KDRT – *Papalu* • Perselingkuhan – *Kiikau*	• Pengintaian • Umpatan verbal • Kawin lari

Sumber: Data diolah berdasarkan riset KEMITRAAN dan LAURA UGM tentang kekerasan seksual di masyarakat adat dan etnis minoritas

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan selama kurun waktu 15 tahun (1998--2013), tercatat sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2023). Dalam instrumen modul dan referensi pemantauan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, disebutkan 15 bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Melihat dari kategori yang dirumuskan dari hasil penelitian yang dilakukan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini sebagian besar masuk dalam kategori kekerasan seksual berat.

Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Budaya Kekerasan Seksual

Hasil riset kekerasan seksual pada masyarakat adat ini merupakan langkah lanjutan dari Kertas Kerja yang disusun KEMITRAAN pada tahun 2022--2023. Kertas Kerja ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam masyarakat adat serta memberikan rekomendasi atas ketiga perundangan, yaitu KUHP, RUU Masyarakat Adat, dan UU TPKS. Kertas Kerja ini disusun berdasarkan tuturan pengalaman dan pengetahuan para pendamping, FGD ahli, dan data sekunder pendukung untuk mengonstruksi kebutuhan perempuan adat. Metode penyusunan kertas kebijakan ini dilakukan dengan meninjau ketiga perundangan tersebut.

Kertas Kerja ini juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender (KBG). Dikutip dari dokumen Kertas Kerja, Jeanne Ward menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender itu sendiri (Nafi et al. 2016). Secara detail, hal tersebut diuraikan sebagai segala bentuk kejahatan seksual yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan berdampak negatif terhadap kesehatan fisik atau fisiologis, perkembangan, dan identitas seseorang. Hal ini merupakan akibat dari ketidakadilan gender yang mengeksploitasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak perempuan, KBG pada dasarnya memengaruhi mereka di semua budaya. Kekerasan dapat bersifat fisik, fisiologis, ekonomi, dan sosiokultural.

Temuan dari riset ini menunjukkan tingginya kekerasan seksual dalam masyarakat adat dipengaruhi oleh hierarki sosial dan ketimpangan kekuasaan yang disebabkan oleh sistem adat dan kekerabatan—berbasis kelas, gender, dan material kekayaan yang dimiliki. Riset ini juga menemukan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di ruang privat yang disebabkan oleh adanya perubahan organisasi sosial dari yang berbentuk komunal ke dalam keluarga inti yang tinggal dalam rumah yang relatif berjauhan.

Kertas Kerja KEMITRAAN menilai bahwa permasalahan kompleks terkait pencegahan dan perlindungan perempuan adat belum muncul dalam UU TPKS (KEMITRAAN 2023). Undang-Undang ini belum memberikan ruang kekhasan masyarakat adat terkait kekerasan seksual. Misalnya, prinsip harmonisasi antara manusia dan alam sekitarnya dalam keseharian serta peran laki-laki dan perempuan dalam penyelesaian kasus, restitusi, lembaga, dan peradilan adat. Lembaga adat dan peradilan adat memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus di tingkat kampung karena jaraknya dekat, dinilai murah, dan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Meski demikian, sistem keadilan informal seperti hukum adat cenderung bias perempuan karena perempuan memiliki modal politik yang kecil sehingga perlindungan terhadap perempuan dianggap kecil dan bahkan diabaikan demi menjaga keharmonisan komunal (World Bank 2008). Untuk itu, menemukan "ruang aman" perempuan dari kekerasan seksual masih menjadi tantangan. Walaupun telah ada beberapa masyarakat adat yang mempraktikkan upaya mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan, namun hal ini perlu lebih banyak digali dan disinergikan dengan UU TPKS serta peraturan turunannya.

Temuan riset yang dilakukan, tidak hanya menemukan satu-dua kasus saja berdasarkan penuturan perempuan adat setempat. Selama tiga bulan pengambilan data, terdapat 15 kasus kekerasan yang diceritakan oleh perempuan adat di Sumba dan Mentawai serta tidak menutup kemungkinan terdapat kasus lain yang tidak diceritakan karena ada rasa segan dan takut. Rasa takut dan enggan bercerita, pada kenyataannya dapat memicu langgengnya budaya perkosaan.

Budaya perkosaan dilihat sebagai fenomena ketika tindakan pemerkosaan dianggap sebagai hal wajar bagi masyarakat. Widiantini (2021) dalam artikelnya berjudul *Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis* menyebutkan bahwa budaya perkosaan mengindikasi penandaan atas perilaku yang tersirat atas "perkosaan" yang dianggap seperti bagian wajar dalam kehidupan sosial. Pewajaran dalam budaya perkosaan ini juga diartikulasikan Dianne Herman bahwa budaya perkosaan merupakan dominasi asosiasi budaya antara kekerasan dan seksualitas sehingga hubungan heteroseksual didasarkan pada model seksualitas pemerkosaan (Herman 1989).

Melihat uraian di atas, dikutip dari laman organisasi 11th Principle Consent digambarkan ilustrasi piramida budaya perkosaan (Cervix & Chandra 2018) yang menjelaskan bentuk-bentuk dari bagaimana budaya perkosaan terjadi melalui tiga tingkatan (dari bawah ke atas): normalisasi, merendahkan, hingga kekerasan atau serangan. Kita bisa perhatikan pada salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumba Timur:

> "Korban diperkosa oleh pangkat (kerabat) bapaknya sendiri. Pelaku adalah mantan kepala desa. Kejadian ini berlangsung tahun 2014/2015. Kejadian ini sempat heboh karena PPPA dan kepolisian turun tangan menangani kasus ini. Pelaku dikabarkan bahkan mengancam keluarga korban, menyuap perangkat desa, polsek, dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini dengan hewan. Mantan kepala desa ini adalah orang yang sangat disegani karena dituakan, memiliki banyak hewan, anak dalam rumah (ata) meskipun tidak tinggal dalam satu rumah. Kejadian ini diawali saat ibu kandung korban dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Setelah membunuh, korban diperkosa. Kerabat terdekat yang mengetahui hal ini melaporkan kepada kepolisian setempat untuk kasus pembunuhan. Sementara korban lari ke rumah Kepala Desa saat itu untuk mendapat perlindungan. Namun, selama tinggal di rumah kepala desa, ia justru diperkosa/dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Korban pun lari ke rumah tetangga dan menceritakan kejadian itu. Tetangga yang mendengar lapor ke Majelis Gereja dan kemudian dilaporkan ke polisi. Korban didampingi oleh NGO lokal selama proses pemeriksaan, hingga akhirnya Kepala Desa tersebut dijatuhi hukuman 15 tahun penjara

untuk pemerkosaan anak di bawah umur" (Laporan Riset Estungkara 2023).

Dari kasus di atas bisa tercermin cara kerja budaya perkosaan ketika korban berupaya mencari ruang aman dan perlindungan. Korban justru mengalami perkosaan berulang dari pihak yang memiliki kuasa di wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya pelaku mendapat hukuman penjara berkat pihak-pihak yang membantu dalam proses pelaporan dan penanganan, yaitu pihak gereja dan tetangga korban. Namun, kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku yang notabene kepala desa, merasa memiliki wewenang dan kuasa sehingga ia menyalahgunakan posisinya untuk kepentingannya. Pelaku seakan menormalisasi tindakannya dengan melakukan perkosaan terhadap korban meski korban tengah mencari perlindungan.

Perkosaan bukan lagi merupakan perwujudan dominasi hasrat seksual, namun ada peran timpangnya relasi kuasa yang berusaha ditanamkan (Widiantini 2021)—dalam kasus di masyarakat adat berada pada perlakuan kepala desa kepada korban. Pelaku ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kuasa atas korban. Budaya perkosaan adalah kultur yang dibangun dari dominasi relasi dan kekuasaan ini. Perkosaan bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sebuah simbol dominasi (Widiantini 2021).

Berbicara mengenai budaya perkosaan, dalam salah satu kasus yang ditemukan di Sumba Timur antara kaum *maramba* (tuan) dengan *ata* (hamba/budak). Ketika kasus perkosaan dialami oleh seorang *ata*, tidak ada upaya perlindungan yang diberikan. Bahkan kejadian perkosaan yang dialami oleh seorang *ata* kerap dibiarkan terjadi karena justru akan dilihat sebagai keuntungan bagi kaum *maramba* karena akan menambah jumlah pekerja apabila *ata* tersebut hamil.

Dalam konteks masyarakat adat, merujuk pada hasil riset ini serta pengalaman pendampingan program yang dilakukan sejak 2022, banyak ditemui jumlah kasus bahwa korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru dipersalahkan. Seperti contoh kasus yang terjadi di Sumba Timur, seorang istri dianggap wajar mendapatkan KDRT karena tidak dapat memberikan anak dan seperti di Mentawai seorang anak dipersalahkan karena dianggap menggoda kakek-kakek, dan seterusnya. Bentuk-bentuk penyalahan korban yang ditemukan dalam hasil penelitian ini yang kemudian terus akan melanggengkan budaya perkosaan. Banyak faktor yang menyebabkan budaya perkosaan ini terus terjadi yang kemudian membentuk persepsi pelaku, yaitu relasi kuasa dan juga stereotip gender.

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan menegaskan bahwa persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap korban. Ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud bukan terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Ketimpangan makin besar dirasakan ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban (umumnya perempuan). Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan penghargaan masyarakat (status sosial), serta modal sosial. Selain itu, kendali juga terjadi dari adanya bentuk hubungan *patron-klien* atau pola feodalisme, seperti antara orang tua--anak, majikan--buruh, tokoh masyarakat—warga, dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil (Martiany 2017). Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan menegaskan bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan atau ekonomi. Artinya, ada dominasi kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya yang dalam konteks relasi gender akan merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, yang umumnya adalah perempuan.

Salah seorang korban pemerkosaan di Sumba Timur mengatakan bahwa banyak kejadian pemerkosaan yang dilakukan kaum *maramba* (tuan) atau bapa tinggal (ayah angkat) kepada *ata* (hamba/budak) atau anak tinggal (anak angkat), namun dibiarkan saja oleh keluarga korban dan masyarakat di sekitarnya. Korban dan keluarganya tidak berdaya karena tidak memiliki uang dan kenalan/koneksi untuk melawan pelaku yang biasanya selain memiliki tanah dan uang banyak juga memiliki relasi dan kenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Namun, relasi kuasa di masyarakat adat juga muncul dalam bentuk lain yaitu adanya dominasi kekuasaan yang berpusat di beberapa tokoh tertentu. Pada masyarakat Sumba Timur, pendeta dari penghayat kepercayaan Marapu menjadi pemimpin dalam ritual upacara keagamaan. Sementara untuk kehidupan sehari-hari dan harmonisasi antar warga, tokoh adat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Tokoh adat berasal dari semua golongan

masyarakat adat, baik dari *ata* (hamba) maupun *maramba* (bangsawan). Namun, diketahui secara umum bahwa golongan *maramba* memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan pada warganya, termasuk memberi jalan keluar pada masalah warga. Mereka menjadi pihak yang dicari warga untuk berkeluh kesah atau dimintai saran. Riset ini mengungkapkan bahwa umumnya golongan *maramba* memiliki banyak tanah yang kemudian berujung pada jaringan yang luas akibat aktivitas pertanian dan perdagangan yang mereka lakukan. Bangsawan memiliki koneksi yang dekat dengan pejabat pemerintah di desa hingga kabupaten/kota, gereja, dan tak jarang mereka sendiri yang kemudian memiliki posisi penting di desa maupun institusi keagamaan tersebut.

Pada masyarakat adat Mentawai, tidak jauh berbeda. Setiap suku akan memiliki tokoh-tokoh adatnya dan walaupun sebutan atau bahasa lokal berbeda-beda di tiap suku atau pulau, namun intinya mereka mengenal tiga tokoh adat yang penting, yaitu *Si Mabajak Lagai* yaitu orang yang tertua di tiap suku, *Rimata* yaitu kepala suku (yang diangkat oleh *Si Mabajak Lagai*), dan *Sikerei* yang memiliki fungsi sebagai tabib atau penyembuh untuk persoalan kesehatan. Warga lokal di Mentawai menceritakan bahwa zaman dahulu ada *Sikerei* yang khusus untuk persoalan politik atau keharmonisan antar warga. Namun, semenjak masuknya pembangunan dan pemerintahan, fungsi *Sikerei* ini mulai menghilang. Kepala suku inilah yang kemudian menjadi tempat melapor masyarakat jika ada persoalan dan masalah yang terjadi. Peneliti juga menemukan bahwa kepala suku merupakan orang yang sangat dikenal oleh pejabat pemerintahan dan kerap dianggap menjadi perwakilan dalam kegiatan masyarakat maupun pemerintahan. Temuan dalam riset ini akan semakin memperdalam bagaimana hubungan yang kuat antara kepala suku maupun *sikerei* sebagai tokoh adat, sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil penegak hukum (polisi).

Hal ini menjadi faktor utama pada langgengnya kekerasan seksual di masyarakat adat dan makin memperburuk nasib korban. Tim Peneliti (KEMITRAAN dan LAURA UGM) awalnya berasumsi bahwa sulitnya kasus kekerasan seksual mendapatkan penanganan hukum formal karena keterbatasan akses ke kantor polisi serta minimnya interaksi masyarakat adat dengan pejabat pemerintah yang ditengarai karena kendala bahasa dan lainnya. Namun, dari banyak cerita korban dan keluarga atas pengalaman kekerasan yang dialaminya, temuan lapangan menunjukkan justru beberapa tokoh adat juga memiliki akses yang sangat dekat dengan polisi, tokoh pemerintah bahkan hingga di level kabupaten/kota. Sebab itu, hasil akhir penyelesaian kasus berada di tangan mereka.

Kasus KSR

Dalam sebuah wawancara di bulan Oktober tahun 2023, KSR menceritakan pemerkosaan yang ia alami kepada peneliti LAURA UGM. Saat berusia 13 tahun, ia diperkosa oleh GO, kakek berumur 70 tahun. KSR sendiri merupakan penderita epilepsi dan memiliki bekas luka bakar di beberapa bagian di tubuhnya. Saat masih balita, epilepsi yang diderita KSR kambuh dan menyebabkannya terjatuh ke dalam api. KSR sendiri tidak mendapatkan penanganan medis yang cukup sehingga menyebabkan luka bakar yang serius dan lama sembuh. Perkosaan terjadi di kampung KSR dan GO tinggal, yang letaknya terisolir dan hanya dihuni 13 keluarga. Orang tua KSR setiap harinya pergi ke ladang dalam waktu yang cukup lama, dari subuh hingga menjelang malam. KSR ditinggal sendiri dan biasanya akan bermain bersama dengan adik dan cucu kandung GO. Kondisi anak dibiarkan tanpa pengawasan orang dewasa saat orang tua pergi ke ladang cukup umum terjadi di desa Malancan.

Dalam proses wawancara, KSR menceritakan kepada peneliti bahwa GO memerkosanya beberapa kali di saat orang tua KSR pergi ke ladang. Pemerkosaan dilakukan di kamar tidur dan di kamar mandi. GO biasanya akan mendatangi KSR dan memintanya untuk mencabut uban. Di saat mereka sudah berdekatan inilah, GO meraba-raba tubuh KSR dan memerkosanya. Menurut pengakuan KSR, GO juga kerap mengancamnya "jangan teriak, kalau teriak nanti mereka datang, mati kita." Ancaman yang berulang membuat KSR takut bercerita kepada orang tuanya walaupun rasa sakit yang dia rasakan. KSR kesakitan di area vagina setiap kali buang air kecil dan membasuh air. Tapi karena rasa takutnya, KSR tidak berani menceritakan kepada siapa-siapa. "Bapak dan mamak pasti marah kalau aku cerita," ucapnya.

Kasus ini mulai terbongkar saat KSR mendapat kesempatan untuk mengobati epilepsinya di Medan, menggunakan dana bantuan dari kesusteran. Dalam masa menunggu pemberangkatan, KSR pun menceritakan pemerkosaan yang dialaminya kepada salah satu suster yang bernama MA. Suster MA justru marah dan menyalahkan KSR bahkan memukulnya.

Berita ini pun diteruskan kepada orang tua KSR yang memberikan reaksi tidak jauh berbeda dengan suster MA. Ayah dan Ibunya tidak percaya cerita tersebut, juga ikut menyalahkan KSR. Mereka tidak percaya GO yang dikenal baik dan religius telah memerkosa anaknya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menghubungi MSR selaku tetua suku mereka untuk meminta pendapat akan kasus yang ada.

MSR juga memberikan respons tidak percaya pada cerita yang sampai kepadanya. MSR menyebutkan bahwa GO dikenalnya sebagai seorang abang yang baik dan tak mungkin bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh suku. MSR mengira KSR berbohong, "awalnya saya pun tidak percaya, maka dari itu saya panggil dan tanya KSR secara langsung, kan dia ini masih cucu saya juga," ucap MSR. Kendati belum percaya, MSR membantu melaporkan peristiwa yang dialami KSR ke pihak kepolisian dan meminta dilakukan visum. Setelah divisum, diketahui bahwa KSR memang menjadi korban pemerkosaan. Setelah diketahui bahwa KSR tidak berbohong dan GO bersalah, pihak suku akhirnya mendenda GO dan mencoretnya dari hak waris suku berupa tanah, ladang, dan kolam. GO juga didenda berupa babi, periuk, dan lainnya.

Menurut ibu KSR, meskipun telah diputuskan harus membayar denda adat, GO belum membayar. Dari sisi penegakan hukum formal, polisi telah menangkap GO setelah terbukti bersalah berdasarkan laporan visum. Namun, GO kemudian mencoba bunuh diri di depan kantor Desa Malancan dengan menusuk perutnya menggunakan pisau. GO kemudian dirawat di rumah sakit dan polisi pun melepaskannya dengan dalih memberikan waktu agar GO melakukan pengobatan. Saat dikonfirmasi perihal hal ini, MSR mengaku tidak percaya GO sakit karena masih sering muncul di tempat judi dan acara pesta pernikahan. Tapi selaku pimpinan suku, MSR tidak melakukan aksi apa pun yang tegas terhadap GO. MSR jelas memiliki posisi dan kewenangan untuk menagih denda--denda tersebut. Proses adat telah membuktikan bahwa GO bersalah, keluarga sudah meminta pertanggungjawaban, tetapi hukuman adat hanya tertulis di atas angin dan MSR membiarkannya. Begitupun dengan penegakan hukum formal akan kasus ini. MSR memiliki peluang dan kemampuan untuk menyampaikan kondisi GO yang sudah sehat kepada polisi untuk memberikan keadilan bagi KSR dan keluarga. Tapi hingga saat artikel ini ditulis, GO masih bebas berkeliaran.

Kasus MBJ

Pada kasus lain, ditemukan fakta bahwa MSR tidak 'menangani' setiap persoalan kekerasan seksual di sukunya dengan cara yang sama seperti kepada GO dan KSR. Respons yang berbeda diberikannya pada kasus yang menimpa MBJ, perempuan berusia 18 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dari abang tirinya. MBJ dan pelaku memiliki Ibu yang sama dan sudah tinggal terpisah cukup lama. Namun di tahun 2021, sepulang berlayar, pelaku mulai menetap di rumah MBJ. Seperti kasus sebelumnya, MBJ yang juga anak tunggal, sering ditinggal oleh orang tuanya. Pelaku mulai mendekati korban dan kerap tidur di kamar yang sama. MBJ sendiri awalnya merasa senang karena selama ini terbiasa sendiri dan kemudian mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pelaku yang sudah dianggap layaknya abang kandung. MBJ juga bercerita bahwa pelaku sering menonton video porno saat mereka bersama.

Kejadian pemerkosaan dilakukan malam hari saat orang tua MBJ masih di kebun. Pelaku mengancam akan membunuh MBJ jika dia berteriak. MBJ pun menurut dan terpaksa diam. MBJ bercerita kepada peneliti bahwa dia merasakan sakit di vagina hingga beberapa hari kemudian. Tidak berhenti di situ, pelaku kembali memerkosa MBJ setelahnya, juga pada saat orang tua MBJ masih di kebun dan tak ada orang lain di rumah. Setelah kejadian ini, MBJ menyebutkan perasaannya menjadi berubah pada pelaku. MBJ mengaku jatuh cinta kepada pelaku dan menyebut hubungan seksual yang mereka lakukan didasari oleh perasaan suka sama suka.

Perubahan fisik yang terjadi pada MBJ mulai disadari oleh ibunya, hingga akhirnya MBJ dibawa ke bidan di bulan Mei 2022 dan dinyatakan hamil 4 bulan. Pelaku dan MBJ yang sudah saling mencintai lalu kabur dan pindah ke desa lain. Di sinilah peran aktif MSR selaku ketua adat mulai terlihat. Tanpa MBJ dan pelaku sadari, MSR telah melaporkan pelaku ke polisi hingga ditangkap di desa baru tersebut. Pelaku kemudian divonis 5 tahun penjara dan masih menjalani hukumannya hingga saat artikel ini dituliskan.

MSR menjelaskan kepada peneliti bahwa tadinya ia sempat merencanakan untuk melakukan pengadilan adat namun karena pelaku dan korban melarikan diri, MSR kemudian menganggap bahwa mereka tidak menghormati adat. MSR kemudian bergerak cepat dengan menelpon polisi untuk menangkap pelaku. MSR juga menganggap bahwa anak MBJ dan pelaku

adalah aib. Saat nanti pelaku keluar dari penjara, ia mewajibkan agar anak tersebut dibawa pergi dari desa mereka dan mengikuti suku ayahnya. Anak MBJ dan pelaku bernama RC hingga saat ini tidak memiliki akta lahir karena ditolak gereja, juga tidak memiliki nama suku karena dianggap melanggar adat. Hubungan kedua orang tuanya juga tidak diperbolehkan dirajut kembali karena telah melanggar hukum adat.

Tongkat Berkepala Dua: Hukum Adat versus Hukum Formal

Dari kasus KSR dan MBJ, bisa dilihat ada perbedaan tanggapan dan tindakan dari MSR sebagai ketua adat yang berimbas besar pada nasib pelaku, apalagi korban kekerasan seksual. Dalam kasus KSR, pelaku (GO) memiliki kedekatan emosional karena berkerabat dengan MSR dan GO termasuk yang dituakan di komunitas adat. Tanggapan dan tindakan MSR menjadi tidak tegas dan penuh pemakluman kepada pelaku. GO selama ini dikenal 'religius' sehingga dianggap 'tidak mungkin melakukan pelanggaran suku'. Hal ini karena status pelaku yang dihormati di komunitasnya. Sebab itu, MSR dengan sadar membiarkan pelaku bebas dari tanggung jawab denda adat, meski sanksi tersebut merupakan ketetapan keputusan sah pengadilan adat dan diakui komunitas. Bahkan MSR pun membiarkan pelaku mangkir dari hukuman penjara dan tidak ada warga yang melaporkan ke polisi. Kasus ini menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, tidak hanya membuat korban tidak berdaya untuk melawan saat diperkosa (secara fisik, usia, dan status sosial), namun juga dalam proses penanganan kasus. Pelaku memiliki kendali yang sangat kuat karena ada relasi kekerabatan dengan MSR selaku tokoh adat sehingga GO bisa bebas dari tanggung jawab secara hukum negara (penjara) maupun hukum adat (denda adat).

Bertolak belakang dengan kasus MSR merespons sedemikian cepat dengan menghubungi polisi hingga membuat pelaku mendapat vonis 5 tahun penjara. Pelaku pemerkosaan di kasus kedua (MJB) yang berstatus "bukan siapa-siapa" di komunitas, bahkan bukan orang asli desa tersebut (pendatang) dan berasal dari suku yang berbeda. Pelaku juga tidak memiliki kedekatan kekerabatan dengan MSR dan tidak memiliki banyak tanah, harta, atau pengaruh lainnya. Hal ini menyebabkan pelaku langsung dapat ditangkap dan dipenjara. Namun di saat yang bersamaan, dapat dilihat besarnya pengaruh MSR terhadap hukum adat dan hukum formal sekaligus.

MSR menjadi begitu tegas membela keselarasan hukum adat dan kesukuan bahkan memberikan 'hukuman' atas nasib anak RC yang masih belia yang sesungguhnya tidak memiliki kesalahan apa pun. Kasus ini menunjukkan bahwa saat memasuki tahap penyelesaian kasus, korban direntankan karena tidak memiliki akses sumber daya ekonomi, pengetahuan, dan status sosial.

Kekuasaan MSR sangat besar hingga bisa menyelenggarakan pengadilan adat dan menghubungi polisi. Namun, kekuasaan ini tidak mampu memberikan keadilan saat berhadapan dengan pelaku GO, yakni orang yang dituakan dan punya nama baik di gereja, komunitas, serta memiliki kedekatan emosional dengannya. Artinya, dalam kasus kekerasan seksual, pengadilan adat maupun hukum adat 'dimainkan' oleh tetua adat, dan bergantung pada keberpihakan tetua adat. Tetua adat mampu menentukan apakah kasus kemudian dibawa ke hukum adat dan/atau ke hukum formal. Bahkan tidak mustahil kalau mereka pun mampu mengatur hasil/keputusannya. Kecenderungan inilah yang kami sebut sebagai 'tongkat sakti', yaitu tongkat keberpihakan yang dipegang oleh tetua adat, yang melalui kedudukannya, ia sangat berwenang dan mampu menentukan apakah pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman adat, hukuman formal, atau bahkan keduanya. Lebih dari itu, seberapa tajam penegakan kedua hukum tersebut pun akan sangat bergantung kepada si tetua adat ini.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, dalam kaitannya dengan hukum adat, maka kami melihat bahwa adat dan budaya justru melatari perempuan dan anak dalam komunitas adat mengalami kerentanan ganda bahkan berlipat berkenaan dengan kekerasan seksual (KS). Ada juga akar masalah lainnya, yaitu relasi kuasa yang dimainkan tokoh adat yang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi, pengetahuan, dan bahkan bisa memberikan status sosial yang tinggi bagi anggota komunitasnya—dalam konteks ini termasuk mengambil keputusan atas hidup perempuan adat. Kekerasan seksual yang terjadi merupakan permasalahan yang berakar dari opresi berlapis yang berkaitan dengan: seksisme, rasisme, *ageism* (diskriminasi berdasar usia), dan heteroseksisme (Martiany 2017). Dalam masyarakat adat, ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan masih kuat terjadi. Perempuan masih mendapat kesempatan yang minim untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.

Sementara itu, merujuk hukum negara, maka perlindungan perempuan dalam konteks masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari implementasi UU TPKS. Namun, adanya UU tentunya tidak akan langsung menjawab kompleksnya permasalahan yang ada. Butuh keterlibatan berbagai pihak dan khususnya upaya perlindungan korban yang berpihak pada korban. Upaya perlindungan ini haruslah tercakup dalam hukum negara lewat penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (Wulandari 2020). Upaya memberikan perlindungan bagi perempuan adat dari kekerasan seksual perlu melihat bagaimana keterkaitan antara pasal-pasal yang ada di UU TPKS dan bagaimana selama ini implementasinya di dalam konteks masyarakat adat. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat diperlukan dalam menciptakan ruang aman.

Perlindungan Sosial Melalui Ruang Aman

Ruang Aman bukan ruang dalam arti fisik, tetapi sebuah zona aman yang dipercaya korban untuk menjamin rasa aman, penting melindungi seseorang dari ancaman atas hak hidup, adanya jaminan keselamatan dari bencana maupun ancaman kesehatan baik fisik maupun psikis. Selain itu, ruang aman juga perlu aman secara sosial karena kerentanan seseorang atau komunitas tertentu dari diskriminasi dan kekerasan kerap memicu ketidakamanan, baik fisik, psikis, ekonomi hingga spiritual (Chuzaifah 2022). Hukum Indonesia telah memberikan jaminan atas ruang aman yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 G (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Cerita pengalaman korban yang didapatkan selama proses penelitian menunjukkan bagaimana ruang-ruang yang ada dalam masyarakat adat tidak memberikan rasa aman, malah memberikan diskriminasi berlapis yang makin memperburuk kondisi korban. Korban yang berani bercerita dan berupaya mencari pertolongan malah dipukul oleh ibu, kakak, suster, dan juga mendapatkan perundungan dari lingkungan sekitar, yang akhirnya menyebabkan korban mengalami viktimisasi berulang. Hal ini tidak hanya menimpa korban, tapi juga orang-orang yang mendampingi korban. Salah satu cerita didapatkan dari pendamping masyarakat adat. Ia pernah mendapatkan teguran dari aparat desa dan polisi karena dianggap membesar-besarkan sebuah kasus kekerasan seksual.

Penting untuk menilik UU TPKS dalam mencari jawaban akan hal ini. Pada saat UU ini disahkan, banyak apresiasi yang diberikan karena akhirnya perspektif korban diutamakan dalam pasal demi pasal. Jika sebelumnya kasus kekerasan seksual berhenti hingga pelaporan kasus, UU ini memasukkan prinsip perlindungan dan pemulihan korban. Begitu banyak pasal dan ayat yang berisi respons kasus yang berpihak pada korban dan juga melindungi korban. Namun, lagi-lagi implementasi UU mendapatkan tantangan, salah satunya dari para penegak hukum itu sendiri.

Secara khusus, dalam menyoroti implementasi UU TPKS dalam masyarakat adat dapat kita lihat dalam kasus yang menimpa KSR, seorang penyandang disabilitas di Mentawai, hukuman bagi pelaku pemerkosaan tersebut tidak dijalankan oleh pihak yang berwenang. Dengan alasan sakit, pelaku mangkir dan sampai sekarang tak juga dipenjara. Pasal 19 UU TPKS sudah menuliskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Pertanyaannya, siapa yang kemudian memastikan penegakan hukum dijalankan sesuai keputusan?

Pengalaman lainnya juga diberikan salah satu pendamping masyarakat adat kepada peneliti di awal tahun 2024. Pendamping menjelaskan bahwa setelah mengetahui adanya korban kekerasan seksual di desa mereka, beberapa pekerja dari dinas sosial mendatangi korban (yang masih berumur di bawah 17 tahun), memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus pemerkosaan yang dialaminya di depan banyak orang dan kemudian memfoto korban saat menerima bingkisan bantuan. Foto ini kemudian dikirimkan ke grup *whatsapp* dinas tersebut. Pendamping telah mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan wajah dan nama korban namun pekerja dari dinas tersebut mengatakan bahwa foto hanya diperuntukkan di internal grup dinas tersebut saja, sebagai dokumentasi pemberian bantuan dan layanan pada korban. UU TPKS sendiri telah menuliskan beberapa pasal mengenai aturan pendampingan dan perlindungan bagi korban dan saksi. Untuk proses mengenai pendampingan korban dan saksi di Pasal 26 serta hak korban atas

perlindungan di Pasal 69 (d) yaitu perlindungan atas kerahasiaan identitas. Tidak hanya berhenti di sini saja. Jika kita beranjak lebih jauh lagi untuk melihat bagaimana kondisi korban kekerasan seksual di masyarakat adat, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang tercantum dalam Pasal 70 mengenai pemulihan korban, hampir tidak ada yang terjadi. UU TPKS telah menuliskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan pemulihan fisik, layanan psikologis, penyediaan fasilitas pendidikan hingga bimbingan rohani. Namun, selama proses riset, ditemukan minimnya pemenuhan hak pemulihan tersebut. Korban KS di masyarakat adat yang masih bersekolah malah diberhentikan oleh sekolah karena sudah dalam kondisi hamil. Kemudian tidak adanya layanan psikolog bahkan di kota kabupaten sekalipun. Korban kekerasan seksual di wilayah dampingan KEMITRAAN pun akhirnya mendapatkan layanan kesehatan dan pendampingan hukum atas biaya program KEMITRAAN dan hasil kerja sama dengan LSM lainnya. Dengan jauhnya lokasi domisili masyarakat adat dan minimnya fasilitas layanan dasar, pemenuhan hak rehabilitasi menjadi amat sulit untuk diterapkan. Peneliti LAURA UGM bahkan menemukan adanya korban yang juga penyandang disabilitas kemudian dipasangkan spiral untuk mencegah kehamilan. Hal ini sangat miris, seakan-akan menyatakan masyarakat dan penegak hukum tak mampu lagi melindungi korban.

Dalam kurun waktu 1,5 tahun belakangan, pemerintah kecamatan maupun lembaga kemanusiaan atau organisasi masyarakat sipil telah mengadakan upaya sosialisasi terkait kekerasan seksual dan UU TPKS. Beberapa temuan didapatkan dari hasil kegiatan tersebut seperti masyarakat merasa tidak ada gunanya melapor kepada petugas hukum. Selain karena mahal dan berbelit-belit, banyak hal yang menimpa korban yang makin mempersulit keadaan korban dan keluarga seperti perundungan, disalahkan oleh tetangga atau saudara, hingga dikeluarkan dari sekolah. Tidak hanya itu, pendamping masyarakat adat juga menyebutkan sering kali yang menjadi narasumber dari pemerintah sendiri adalah pelaku kekerasan seksual seperti contohnya penyidik dari kepolisian yang memiliki istri tiga, kepala desa atau dusun yang hadir sendiri merupakan pelaku atau ayah dari pelaku kekerasan seksual. Ini kemudian menyebabkan masyarakat tidak memberikan respons yang setimpal dan upaya lanjutan karena ketidakpercayaan pada sistem yang ada.

Dalam konteks di luar masyarakat adat yaitu Indonesia pada umumnya, lemahnya penegakan hukum juga merupakan masalah utama. Hal ini karena berhadapan dengan stigma tentang kekerasan seksual sebagai persoalan rumah tangga hingga anggapan bahwa kasus yang menimpa perempuan belum menjadi masalah penting. Banyak kasus viral di Indonesia dimulai dari enggannya polisi menindaklanjuti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan istri hingga kemudian terekskalasi menjadi pembuhuhan. Fenomena *victim blaming* juga masih marak terjadi yaitu masyarakat masih menyalahkan korban kekerasan seksual karena cara berpakaian atau profesinya.

Partisipasi Perempuan dalam Mendorong Kesetaraan Gender dan Ruang Aman bagi Perempuan Adat

Berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan pendamping masyarakat adat, tergali bahwa tantangan utama penanganan kekerasan seksual adalah budaya patriarki yang menyebabkan korban dan keluarga enggan bersuara, bahkan merasa bersalah karena sudah mengganggu ketentraman dan keseimbangan komunitas. Selain itu, mereka pun merasa malu serta tidak mampu. Budaya patriarki ini berakar dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Seorang korban dari Sumba Timur bercerita bahwa suaminya selalu memukulnya tiap hari tanpa alasan. Tidak hanya di rumah tetapi juga di depan orang lain dan tidak ada tetangga atau saudara yang membelanya. Diskriminasi gender menyebabkan seorang laki-laki bisa memukul, memerkosa, dan memaki perempuan karena ia dan masyarakat di sekitarnya menganggap status sosial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kondisi makin diperparah dengan adanya kendali atas sumber daya baik sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu pengendali utama di masyarakat adat adalah tetua adat karena memiliki peran dan kekuasaan untuk melakukan pengadilan adat, memengaruhi hasil keputusan adat, berwenang memberlakukan atau tidak sebuah putusan adat, dan bahkan mereka pun memiliki akses ke penegak hukum dan menegosiasikan proses hukum.

Penting untuk melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan adat dalam lingkungannya. Suara perempuan, termasuk ide dan gagasan, perlu untuk diperdengarkan dari mulai keluarga, komunitas, lembaga adat, hingga ke rapat pembangunan. Ada beberapa partisipasi yang dapat menjadi rujukan dalam mencegah kekerasan seksual (Mulyadi 2017), yang dapat menjadi referensi untuk membangun ruang aman: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu keikutsertaan masyarakat

dalam pembuatan keputusan terkait pencegahan maupun pemutusan perkara kekerasan seksual. Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang dihimpun dalam riset ini, tetua adat terkesan mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa melibatkan keluarga dan komponen lainnya di komunitas adat. Pertimbangan yang diberikan pun menjadi amat personal dan bergantung pada keberpihakannya. Di tahun 2022, riset terkait partisipasi perempuan di 39 desa di Indonesia, termasuk desa yang menjadi lokasi riset ini, dilakukan oleh program Estungkara dari KEMITRAAN. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab dari minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah karena perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas. Tidak hanya di masyarakat adat namun juga di seluruh wilayah di Indonesia. Persoalan perempuan, khususnya terkait kekerasan, belum menjadi agenda penting di desa atau kabupaten/kota dan masih dikalahkan oleh agenda perekonomian atau infrastruktur. Minimnya kehadiran suara dan aspirasi perempuan, kuatnya budaya patriarki, dan dominasi ketua adat yang berkelindan dengan pejabat pemerintahan dan penegak hukum mengakibatkan program pembangunan secara umum hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak mengimplementasikan kesetaraan gender.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Jika di poin atas disebutkan tentang partisipasi, maka suara-suara perempuan yang terkonsolidasi dapat didorong untuk menemukan tempat, orang, atau mekanisme yang aman bagi perempuan agar terhindar dari kekerasan seksual dan juga menjadi tempat untuk pemulihan korban di masing-masing komunitas yang ada. Mengambil temuan riset ini, terdapat korban KS yang ditolong oleh gereja, klenteng, hingga mendapatkan bantuan dari pendamping masyarakat adat. Pengalaman keseharian perempuan tentunya dapat menjadi rujukan tentang siapa, bagaimana, atau mekanisme apa yang membuat mereka merasa aman dan diperkirakan akan mampu memberikan perlindungan bagi sesama perempuan nantinya – jika terjadi kekerasan. Hal ini dapat menjadi titik awal bagi komunitas untuk menemukan ruang aman bagi perempuan adat, baik dalam ranah pencegahan maupun pemulihan. Perempuan adat Mentawai yang setiap harinya harus bekerja ke ladang dari pagi hingga sore merupakan persoalan sosial yang harus dicari solusinya agar mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Anak yang bersekolah di Sumba dan meninggalkan orang tuanya perlu untuk dibicarakan dan didiskusikan agar memiliki ruang aman dalam bercerita tentang pengalamannya. Dalam UU TPKS, terkait pencegahan di Pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan pencegahan perlu dilakukan di beberapa bidang di antaranya adalah pendidikan, pemerintahan dan tata kelola, budaya, dan keagamaan. Hasil temuan riset terkait adanya lembaga keagamaan dan pendamping masyarakat adat yang membantu penanganan kasus adalah temuan yang mendukung Pasal 79 dan perlu diperkuat di komunitas adat.

Ketiga, partisipasi para pemimpin atau lebih tepatnya *Key Opinion Leader* (KOL), yaitu kepala dan aparat desa, tetua adat, pengurus lembaga adat, pemimpin agama, dan lainnya. Di konteks masyarakat adat, KOL memiliki peran yang kuat untuk didengarkan oleh komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki peranan kuat untuk memobilisasi komunitas. Masyarakat adat Mentawai saat ini memiliki penengah, seorang mediator dalam peradilan adat yang disebut *sipatalaga*. Peluangnya adalah jika sudah cukup sulit untuk mendorong perubahan perspektif di tetua adat, masih ada pemimpin adat lain yang bisa didekati dan diperkuat agar memiliki kepekaan terhadap isu kesetaraan gender. Dalam UU TPKS khususnya Pasal 81, pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan kepada aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan juga tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Merujuk pada temuan riset, tetua adat memiliki hubungan yang berkelindan dan saling memengaruhi dengan aparat hingga pejabat pemerintahan. Tentunya, partisipasi para pemimpin maupun KOL sudah harus didorong dari awal, yaitu inisiatif untuk tindak lanjut kasus-kasus KS, rangkaian sosialisasi, hingga pelatihan-pelatihan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Di saat sebuah keputusan untuk pelaku kekerasan seksual tidak dilaksanakan, ke mana masyarakat dapat menyampaikan keluhannya? Lembaga adat sebagai institusi di tiap komunitas menjadi tepat untuk penyampaian hal ini. Tentunya, hal ini dapat dilaksanakan dengan efektif jika komunitas adat khususnya perempuan sudah berpartisipasi dalam wilayah publik dan isu-isu perempuan sudah terdengar dalam ruang-ruang diskusi serta pemimpin lembaga sudah memiliki kepekaan terhadap isu perempuan. Keberadaan lembaga adat merupakan peluang dalam tindak pencegahan dan pemulihan seperti amanat Pasal 54 UU TPKS khususnya ayat 2 dan ayat 3. Salah satu karateristik masyarakat

adat adalah memiliki lembaga adat sebagai perwakilan yang diakui dan tempat untuk mencapai konsolidasi antar warga. Jika kita melihat lebih detil lagi kepada ayat 2 a, b, dan c yang menuliskan tentang upaya literasi, sosialisasi dan penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif, lembaga adat dapat menjadi salah satu solusinya. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Bumi Lestari, organisasi masyarakat sipil di Sumba Timur, adalah mendorong keterwakilan perempuan di barisan pemimpin lembaga adat. Hal ini merupakan salah satu upaya revitalisasi lembaga adat agar mendukung kesetaraan gender dan menjadi pintu masuk bagi persoalan-persoalan perempuan agar mendapat perhatian lembaga adat.

Peran serta masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan (Mulyadi 2017). Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pembangunan (pemerintah), tetapi peran serta masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan. Ruang aman harus dirancang secara partisipatif, mekanisme yang berjalan disetujui dan diakui bersama-sama, serta pelaksanaannya melibatkan kelompok-kelompok yang ada dalam komunitas.

Penutup

Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat adat berkorelasi dengan relasi kuasa dalam struktur atau tatanan sosial di komunitas adat. Hal ini menunjukkan bagaimana praktik relasi kultural dalam komunitas adat juga berdampak bagaimana penanganan kasus-kasus yang terjadi. Patriarki sering kali menempatkan laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan, yang dalam struktur atau tatanan komunitas secara tidak langsung melatari penanganan kasus yang cenderung tidak memberikan keadilan bagi korban, yang mayoritas adalah perempuan, anak, dan disabilitas.

Kasus-kasus yang terjadi dan tergambarkan dalam artikel ini juga menunjukkan kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang memiliki peran dalam penanganan kasus. Gambaran komunitas adat yang hidup komunal seharusnya dapat menjadi ruang aman dalam memberikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan disabilitas - namun faktanya tidak demikian. Ruang Aman, dalam pengertian fisik dapat diartikan sebagai ruang dan bangunan secara fisik untuk menempatkan korban pada tempat yang dapat memberikan perlindungan dari pelaku, seperti gereja serta sekolah adat sebagai ruang komunal bagi anak-anak. Namun lebih dari itu, Ruang Aman secara filosofis dapat berupa aturan perundangan, hukum dan aturan adat, ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan program perlindungan perempuan dari KS. Kemudian ruang aman bisa juga dimaknai sebagai partisipasi dalam upaya pencegahan dan pemulihan, mengedukasi pemimpin adat, desa dan KOL, serta partisipasi mendorong komunitas adat berefleksi bersama untuk anti-KS. Rekomendasi ini juga didukung dari Kertas Kerja yang telah lebih awal disusun. Salah satunya adalah melakukan revitalisasi lembaga adat dan peradilan adat sebagai ruang aman untuk mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual.

UU TPKS sebagai salah satu bentuk ruang aman yang diharapkan dapat menjawab tantangan kekerasan seksual di masyarakat adat. Dalam praktiknya, belum mampu memberikan jaminan perlindungan. Hal ini juga tertuang dalam rumusan Kertas Kerja yang disusun KEMITRAAN tahun 2023 bahwa UU TPKS belum secara spesifik mengatur kekerasan seksual dalam konteks masyarakat adat. UU TPKS dalam pasal-pasalnya memang telah memuat aturan dalam upaya pendampingan dan perlindungan korban dan saksi, termasuk hak korban dalam mendapatkan pemulihan fisik, layanan psikologis dan penyediaan fasilitas pendidikan, serta bimbingan rohani. Namun, dalam praktiknya, hampir tidak ada layanan-layanan tersebut yang diberikan bagi korban. Mengingat bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik dan pola yang berbeda dengan masyarakat non-adat, maka perlu ada perhatian khusus dalam proses implementasi UU TPKS, terutama dalam melibatkan partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan. Jika hal ini dilakukan, maka akan dimungkinkan memasukkan unsur penanganan kasus kekerasan yang lebih memerhatikan konteks lokal adat, seperti tradisi dan hukum adat yang berlaku—yang tentunya berpusat pada pengalaman perempuan adat.

Daftar Pustaka

Ahimsa-Putra, H. S. 1985. "Etnosains dan Etnometodologi, Sebuah Perbandingan", *Masyarakat Indonesia,* Vol. 12(2), hlm. 103--133.

Cervix, R. & Chandra, J. 2018. "Rape Culture Pyramid", *11thprincipleconsent.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di http://www.11thprincipleconsent.org/consent-propaganda/rape-culture-pyramid/.

Corpuz, V. T. 2015. "Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples (A/HRC/30/41)", *digitallibrary.un.org*, United Nations diakses pada 10 Maret 2024, di https://digitallibrary.un.org/record/803354?ln=en.

Chuzaifah, Y. 2022. *Panduan Feminis Merespon Krisis: Pengalaman Pemberdayaan Kolektif Perempuan di Masa Pandemi.* Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial: Jakarta.

Crenshaw, K. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *University of Chicago Legal Forum*, No. 140, hlm. 139-167. https://doi.org/10.1093/oso/9780198782063.003.0016.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).

Duran, E. et al. 1998. Healing the American Indian Soul Wound. In Y. Danieli (Eds.), *International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma*. Springer Science: New York.

Herman, D. 1989. The Rape Culture. In J. Freeman (Eds.), *Women: A Feminist Perspective (4th ed.)*. Mountain View: CA.

Inter-Agency Support Group on Indigenous Peoples' Issue (IASG). 2014. "The Health of Indigenous People", *un.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://www.un.org/en/ga/69/meetings/indigenous/pdf/IASG%20Thematic%20Paper%20-%20Health%20-%20rev1.pdf.

KEMITRAAN. 2023. "Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual", *kemitraan.or.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://KEMITRAAN.or.id/en/book/kertas-kerja-ruang-keadilan-dan-jaminan-perlindungan-perempuan-adat-dari-kekerasan-seksual/.

Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Komnas Perempuan: Jakarta.

Koukkanen, R. 2012. "Self-Determination and Indigenous Women's Rights at the Intersection of International Human Rights". *Human Rights Quarterly*, Vol. 34, hlm. 225–250. https://www.jstor.org/stable/41345477.

Lope-Alzina, D. G. 2020. Indigenous Women in Agriculture. In C. E. Sachs, L. Jensen, P. Castellanos, & K. Sexsmith (Eds.), *Routledge Handbook of Gender and Agriculture.* Routledge: London.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.

Martiany, D. 2017. Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. In Susanto (Eds.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif.* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.

Mulyadi, M. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. In Susanto (Eds.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif.* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.

Nafi, T. H. et al. 2016. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambuan, dan Waingapu", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 46(2), hlm. 233--255.

National Indigenous Disabled Women Associantion-Nepal (NIDWAN). 2023. *Written Submission on Article 11 of the Convention on the Rights of People with Disabilities for the Elaboration of a General Comment on People with in Situations of Risks and Humanitarian Emergencies from Nepal.* NIDWAN: Lalitpur, Nepal.

Perchonock, N. & Werner, O. 1969. "Navaho Systems of Classification: Some Implications for Ethnoscience", *Ethnology,* Vol. 8(3), hlm. 229--242. https://doi.org/10.2307/3772753.

Pona, L. & Wahyuni, B. 2002. *Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan Kasus di Papua.* Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM: Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Raphael, B., Swan, P., & Martinek, N. 1998. Intergenerational Aspects of Trauma for Australian Aboriginal People. In Y. Danieli (Eds.), *International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma.* Springer Science: New York.

Sepriandi. 2024. "Kisah Perjuangan Perempuan Adat Usir Tambang Pasir Besi di Bengkulu", *aman.or.id*, diakses pada 1 April 2024, di https://aman.or.id/story/kisah-perjuangan-perempuan-adat-usir-tambang-pasir-besi-di-bengkulu.

Sturtevant, W. C. 1964. "Studies in Ethnoscience", *American Anthropologist*, Vol. 66(3). https://doi.org/10.1525/aa.1964.66.3.02a00850.

Sudarmin. 2014. *Pendidikan Karakter, Etnosains, dan Kearifan Lokal (Konsep dan Penerapannya dalam Penelitian dan Pembelajaran Sains).* CV Swadaya Manunggal: Semarang.

Suliyati, T. 2018. "Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis", *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 2(1), hlm. 52--61. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/21303.

Susiana. S. 2017. Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. In Susanto (Eds.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif.* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.

Widiantini, I. 2021. "Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis", *Jurnal Perempuan,* Vol. 26(2), hlm. 111--119. https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/585/416.

World Bank. 2008. "Forging The Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia", *worldbank.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/743501468040517610/forging-the-middle-ground-engaging-non-state-justice-in-indonesia.

Wulandari, C. 2020. "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)", *Pandecta*, Vol. 15(2), hlm 228--241. DOI: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650.

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 29 No. 1, 2024, 75—87
copyright @ 2024 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v29i1.974
DDC: 305

Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia

The Need for Collective Work in Handling Sexual Violence Cases at Universitas Indonesia

Retno Daru Dewi G. S. Putri

Jurnal Perempuan
Jalan T. B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430

daru@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

The emergency situation of sexual violence in educational institutions, especially universities, triggered the issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence (Permendikbudristek PPKS). In its implementation, the formation of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual – Satgas PPKS) is an obligation for every university in Indonesia. Universitas Indonesia has three organizations that fight for justice for victims of sexual violence by accepting reports and providing assistance and protection: Satgas PPKS UI (PPKS UI Task Force), Komite PPKS FISIP UI (PPKS FISIP UI Committee), and HopeHelps UI. In their work, support from the university is a determinant of success or increasing barriers to combating sexual violence on campus. The experiences of these three organizations are analyzed in this article through Levine's (2018) three strategies for engaging organizations through Haraway's (1988) lens of objectivity. The findings in this paper show that the impact of the patriarchal culture and mindset at Universitas Indonesia still marginalizes efforts to implement strategies in fighting for justice for victims of sexual violence.

Keywords: anti-sexual violence organization, sexual violence in higher education, collective work strategies, situated knowledge

Abstrak

Kondisi darurat kekerasan seksual di institusi pendidikan, utamanya perguruan tinggi, memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Indonesia memiliki tiga organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan menerima pelaporan serta memberikan pendampingan dan pelindungan: Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI. Dalam kerja-kerja mereka, dukungan dari universitas menjadi penentu keberhasilan maupun bertambahnya hambatan melawan kekerasan seksual di dalam kampus. Pengalaman ketiga organisasi tersebut dianalisis pada tulisan ini melalui tiga strategi Levine (2018) dalam melibatkan organisasi melalui kacamata objektivitas milik Haraway (1988). Temuan pada tulisan ini menunjukkan adanya dampak dari budaya dan pola pikir patriarki di Universitas Indonesia masih meminggirkan upaya implementasi strategi-strategi dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: organisasi penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual di perguruan tinggi, strategi kerja kolektif, pengetahuan tersituasi

Pendahuluan

Pada tahun 2017, seorang teman memperkenalkan saya dengan adik kelasnya yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari Universitas Indonesia (UI). Mahasiswa tersebut mengaku kesulitan selama merampungkan tulisan akibat mengalami kekerasan seksual (KS) verbal dari dosen pembimbingnya. Upaya mengganti topik hingga mengganti pembimbing sudah tidak mungkin dilakukan karena dosen tersebut sangat menguasai tema yang ia minati dan menjadi inti dari tugas akhirnya. Seminggu usai pertemuan kami, mahasiswa tersebut tidak merespons pesan singkat yang saya kirimkan ketika menanyakan kabar perkembangan kondisinya. Rupanya ia hanya membutuhkan ruang aman dengan bercerita kepada saya yang dianggapnya paham atas apa yang harus dilakukan jika situasi semakin memburuk.

KS yang dialami oleh korban adalah eksploitasi seksual yang sering kali terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen terhadap mahasiswanya (Noer et al. 2022; Howard 2016; Ahmed 2023). Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Sulistyowati

Irianto (2021), menyetujui bahwa ketimpangan sering kali justru berbalik, bukan menyalahkan pelaku jika ada pelaporan KS yang dilakukan oleh dosen. Kegiatan seperti bimbingan tugas dan penelitian menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya. Keterpaksaan para korban untuk bertahan didasari oleh keinginan mereka agar dapat cepat lulus dengan harapan kekerasan yang mereka alami tidak terjadi terlalu sering.

Di tahun yang sama, KS secara fisik saya alami sendiri dengan pelaku rekan kerja sesama pengajar. Adanya saksi dan bukti pesan singkat tetap tidak memberikan saya rasa aman karena absennya tempat pengaduan bagi para *civitas academica*. Selain itu, status saya sebagai dosen paruh waktu yang hanya didasari kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UI pada saat itu tidak sekuat posisi pelaku sebagai calon dosen tetap yang akan lebih dipertahankan apabila aduan saya lakukan. Dinamika kekuasaan yang didominasi oleh opresi ini (Wooten 2015; Howard 2007; Ahmed 2023) berdampak pada maraknya pekerja perempuan yang berhenti dan tak jarang berpindah pekerjaan. Seperti yang dilaporkan oleh Davis (2017), KS di lingkungan pekerjaan mengakibatkan 41 persen perempuan berhenti bekerja. Irianto (2021) & Widiantini (2021) menegaskan bahwa hal ini, utamanya di lingkungan perguruan tinggi, diakibatkan oleh tidak adanya sistem yang menampung laporan dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi.

Ketimpangan yang didasari oleh kekuatan relasi seperti ini, akhirnya membuat saya dan beberapa korban lain membangun *sisterhood* (Radina 2017; Putri et al. 2022) sebagai sebuah solidaritas dalam melindungi korban dari pelaku yang sama. Ruang aman kolektif yang dimulai oleh anggota *civitas academica* tersebut juga diharapkan dapat mencegah adanya korban lain. Akan tetapi, upaya tersebut turut menunjukkan tidak adanya kesadaran institusional kampus untuk menyediakan tempat mengadu secara formal beserta hukuman bagi pelaku yang setimpal. Serupa dengan pelaku sebelumnya, rekan kerja saya, si pelaku KS yang kedua, masih berkegiatan mengajar secara normal di kampus hingga saat ini.

Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, kondisi darurat KS di perguruan tinggi memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Pada Pasal 5 ayat 2 peraturan ini, terdapat 21 deskripsi turunan mengenai tindakan-tindakan yang masuk ke dalam kategori jenis KS. Tidak hanya penjelasan tersebut, Permendikbudristek PPKS (2021) turut menegaskan tindakan pencegahan, pendampingan, dan pelindungan untuk korban, institusi, hingga saksi KS yang terjadi.

Perlawanan terhadap kekerasan seksual semakin menguat ketika Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ahirnya disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 setelah diperjuangkan 10 tahun lamanya (Nurhadi 2022). Serupa dengan Permendikbudristek PPKS, UU TPKS memiliki pasal-pasal yang mengatur pelaporan, penanganan, dan pelindungan korban. Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya untuk menghadirkan proses hukum yang berpihak pada korban (Nurita & Wibowo 2022).

Hadirnya Permendikbudristek PPKS dan UU TPKS adalah capaian bagi gerakan penghapusan KS di Indonesia, namun demikian tidak berarti keberadaan kebijakan tersebut menghilangkan kasus KS yang terlanjur mengakar di lingkungan pendidikan. Tren peningkatan pelaporan yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan dua hal yaitu meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk berbicara dan melawan namun juga menjustifikasi bahwa KS masih menjamur di masyarakat kita (Putri 2024). Pada Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2023, terlaporkan sebanyak 2.228 kasus kekerasan seksual yang tercatat di tahun 2022 (Komnas Perempuan 2023). Sementara, kekerasan di institusi pendidikan tercatat sebanyak 37 kasus. Pada Catahu 2023, Komnas Perempuan menyatakan adanya keberanian para pelapor sejak penerapan Permendikbudristek PPKS dan UU TPKS. Adanya kedua peraturan tersebut di atas menunjukkan capaian, terkait adanya perubahan di tataran kebijakan yang bertujuan mendorong penghargaan atas tubuh dan komitmen penghapusan KS. Kendati demikian, kebijakan saja tidak cukup. Keberhasilannya terukur dari sejauh mana dampak transformatif bagi kelompok rentan ketika kebijakan telah diundangkan. Dalam konteks Universitas Indonesia, saya melihat bahwa salah satu kendala penghapusan kekerasan seksual adalah tidak adanya kesadaran penuh institusi akan pentingnya implementasi kedua peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat pada minimnya respons yang baik dari kampus ketika memproses kasus KS sebelum adanya organisasi yang mengadvokasikan isu tersebut dengan konsisten.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai *civitas academica* di Universitas Indonesia dan sebagai aktivis feminis, saya hendak mengkritisi persoalan penanganan KS dengan berangkat dari pengalaman tiga organisasi yang terdiri dari para *civitas academica* Universitas Indonesia di tengah-tengah minimnya kesadaran lembaga akan pentingnya dukungan terhadap advokasi dan perjuangan yang mereka lakukan.

Metode Penelitian

Kerangka pemikiran pada tulisan ini berfokus pada peran organisasi dalam melawan KS di institusi perguruan tinggi, khususnya Universitas Indonesia. Kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan, termasuk KS, merupakan tanggung jawab dari konsep patriarkal yang dianut oleh masyarakat (Heise 1998). Konsep *Ecological Framework* atau kerangka kerja ekologis milik Heise (1998) menekankan perlunya peranan organisasi karena faktor sosiokultural menjadi salah satu dampak terjadinya KS serta keberlanjutan dalam pencegahan, pendampingan, dan pelindungan terhadap korban.

Kerangka kerja ekologis turut menjadi landasan tulisan-tulisan lain yang berfokus pada upaya kolektif organisasi di dalam melawan KS. *Engaging the Community* (Levine 2018) adalah tulisan yang berfokus serupa yang menjadi landasan pemikiran pada tulisan ini. Pada karya Levine (2018), panduan pertanyaan yang diberikannya menjadi dasar dari beberapa pertanyaan wawancara saya kepada tiga narasumber dari tiga organisasi, yaitu Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI. Tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi komitmen penghapusan KS, antara lain; kemitraan yang menguntungkan; pentingnya memupuk kesadaran dan pencegahan; dan membingkai ulang masalah.

Selain itu, tantangan serta kesempatan dalam mencegah serta menanggulangi KS di perguruan tinggi juga saya paparkan di dalam artikel ini. Mengacu pada tulisan Noer et al. (2022), *Strengthening the Role of Communities in the Prevention of Sexual Violence in Higher Education: Opportunities and Challenges*, kultur yang patriarkis menjadi fenomena yang serupa sehingga menjadi acuan saya dalam menggali apa saja hambatan dan dukungan yang didapatkan oleh tiga organisasi sebagai narasumber dalam tulisan ini.

Hasil dari wawancara kemudian akan dianalisis menggunakan konsep objektivitas milik Donna Haraway (1988) bahwa kepentingan penguasa akan memengaruhi pergerakan serta aktivisme di dalam sebuah organisasi maupun komunitas. Sudut pandang Haraway (1988) akan objektivitas memperlihatkan bagaimana pemikiran patriarkal yang dominan di perguruan tinggi dapat mendukung atau menghambat proses perjuangan dua organisasi yang diangkat di dalam tulisan ini. Bagi Haraway (1988) dan Harding (1988), pengetahuan tidaklah netral atau objektif, tetapi selalu terkait dengan konteks sosial, politik, dan sejarah yang dihasilkan. Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari pengetahuan, tetapi sebagai bagian yang integral dari pengetahuan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan pengetahuan memiliki hubungan yang erat.

Pemikiran Haraway (1988) tentang pengetahuan tersituasi dan dekonstruksi objektivitas menjadi relevan. Kampus sebagai institusi pendidikan yang memproduksi ilmu pengetahuan membuatnya beriringan dengan aktivitas sosial yang ideologis. Institusi pendidikan beserta seluruh warganya tidak saja berurusan dengan metode ilmu pengetahuan, tetapi juga berhadapan dengan macam-macam kepentingan dan kekuasaan. Dalam pandangan feminisme, netralitas dan objektivitas bukanlah hakikat ilmu dan institusi pendidikan. Malahan, kampus memiliki imperatif untuk melakukan transformasi sosial. Netralitas bukanlah bentuk keadilan justru wajah kepalsuan yang menghindari untuk membongkar seksisme, diskriminasi, dan ketidakadilan (Ahmed 2023). Pengetahuan yang transformatif adalah pengetahuan yang berpihak pada yang marginal, yang berupaya memperbaiki situasi yang timpang (Haraway 1988; Harding 1988; Ahmed 2023).

Penelitian ini akan memaparkan bagaimana kerja Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI dengan menggunakan konsep pengetahuan yang tersituasi untuk mengakomodasi perspektif secara inklusif, *standpoint* feminis yang menunjukkan keberpihakan diperlukan, dan aksi solidaritas yang terwujud dalam tindakan kolaboratif sebagai wujud perlawanan. Perspektif feminis juga dipakai untuk memeriksa bagaimana objektivitas malahan merupakan rezim pelanggeng kekuasaan (Haraway 1988; Harding 1988).

Pengalaman, hambatan, dan dukungan yang dialami dan diterima oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia (Satgas PPKS UI), HopeHelps UI, dan Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Komite

PPKS FISIP UI) dipaparkan dalam artikel ini untuk melihat upaya kolektif organisasi dengan dukungan kampus yang terbatas dalam melawan KS di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia dan Asia (QS Top Universities 2024). Narasumber yang diwawancara pada tulisan ini merupakan kepala dari masing-masing tim kerjanya. Ketiganya adalah Manneke Budiman (Ketua Satgas PPKS UI, Mamik Sri Supatmi (Ketua Komite Anggota Dosen PPKS FISIP UI), dan Mawla Atqiyya Muhdiar (Wakil Direktur HopeHelps UI). Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024 secara langsung dengan Manneke Budiman dan *online* dengan Mawla Atqiyya Muhdiar. Sementara Mamik Sri Supatmi diwawancara pada tanggal 18 Maret 2024 secara langsung. Pemilihan ketiga narasumber dengan posisi tertinggi merepresentasikan seluruh tim dan pemahaman mereka akan kerja-kerja organisasi serta komunitas yang dipimpinnya. Dengan waktu yang terbatas, diharapkan melalui wawancara yang mendalam kepada ketiga narasumber tersebut, penulis dapat memahami pengalaman dari para aktivis penghapusan KS di UI dan mengkritisi kurangnya dukungan dari kampus yang terjadi.

Budaya Patriarki di Perguruan Tinggi dan Langgengnya Kekerasan Seksual

Faktor terjadinya KS dilandasi oleh personal, situasional, dan sosiokultural (Heise 1998). Di dalam memperjuangkan keadilan bagi korban, unsur sosiokultural patriarkis sering kali menjadi hambatan akibat adanya konsep peran gender tradisional yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Pada perguruan tinggi, unsur sosiokultural yang kuat membuat sulit menghapus sudut pandang yang tidak berperspektif korban. Dosen yang dianggap sebagai sumber ilmu yang memiliki relasi dekat dengan mahasiswanya acapkali menyalahgunakan relasi serta kekuasaan di lingkungan kampus (Irianto 2021). Hal tersebut turut didominasi oleh dinamika opresi yang kemudian mengarah pada KS yang dilakukan terhadap para mahasiswa (Wooten 2015; Howard 2016; Ahmed 2017 ; Ahmed2023).

Haraway (1988) menyatakan bahwa di dalam suatu lingkungan, pemahaman akan segala tindakan organisasi atau kelompok masyarakat yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh pola pikir dominan. Pengetahuan yang membentuk suatu kebenaran tidak lepas dari mereka yang memegang kuasa akan kelompok masyarakat yang dipimpinnya sehingga konsep objektivitas sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dominan tersebut. Hasil dari konsep yang mendasari pemikiran dominan, akan terbentuk di dalam hasil-hasil relasi sosial yang ada di dalam sebuah organisasi atau komunitas.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu contoh. Dalam isu KS, hambatan yang umum terjadi masih diwarnai dengan menyalahkan korban maupun mengacuhkan kasus yang terjadi sehingga terwujudnya peraturan yang berpihak pada korban dan memberi ganjaran yang setimpal bagi pelaku masih jarang. Adapun peraturan dan kelompok penjamin implementasinya, situasi yang patriarki belum tentu dapat melancarkan adanya keadilan bagi korban. Dalam konteks dunia kampus, Ahmed (2017) menyatakan bahwa institusi pendidikan kerap hanya memberikan jargon-jargon tentang keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Padahal secara implementasi, melakukan pembiaran terhadap berbagai kejahatan termasuk halnya KS.

Tidak hanya pemahaman akan pengetahuan serta pemikiran yang patriarkis, timpangnya relasi kuasa yang disalahgunakan turut memperkeruh penghapusan, penanganan, pendampingan, hingga pelindungan korban. Budaya *top-down* atau komunikasi dari atas ke bawah yang diimplementasi oleh birokrasi perguruan tinggi menjadi salah satu masalah sulitnya menyelesaikan isu KS. Hal ini mengukuhkan pelaku yang memiliki posisi lebih berkuasa daripada korban (Irianto 2021). Dalam kasus KS di universitas, banyak korban atau saksi yang mengetahui kasus namun memilih diam sebab melakukan perlawanan dapat menyebabkan kerentanan berlipat, mulai dari pengucilan, kehilangan kekuasaan, dan lainnya (Ahmed 2017).

Tiga unsur pelaku dan korban berdasarkan relasi kuasanya di perguruan tinggi terdiri dari dosen, mahasiswa, dan staf atau tenaga kependidikan (tendik) (Noer et al. 2022). Di tahun 2023, Kemendikbudristek menemukan jumlah kasus paling tinggi di sektor pendidikan adalah di perguruan tinggi dengan pelaku KS yang didominasi oleh dosen pegawai negeri sipil (PNS) yang berarti kasusnya terjadi di perguruan tinggi negeri. Belum adanya penerapan isu gender di dalam kurikulum pendidikan tinggi semakin menyulitkan implementasi pemahaman akan KS yang diakibatkan oleh timpangnya relasi kuasa di antara para *civitas academica*. Isu gender dan feminisme yang melingkupi KS juga masih dianggap masalah perempuan dan tidak menjadi tanggung jawab kampus.

Instruksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tahun 2000 pun masih belum diimplementasi secara ideal dan

menyebabkan pemahaman akan isu KS semakin minim di lingkup perguruan tinggi. Jika dilihat dari rumpun ilmunya, baik ilmu alam dan ilmu sosial masih memiliki kelemahan dalam memahami isu gender dan kekerasan seksual. Laporan statistik Satgas PPKS UI mempertegas hal ini dengan menunjukkan tingginya angka kasus yang terjadi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, per 22 November 2023 (Satgas PPKS Universitas Indonesia 2024) dan Fakultas Teknik, per 31 Desember 2023 (Satgas PPKS Universitas Indonesia 2024).

Kesenjangan perguruan tinggi dalam merespons KS, membuat korban dan para advokat isu yang serupa mencari jalan keluar sendiri dalam menyelesaikan masalah. Dengan objektivitas mereka yang didominasi oleh pengetahuan serta pola pikir yang patriarkis, semakin sulit mengupayakan keadilan bagi korban KS di perguruan tinggi. Sejumlah feminis percaya bahwa kerja penghapusan diskriminasi gender termasuk KS bukan hal yang mudah dan kerap mendapat resistensi. Untuk itu, perlawanan kolektif, solidaritas, dan kerja kolaboratif yang menjadi harapan (Haraway 1988; Harding 1988; Ahmed 2017; Ahmed 2023).

Tawaran Strategis dalam Melawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Pentingnya memperjuangkan isu KS sebagai sebuah organisasi mapun komunitas tidak pernah diutamakan hingga para feminis menyuarakannya (Dominelli 1995). Pentingnya mengutamakan pengalaman (kolektif) perempuan, utamanya korban KS, sangat diperlukan demi menghadirkan keadilan, pendampingan, serta pelindungan bagi mereka.

Sayangnya, menurut Irianto (2021), inisiatif yang serupa tidak pernah datang dari para institusi perguruan tinggi secara menyeluruh. Dosen-dosen yang mengadvokasi isu KS hanya segelintir dari banyaknya pengajar serta anggota *civitas academica* lainnya dengan kemampuan untuk melindungi korban. Kurangnya perhatian tersebut diakibatkan kultur perguruan tinggi yang masih lekat dengan pola pikir patriarki dan senioritas di antara dosen, mahasiswa, serta staf dan tendik (Noer et al. 2022). Kultur tersebut menjustivikasi konsep objektivitas milik Haraway (1988) yang menyoroti pengetahuan tersituasi (*situated knowledge*) dengan pengaruh pola pikir patriarki yang kuat. Sara Ahmed (2017) turut menyepakati adanya seksisme dan rasisme yang langgeng di dalam institusi pendidikan sehingga sulit dalam mendekonstruksi paham yang mendiskriminasi perempuan serta pergerakan feminisme di dalam kampus.

Sejumlah riset terdahulu terkait penghapusan KS menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dan data serta reaksi negatif dalam menanggulangi KS di perguruan tinggi menjadi dua permasalahan utama (Levine 2018, hlm. 89--90). Sebagai contoh, Satgas PPKS UI hanya memiliki 13 anggota tim yang harus menangani sebanyak 80 kasus. Merespons hal tersebut, penerapan tiga jenis strategi bisa dilakukan; membangun kemitraan yang menguntungkan, memupuk pentingnya kesadaran dan pencegahan, serta membingkai ulang masalah.

Pada strategi pertama, kemitraan yang dibangun di perguruan tinggi dalam menanggulangi KS dapat dilakukan dengan menghadirkan dan mendengarkan pakar eksternal maupun internal dari dalam kampus. Agar mampu mendekonstruksi pola pikir patriarkis yang tidak berpihak pada korban, pakar internal tentunya lebih diutamakan karena pemahaman mereka akan budaya institusi yang lebih mendalam. Dalam hal ini, pengalaman korban; kelompok pendamping KS; dosen yang memiliki kompetensi tentang KS dan feminisme; serta berbagai praktisi yang relevan, perlu dilibatkan dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan juga program terkait KS. Selain itu, pendanaan sangat diperlukan untuk dapat mempertahankan kerja-kerja penghapusan KS secara berkelanjutan. Dalam kerangka Haraway (1988), pelibatan pengalaman dan pengetahun secara inklusif serta adanya akomodasi atas pengalaman yang marginal perlu dilakukan untuk menghasilkan transformasi.

Strategi kedua, memupuk pentingnya kesadaran dan pencegahan, diperlukan agar dapat berdampak pada berubahnya budaya dan pola pikir patriarkis di dalam perguruan tinggi (Levine 2018). Dengan kesadaran yang lebih baik, harapannya angka KS dapat ditekan dan pencegahan dapat menjadi tanggung jawab bersama. Kesulitan yang umum ditemukan pada upaya penghapusan KS berasal dari internal kampus yang melanggengkan KS dengan melakukan pendiaman atau bahkan memusuhi mereka yang menuntut keadilan baik itu korban, pendamping, dosen, dan lainnya (Ahmed 2017; Ahmed 2023).

Strategi ketiga, membingkai ulang masalah juga perlu dilakukan sebagai salah satu strategi memperkuat organisasi di dalam upaya penghapusan KS. Sering kali pihak kampus tidak melanjutkan proses dan mendukung korban karena merasa citra baik institusi perguruan tinggi perlu untuk dipertahankan (Irianto 2021). Pola pikir seperti ini yang perlu didekonstruksi dengan edukasi dan sosialisasi mengenai isu gender,

umumnya KS, di kampus. Agar pihak kampus mau bekerja sama, kesadaran bahwa citra buruk institusi justru akan memburuk jika menutup-nutupi kasus-kasus yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, perguruan tinggi harus memahami bahwa buruknya penanganan kasus KS dapat ikut memperburuk kinerja-kinerja akademis para *civitas academica* yang mampu menurunkan kompetensi kampus.

Ketiga strategi yang ditawarkan oleh Levine dalam tulisan ini akan digunakan sebagai dasar analisis. Tiga organisasi yang mengadvokasi penghapusan KS; Satgas PPKS UI, Komite PPKS UI, dan HopeHelps UI dipaparkan kerja-kerja, hambatan, dan dukungan kampus yang dialaminya berdasarkan strategi Levine (2018) dalam pelibatan organisasi dan komunitas untuk isu yang sama.

Peran Organisasi dalam Melawan Kekerasan Seksual di UI

Data yang dikumpulkan pada tulisan ini merupakan hasil wawancara dengan Manneke Budiman (Ketua Satgas PPKS UI), Mamik Sri Supatmi (Ketua Komite Anggota Dosen PPKS FISIP UI), dan Mawla Atqiyya Muhdiar (Wakil Direktur HopeHelps UI). Ketiganya memaparkan kerja-kerja, hambatan, serta dukungan yang selama ini mereka alami dalam mengadvokasikan penghapusan KS di Universitas Indonesia dilihat dari strategi Levine (2018) dan dampak dari objektivitas serta pengetahuan yang situasional milik Haraway (Haraway 1988).

Satgas PPKS UI

Dibentuk pada 2022 berdasarkan Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia (Pertor PPKS), Satgas PPKS UI hadir sebagai tempat aman korban di UI yang melaporkan KS. Hingga saat ini, sebanyak 80 kasus telah diterima selama waktu 1 tahun 4 bulan. Pendampingan yang dilakukan 13 anggota Satgas PPKS UI didominasi oleh pendampingan psikologis. Tidak hanya mengarahkan korban ke konseling psikologi ataupun psikiater untuk pemulihan, mereka juga harus mampu menjadi ruang aman ketika merespons pelaporan dan mengunjungi korban. Menurut Manneke Budiman, pada wawancara Jumat, 15 Maret 2024, korban ada kalanya meminta untuk dikunjungi atau ditemani sehingga pelaku kekerasan tidak bisa meneruskan niat jahat mereka. Permintaan seperti ini tidak hanya terjadi selama jam kerja tapi pernah juga terjadi di tengah malam hingga pagi-pagi buta.

> "Satgas itu harus merespons paling telat 1x24 jam setelah laporan masuk. Ada yang instan, jam 11 malam minta ditemui saat itu juga di luar kampus, dan bisa pertemuan berlangsung sampai jam 2 pagi. Jadi, satgas *gak* bisa tunggu besok, ya. Langsung. Kami minta tolong PLK untuk *nemenin* karena takut Satgas ini dijebak. Wah, itu kondisinya sudah parah sekali, mau bunuh diri segala, kita *gak* bisa tunggu besoknya jam 9 pagi *gitu*. Jadi, itu langsung. Langsung direspons, tempat pertemuan silakan ditentukan korban. Kan mereka takut, ya. Bahkan ada yang dibuntuti sama pelakunya. Jadi, ke mana dia pergi tuh diikuti. Maka, dia bisa mengusulkan 'bisa *gak* ketemu di warung mana'. Jadi, Satgasnya yang harus ke situ" (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Satgas PPKS tidak dapat bekerja sendiri, untuk memproses satu kasus, Satgas harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak keamanan kampus, Kepolisian Resor— Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), dukungan konseling dari Fakultas Psikologi UI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), komunitas anti KS lainnya, komunitas pers kampus dan lainnya. Keterlibatan seluruh pihak tersebut menunjukkan bahwa aspek pencegahan, penganangan, dan pemulihan KS membutuhkan kerja kolaborasi (Haraway 1988; Levine 2018; Ahmed 2023).

Aspek edukasi yang disebutkan Levine (2018) telah dilakukan oleh Satgas PPKS UI melalui media sosial Instagram sebagai salah satu kanal utama penyebaran informasi mengenai KS. Tidak hanya infografik yang berisi pengetahuan, akun Instagram tersebut turut mempublikasikan dokumen yang berhubungan dengan pelaporan dan pendampingan korban. Dokumen-dokumen tersebut meliputi formulir pelaporan, publikasi pernyataan permohonan maaf pelaku KS, rilis pernyataan sikap resmi Satgas PPKS UI, dan dua dasar hukum terbentuknya Satgas PPKS UI, yakni Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 dan Permendikbudristek PPKS Nomor 30 Tahun 2021 (Instagram Satgas PPKS UI 2024).

Akan tetapi, di balik kerja pendampingan korban, berjejaring, dan mengedukasi publik, napas Satgas PPKS UI sebenarnya ditopang oleh inisiatif dan sumber daya individu dan komunitas. Kerja mereka jauh dari kata ideal dan hal ini menunjukkan bagaimana minimnya komitmen kampus pada penghapusan KS. Ketika diwawancara, Manneke menyayangkan posisi Satgas PPKS UI yang masih dianggap universitas berbeda dengan unit-unit kerja lainnya.

> "Satgas itu sebagai unit, sama (seperti unit kerja lain). Namun, kita *kalo* perlu apa-apa, itu setiap kegiatan harus bikin TOR (*Term of References*), bikin RAB (Rancangan Anggaran Biaya), *macem-macem* semua disertakan, *kayak* kita sedang membuat suatu kepanitiaan. *Nah,* di situ nanti baru dana diturunkan. Itu *kan gak* bisa, mana mungkin. Jadi, istilahnya Satgas itu harus *kayak* ER (*Emergency Room*) *gitu*. Dia selalu berada dalam kondisi *emergency, gak* pernah rutin. Semua kasus itu darurat" (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Situasi di atas menunjukkan konsep objektivitas dan netralitas yang justru mengarah pada ketidakadilan. Seperti yang dikatakan Haraway (1988), pengetahuan dan kebijakan justru harus berpihak pada yang marginal. Keberpihakan tersebut tidak hadir terlihat dari absennya kebijakan mengenai pendanaan kegiatan Satgas PPKS universitas, termasuk UI, pada Permendikbudristek PPKS. Adapun peraturan pendanaan Satgas PPKS pada Peraturan Rektor UI, tanpa desakan dari Kemendikbudristek membuat proses pencairan uang untuk membantu korban sangat lama. Sanksi pembatasan pendanaan kampus dari Kemendikbudristek hanya dikenakan apabila universitas tidak memiliki Satgas PPKS sehingga kinerja bukan lah yang dilihat oleh Kemendikbudristek dalam hal ini.

Minimnya dukungan pada akhirnya membuat Satgas PPKS UI harus menggunakan dana pribadi dalam melakukan kerja-kerjanya. Sementara tim yang diketuai Manneke masih didominasi mahasiswa, yang tidak kuat secara finansial.

> "Anak-anak ini untuk bayar BOP aja setengah mati setiap semester. *Masa* masih harus keluar *duitnya* sendiri. Terus, UI kan *gak* bisa dong bersikap '*ah* mumpung mereka mau sendiri *ya udah*'. Itu kan eksploitasi manusia" (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Sayangnya, jika pendanaan pribadi tim Satgas PPKS UI tidak dilakukan dengan cepat, maka penanganan akan memakan waktu lebih lama dan justru membahayakan korban. Bahkan, bantuan psikologi dari Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Indonesia akhirnya dilakukan secara cuma-cuma untuk menghindari kesulitan birokrasi yang mempersulit pemberian bantuan bagi korban KS di kampus.

Keterbatasan anggaran; kebutuhan akan rumah aman; keterbatasan melakukan edukasi bagi *civitas academica* di seluruh fakultas menjadi hambatan kerja penghapusan KS. Terbatas sumber daya menyebabkan Satgas PPKS UI hanya dapat mengedukasi para pimpinan fakultas dan unit-unit kerja lain apabila mereka mendapatkan arahan dari Rektor atau diundang oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Padahal edukasi yang menyeluruh dan menjangkau semua pihak dibutuhkan untuk menghapuskan KS.

Minimnya dukungan dari universitas sempat menyebabkan Satgas PPKS UI menghentikan masuknya laporan kasus KS. Penghentian kanal pelaporan yang pertama dilakukan pada 24 Juli 2023. Pada Rilis Pernyataan Sikap Resmi yang dipublikasikan oleh Satgas PPKS UI melalui akun Instagram (Instagram Satgas PPKS UI 2023) dipaparkan bahwa pemenuhan fasilitas dan bantuan operasional oleh universitas belum terwujud. Permintaan yang dikirimkan ke Rektor untuk melakukan pertemuan dan diskusi pun tidak pernah dipenuhi sama sekali.

> "Bukan hanya *gak* ada dana, kami menangani puluhan kasus, bagaimana kami bisa bergerak ketika tidak ada support dan ruangan pun *gak* ada. Jadi, waktu kami *interview* orang *tuh* di ruang kerja saya, di ruang kerjanya Bu Kristi, di kantin. Karena *gak* dikasih tempat. Ketika pengumuman (penghentian kanal pelaporan) itu keluar, tiba-tiba ruangan ada" (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Setelah pernyataan sikap resmi tersebut dipublikasikan, pihak universitas akhirnya memenuhi fasilitas berupa ruang kerja, yang berlokasi di Gedung Perpustakaan Lama, Kampus UI Depok. Pada laman berita situs resmi Universitas Indonesia, pihak kampus menyatakan bahwa ruang kerja yang diberikan adalah bukti komitmen terhadap kerja Satgas PPKS UI (Admin 2023). Pada 1 September 2023, kanal pelaporan kembali dibuka, sebelum ditutup kembali pada 4 Maret 2024. Kali ini alasan yang diunggah pada akun Instagram resmi Satgas PPKS UI adalah permasalahan administratif (Instagram Satgas PPKS UI 2024) sehingga dukungan berupa fasilitas ruang kerja masih tidak mampu memenuhi pemenuhan program pendampingan serta pelindungan korban KS.

Komite PPKS FISIP UI

Komite PPKS FISIP UI bekerja dengan efektif pada 10 Agustus 2022 (Komite PPKS FISIP UI, 2024) berdasarkan Peraturan Dekan FISIP UI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Diwawancara pada Senin, 18 Maret 2024, Mamik Sri Supatmi sebagai Ketua Anggota Komite Unsur Dosen memaparkan bahwa pemicu terbentuknya Komite PPKS FISIP UI adalah kasus KS

pada awal tahun 2020 yang dilakukan oleh seorang guru besar. Belasan orang korban yang sudah melapor ke fakultas menjadi desakan terbentuknya sebuah sistem yang memperjuangkan korban KS di FISIP UI.

Semenjak terbentuk, Komite PPKS FISIP UI yang terdiri dari 7 anggota meliputi 4 dosen perempuan, 1 dosen laki-laki, 1 tendik perempuan, dan 1 mahasiswi, telah menerima 5 pelaporan kasus di tahun 2022, 7 kasus di tahun 2023, dan 4 kasus di tahun 2024. Pendampingan korban hingga saat ini mencakup konseling psikologi. Tidak hanya korban, pelaku juga diberikan program rehabilitasi agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulang perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, program edukasi seluruh *civitas academica* FISIP UI turut mewarnai kerja-kerja Mamik dan timnya. Edukasi yang dapat dilihat di sekitar kampus FISIP UI adalah berbagai poster dan spanduk yang mengkampanyekan anti KS. Utamanya ketika perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI), edukasi publik yang meliputi pemutaran film serta diskusi semakin digencarkan lagi.

Hal yang menarik dari edukasi Komite PPKS FISIP UI adalah sosialisasi maupun pelatihan yang diberikan kepada seluruh warga FISIP UI. Pengetahuan mengenai KS dan bentuk-bentuknya diberikan kepada mahasiswa melalui seluruh perwakilan Himpunan Mahasiswa, BEM, dan badan otonom di FISIP serta mahasiswa baru, tendik, staf unit kerja, satpam, tenaga *cleaning service*, dan pedagang kantin melalui sebuah pelatihan. Hal ini menunjukkan upaya Komite PPKS FISIP UI dalam menekankan dan menyadarkan banyak pihak bahwa penanggulangan KS adalah tanggung jawab semua orang.

Komite PPKS FISIP UI tidak bekerja sendiri. Pertemuan rutin dengan himpunan mahasiswa (HIMA) fakultas membuat diseminasi pengetahuan anti KS yang dilakukan menjadi lebih luas dan mencakup banyak orang. Komite PPKS FISIP UI bahkan mengisi salah satu sesi rutin kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Fakultas (PSAF) setiap tahun dan mengedukasi mahasiswa baru mengenai perjuangan melawan KS di kampus FISIP UI.

Keleluasaan yang dimiliki oleh Komite PPKS FISIP UI hingga saat ini mampu mendukung kerja-kerja dalam melawan KS seperti edukasi, sosialisasi, dan pendampingan. Namun, bukan berarti hambatan tidak dialami oleh Mamik dan timnya. Serupa dengan Satgas PPKS UI, dana yang disediakan oleh pimpinan, dalam hal ini dekan, tidak dapat diakses dengan mudah. Berbagai birokrasi harus dilakukan demi dapat membiayai proses pendampingan korban. Sebagai solusi, Komite PPKS UI mengajukan permintaan tambahan staf untuk mengurus keuangan. Akan tetapi, hingga saat ini permintaan tersebut belum diwujudkan.

> "*Kan* tugas kami yang utama adalah mengajar ya, Kak. Ini memang kami lakukan dengan suka rela. Tapi *kan* jadinya rumit kalau harus menerima pelaporan dan *ngurusin* keuangan juga" (Mamik Sri Supatmi 2024, Wawancara 18 Maret).

Selain hambatan adminstratif, terdapat hambatan dalam proses edukasi yang ditujukan oleh dosen. Menurut Mamik, warga FISIP UI lainnya seperti tendik, staf unit kerja, satpam, tenaga *cleaning service*, dan pedagang kantin lebih mudah untuk diberi pengetahuan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Namun mengedukasi dosen jauh lebih sulit karena sebagian dosen merasa sudah paham isu ini, padahal tidak. Hal ini sejalan dengan ide Haraway (1988) bahwa relasi pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Sosialisasi pengetahuan tentang KS kepada pihak yang berkuasa, seperti dosen, dosen senior, dan pejabat kampus lebih sulit dilakukan. Sebagian lagi merasa terlalu melebih-lebihkan isu KS. Ada juga yang mengatakan bahwa kampus tidak perlu mengurus kasus KS sebab itu urusan pidana.

Selain sulit untuk diberi edukasi, pengalaman Komite PPKS UI dalam mewawancara pelaku menunjukkan sulitnya dosen sebagai pelaku kekerasan seksual, dalam menerima kesalahan dan sanksi serta rehabilitasi yang diupayakan untuk mereka. Oleh sebab itu, peraturan memberikan sanksi yang lebih berat kepada para dosen dari mulai tidak boleh mengajar hingga pencopotan jabatan jika mereka sedang menjabat. Perilaku dosen yang tidak sensitif berbeda dengan mahasiswa yang lebih mudah untuk diberi sanksi sebab kekuasaan yang dimiliki lebih terbatas. Mahasiswa pelaku KS yang ditangani oleh Komite PPKS FISIP UI mayoritas berkenan bekerja sama dengan baik dan mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Dengan mudah, mereka diedukasi dan diberi sanksi sehingga tidak mengulang perbuatannya di masa yang akan datang.

> "Mudah-mudahan tidak hanya mahasiswa, namun seluruh warga kampus, khususnya dosen, pimpinan fakultas, dan guru besar memahami dan menghormati kebertubuhan setiap orang, setiap perempuan, termasuk yang bukan bagian dari tubuh heteronormativitas" (Mamik Sri Supatmi 2024, Wawancara 18 Maret).

HopeHelps UI

Dibandingkan dengan Satgas PPKS UI dan Komite PPKS FISIP UI, HopeHelps UI sudah bekerja secara efektif lebih lama yaitu sejak tahun 2017. Pemicunya adalah kasus KS yang tidak terlapor sehingga para penggagasnya, didominasi oleh mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), kemudian mendirikan HopeHelps UI. Kini sudah ada jaringan HopeHelps di 17 kampus yang berbeda baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dibawahi oleh HopeHelps Network yang resmi dibentuk tahun 2020.

Diwawancarai pada Jumat, 15 Maret 2024, Mawla Atqiyya Muhdiar adalah Wakil Direktur HopeHelps UI yang memulai aktivismenya dengan menjadi staf divisi advokasi di tahun 2022. Berbeda dengan Satgas PPKS UI dan Komite FISIP UI, HopeHelps memiliki keunggulan di sumber daya manusia yang terdiri dari 36 anggota. Seluruhnya merupakan mahasiswa aktif yang mendapatkan dukungan dari alumni, utamanya para pencetus berdirinya HopeHelps UI. Menurut Mawla, para alumni juga merupakan pihak-pihak yang ikut menyusun Permendikbudristek PPKS Nomor 30 tahun 2022. Mereka lah yang ikut mengusulkan didirikannya Satgas PPKS di setiap kampus. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari para mahasiswa dan alumni FH UI yang mayoritas memahami sistem hukum dan perundang-undangan.

> "Jadi HopeHelps itu pertama kali *banget* adanya itu sekitar tahun 2017. Dan awalnya itu, *seinget* aku itu inisiatornya alumni-alumni FH UI. Kenapa? Karena pada tahun itu ada salah satu kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani di kampus. *Kayak*, korbannya juga *gak* tau harus *ngelapor* ke siapa. Jadinya sekelompok mahasiswa itu berinisiatif lah bikin HopeHelps. Dan ternyata tahun 2020, itu HopeHelps jadi HopeHelps Net. Jadi *gak* cuma di UI *aja*" (Mawla Atqiyya Muhdiar 2024, Wawancara 15 Maret).

Gerakan ini seperti yang disebutkan oleh Ahmed sebagai solidaritas feminis. Solidaritas adalah ketika kita merasakan rasa frustasi terhadap sebuah situasi tetapi di saat bersamaan merasakan afeksi atau kepedulian terhadap orang atau kelompok lain yang merasakan penderitaan. Ada rasa kesalingan/kesamaan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Solidaritas artinya tidak membiarkan seseorang berjuang sendiri, melainkan menjadi bagian di dalamnya (Ahmed 2017, hlm. 217).

Di saat Mawla bekerja sebagai staf divisi advokasi, pada tahun 2022 hingga 2023, ia dan timnya menerima sebanyak 110 pelaporan dan di tahun 2024 sebanyak 9 pelaporan. Hal ini menunjukkan gentingnya perlawanan akan KS di dalam kampus Universitas Indonesia. Selain itu, karena absennya pusat pelaporan, seperti Satgas PPKS UI yang baru efektif bekerja pada tahun 2022, HopeHelps menjadi tempat mengadu para korban.

Dalam memenuhi kebutuhan korban, HopeHelps UI bertugas mengumpulkan pelaporan dan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan *agar* kasus diteruskan ke Satgas PPKS UI dan ditangani lebih lanjut. Menurut Mawla, korban memang lebih banyak yang melapor ke HopeHelps terlebih dahulu sebelum kemudian diarahkan untuk meneruskan pengaduannya ke Satgas PPKS UI baik secara individu maupun diteruskan oleh HopeHelps UI.

> "Menurut aku, HopeHelps itu cukup membantu sebagai gawat daruratnya *sih*. Kayak First Aid. Aku *tuh* ngebayanginnya ada korban yang *bener-bener* baru *banget* tertimpa kasus kekerasan seksual. Masih meraba-raba harus ngelapor ke mana masih bingung cerita ke siapa; ke Satgas *kok kayaknya intimidating*, ke temen-temen *kok gak* ada yang *ngerti*. Setidaknya HopeHelps bisa kasih First Aid-nya itu dan kasih dorongan sampai akhirnya mereka berani untuk melapor ke figur-figur yang bisa menangani lebih lanjut. Kami juga bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka juga" (Mawla Atqiyya Muhdiar 2024, Wawancara 15 Maret).

Selain Satgas PPKS UI, HopeHelps UI sudah merangkul BEM, HIMA, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dari berbagai fakultas. Dengan demikian, laporan yang diterima oleh BEM dapat langsung diteruskan kepada HopeHelps UI untuk ditangani dengan lebih profesional. Konseling psikologi turut menjadi bagian dari pendampingan yang diberikan. Kerja sama yang berhasil dijalin oleh HopeHelps UI adalah dengan Biro Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya. Sementara untuk pendampingan hukum, Kolektif Advokat Keadilan Gender (KAKG), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) adalah beberapa rekanan HopeHelps UI di dalam menangani kasus-kasus KS yang membutuhkan advokasi hukum.

Keberhasilan HopeHelps UI dalam berjejaring dan merespons pengaduan dari korban secara cepat tentu tidak luput dari hambatan. Sifat kontribusi suka rela membuat HopeHelps UI sempat kehilangan 2 orang tim advokasi di tahun 2023. Selain itu, walaupun memiliki uang kas, pendanaan juga tidak pasti karena tergantung dari pihak-pihak yang berkenan mensponsori. Hambatan dukungan sering kali terjadi karena HopeHelps UI, yang terdiri dari mahasiswa-

mahasiswa aktif, diremehkan oleh sesama rekan-rekan mahasiswa. Minimnya kepercayaan menjadi hambatan lain ketika pelaporan melibatkan pejabat-pejabat organisasi kampus sebagai pelaku KS. Mawla pun mengeluhkan adanya tekanan dari 'abang-abangan' kampus yang memusuhi HopeHelps UI.

> "HopeHelps ini *tuh* cukup dimusuhi oleh abang-abangan kampus. *Kayak*, kita menjadi *common enemy, gitu*. Karena kita mengadvokasikan suara korban, Kak. Jadi suka (meledek kami) SJW (Social Justice Warrior), *gitu*. Abang-abangan kampus *tuh* kayak, *gimana,* ya*, basically* mereka *tuh* pelaku (KS) *and the gang gitu loh*, Mbak. Itu *kan* biasanya mereka satu tipe *gitu* ya, Mbak. Biasanya mereka dengan gengnya, dengan tongkrongannya itu udah terkenal aja *gitu*" (Mawla Atqiyya Muhdiar 2024, Wawancara 18 Maret).

Stereotip terhadap para korban dan pendamping KS yang bersuara menurut Ahmed (2023) adalah bentuk pembungkaman. Kerja mereka dikecilkan, distigma, dan dimonsterisasi agar gentar dan berhenti menyuarakan persoalan. Tidak jarang karena situasi semacam ini, korbanpun menarik laporannya.

Menyoroti Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia

Dari ketiga pengalaman organisasi anti kekerasan seksual di Universitas Indonesia, dapat dilihat implementasi dari tiga strategi yang dipaparkan oleh Levine (2018) pada tabel berikut.

Tabel 1. Implementasi Strategi Kerja Kolektif Organisasi Anti KS di UI

Organisasi	Membangun Kemitraan	Meningkatkan Kesadaran dan Pencegahan	Membingkai Ulang Masalah
Satgas PPKS UI	• Tidak dapat dijalin dengan optimal karena mobilitas Satgas PPKS UI dibatasi penugasan dari Rektor dan undangan dari pihak-pihak yang membutuhkan saja.	• Edukasi hanya terbatas di kalangan BEM, komunitas anti KS lainnya, dan komunitas pers kampus saja.	• Sulit karena pimpinan tidak menganggap perlawanan terhadap KS sebagai hal penting untuk diperjuangkan. • Prioritas dalam mengedepankan dukungan bagi kerja-kerja Satgas PPKS UI akan sulit diwujudkan karena Rektor masih belum memenuhi permintaan diskusi yang dikirimkan.
Komite PPKS FISIP UI	• Sudah terjalin secara eksternal dari pihak komite sendiri dengan HIMA, staf, tendik, satpam, hingga karyawan kantin. • Menghadirkan psikolog untuk membantu korban dan merehabilitasi pelaku. • Kemitraan yang dijalin secara internal dengan pihak pimpinan fakultas tersendat di masalah akses keuangan. • Usulan tambahan staf keuangan untuk Komite PPKS FISIP UI pun belum dipenuhi.	• Mengalami tantangan akibat ketimpangan kekuasaan yaitu senioritas antara dosen dan mempersulit edukasi dosen akan isu KS. • Kerja Komite PPKS FISIP UI tidak jarang diwarnai pembungkaman, ejekan, sindiran, hingga minimnya dukungan bagi kerja mereka.	• Belum ada inisiatif apalagi langkah nyata dari FISIP UI untuk memasukkan materi isu gender dan kekerasan seksual dalam perkuliahan atau kurikulum dan memastikan setiap unit kerja memiliki kode etik nol toleransi terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual.
HopeHelps UI	• Pergerakan yang sangat fleksibel dalam menjalin jejaring dan pencarian dana. • Tidak perlu mendapatkan penugasan layaknya Satgas PPKS UI yang memerlukan perintah rektor untuk bisa memperluas kinerja mengedukasi masyarakat kampus. • HopeHelps UI terdiri dari mahasiswa-mahasiswa aktif yang paham betul urgensi perjuangan melawan KS sehingga jejaring dan edukasi dapat mereka lakukan dengan lebih leluasa di lebih dari satu fakultas.	• Berhasil merangkul BEM, HIMA, dan DPM dari berbagai fakultas. Keuntungan dari memiliki anggota sesama mahasiswa adalah kemudahan komunikasi dan pemikiran yang sama akan pentingnya perlawanan terhadap KS.	• HopeHelps UI lebih unggul dalam mendekonstruksi pola pikir warga kampus yang patriarkis, utamanya mahasiswa karena cakupannya lebih luas. • Adanya kesetaraan pengetahuan dan pola pikir di antara mahasiswa yang merupakan staf HopeHelps UI maupun rekanan di BEM, HIMA, dan DPM.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan wawancara Organisasi Anti KS di UI

Hambatan yang dialami Satgas PPKS UI disebabkan pola pikir yang tidak hanya melanggengkan namun juga menyuburkan KS di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tersituasi mengenai budaya ketimpangan relasi di antara para *civitas academica*, yaitu dosen, mahasiswa, dan staf serta tendik, masih terjadi. Selain itu, para anggota Satgas PPKS UI sering kali menggunakan dana pribadi untuk membantu korban. Ketiga strategi yang ditawarkan Levine juga tidak mampu meningkatkan dukungan kampus. Sesuai dengan konsep Haraway (1988), hal ini dipengaruhi objektivitas pengetahuan yang didominasi oleh pola pikir patriarkis. Sara Ahmed (2017) turut menyadari tidak adanya kepekaan terhadap KS menyebabkan kampus tidak mengutamakan pengalaman korban. Walaupun ketiga strategi telah diupayakan, rendahnya kesadaran institusi Perguruan Tinggi dalam memberikan dukungan optimal masih menghambat kinerja Satgas PPKS dalam mengupayakan keadilan bagi korban KS di Universitas Indonesia. Akibatnya, tepat tanggal 1 April 2024 para anggota Satgas PPKS UI mengundurkan diri (Satgas PPKS UI 2024).

Minimnya dukungan dari pimpinan universitas menunjukkan bahwa pembentukan Satgas PPKS UI hanya sekadar syarat untuk memenuhi amanat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saja. Akibatnya, kinerja Satgas PPKS UI tidak berjalan dengan ideal. Bagi penulis, mundurnya Satgas PPKS adalah pernyataan sikap kekecewaan dan kegeraman janji palsu institusi yaitu dengan adanya harapan penghapusan KS melalui pembentukan Satgas TPKS. Namun, dalam implementasinya, mereka tidak didukung melakukan kerjanya.

Untuk kerja-kerja Komite PPKS FISIP UI, dapat disimpulkan bahwa pergerakan kolektif organisasi masih sering tersandung oleh wadah mereka berjuang. Salah satunya adalah lambatnya proses keuangan yang dapat membantu mendanai pendampingan korban. FISIP UI menjadi kelompok masyarakat yang memiliki tanggung jawab memberantas KS di antara *civitas academica* dan warganya. Akan tetapi, sesuai dengan konsep yang disampaikan Haraway (1988), dengan pengetahuan serta budaya patriarkis yang mendominasi, melanggengkan senioritas, serta lebih mementingkan citra baik institusi dengan menutup-nutupi kasus KS, maka penerapan tiga strategi dalam menggerakkan dan merangkul komunitas (Levine 2018) di FISIP UI masih belum ideal dalam eksekusinya.

Berbeda dengan Satgas PPKS UI, dilihat dari tiga strategi yang dipaparkan oleh Levine (2018), kerja-kerja yang dilakukan oleh HopeHelps UI bila dibandingkan dengan dua organisasi lainnya memiliki keleluasaan karena mereka tidak terkungkung oleh struktur kampus sebab dibangun secara swadaya. Mawla dan timnya dikelilingi oleh pihak-pihak yang pengetahuannya didominasi oleh sensitivitas isu gender, utamanya KS. Konsep objektivitas milik Haraway (1988) membantu HopeHelps UI dalam memberantas KS karena seksisme dan KS tidak dilanggengkan oleh mitra-mitra mereka.

Upaya HopeHelps UI dalam berjejaring tentu masih terhambat sponsor yang tidak pasti, stereotip, dan monsterisasi perjuangan perlawanan KS. Di dalam membingkai ulang masalah menggunakan edukasi dan sosialisasi, HopeHelps UI memang berhasil merangkul organisasi-organisasi mahasiswa. Akan tetapi, berada di dalam lingkungan kampus yang didominasi pengetahuan serta pola pikir patriarki mengakibatkan adanya kelompok-kelompok yang melawan perjuangan mereka.

Persoalan yang ditemukan pada tiga organisasi tersebut dalam penanganan KS di Universitas Indonesia menunjukkan kurangnya dukungan kolektif yang menyeluruh hingga tataran petinggi kampus—sebagai pengambil kebijakan. Jika kerja ini diasumsikan merupakan porsi kerja per organisasi. Tanpa ada kesadaran bahwa ini tugas dan tanggung jawab bersama, maka upaya menghapuskan KS di tingkat universitas akan sulit terwujud. Ini sebabnya, penting mengupayakan kerja kolektif yang sistematik agar kita sampai pada kesamaan persepsi: KS adalah persoalan genting yang harus kita hentikan bersama.

Penutup

Untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari Kekerasan Seksual (KS), komitmen yang kuat dari institusi pendidikan diperlukan. Tidak cukup hanya dengan keberadaan peraturan dan Satgas tanpa dukungan nyata berupa pendanaan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penghapusan KS oleh organisasi secara kolektif: kerja sama yang menguntungkan, edukasi, dan pembingkaian ulang masalah berdasarkan konsep Levine (2018). Namun, konsep Levine perlu diperkaya dengan perspektif feminis tentang pengetahuan yang tersituasi, kritik terhadap objektivitas dan netralitas yang dapat memperpetuasi ketimpangan, serta pentingnya melibatkan perspektif marginal, inklusif, pemeriksaan kekuasaan, dan solidaritas feminis.

Berdasarkan paparan tulisan di atas, sejumlah upaya kolektif penghapusan KS telah menghadapi keberhasilan dan tantangan masing-masing. Namun, tulisan ini menyoroti bahwa hadirnya Permindikbudristek Nomor 30 tahun 2021 dan mandat pembentukan Satgas PPKS tidak cukup. Komitmen seluruh pihak, utamanya kampus harus kuat. Sangat disayangkan bahwa pendanaan sebagai salah satu kebutuhan utama kegiatan mereka tidak terdapat di peraturan tersebut dan dana mandiri dari kampus sulit untuk diakses pada saat-saat genting dalam mendukung korban KS. Pihak-pihak yang terlibat menjadi terlihat seperti melakukan pekerjaan secara sukarela di luar kerja-kerja utama mereka sebagai akademisi. Pemberian dukungan berupa pendanaan dan pelibatan pengetahuan tersituasi kelompok yang relevan, seperti korban, aktivis penghapusan KS di kampus, dosen yang berperspektif feminis, kelompok pendamping, dan berbagai pihak relevan lainnya harus dilibatkan dan diakomodir dalam kebijakan juga program penghapusan KS di tingkat kampus juga fakultas.

Ketiga organisasi yang dibahas pada tulisan ini menunjukkan bagaimana kekuatan kerja kolektif adalah motor perubahan. Baik Satgas PPKS, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI melakukan perlawanan KS bermodalkan komitmen pada keadilan bagi korban, empati, dan solidaritas. Komitmen kampus pada penghapusan KS tidak cukup berhenti pada pembentukan Satgas, melainkan dukungan administratif, dan pendanaan. Dalam kasus mundurnya Satgas PPKS per 1 April 2024 lalu, sebagai bentuk kegeraman dan frustasi para Satgas PPKS pada kampus UI. Berdasarkan perspektif feminis, sikap netral dan abainya kampus pada seruan Satgas PPKS menunjukkan ketidakberpihakan kampus pada penghapusan KS.

Daftar Pustaka

Ahmed, S. 2017. *Living a Feminist Life.* Duke University Press: Durham.

Ahmed, S. 2023. *The Feminist Killjoy.* Penguin Books Limited: London.

Davis, K. 2017. "Poll: Sex Harassment Caused 41 percent of Female Victims to Leave their Jobs", *sandiegouniontribune.com*, diakses pada 28 Maret 2024, di https://www.sandiegouniontribune.com/business/economy/sd-me-harassment-survey-20171220-story.html.

Dominelli, L. 1995. "Women in the Community: Feminist Principles and Organising in Community Work", *Community Development Journal,* Vol. *30*(2), hlm. 133--143. doi:https://www.jstor.org/stable/44252837.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). 2024. "Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia", *fisip.ui.ac.id*, diakses pada 21 Maret 2024, di https://fisip.ui.ac.id/en/kppks/.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Peraturan Dekan FISIP UI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Freccero, J., Harris, L., Carnay, M., & Taylor, C. 2011. *Responding to Sexual Violence: Community Approaches.* University of California: Berkeley.

Haraway, D. 1988. "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", *Feminist Studies,* Vol. 14(3), hlm. 575--599. https://www.jstor.org/stable/3178066.

Harding, S. 2016. Strong Objectivity and Socially Situated Knowledge. In S. Harding, *Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives*. Cornell University Press: Ithaca.

Heise, L. L. 1998. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework", *Violence Against Women*, Vol. 4, hlm. 262--290. https://www.researchgate.net/publication/11127184_Violence_Against_Women_An_Integrated_Ecological_Framework.

Howard, L. G. 2007. *The Sexual Harassment Handbook.* Weiser: San Fransisco.

Irianto, S. 2021. "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(2), hlm. 135--141. http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/576/418.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 2021. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022.* Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Jakarta.

Levine, E. C. 2018. "Engaging the Community", *Journal of Applied Social Science,* Vol. 12(2), hlm. 82--97. https://www.jstor.org/stable/26500265.

Ludlow, J. 2004. "From Safe Space to Contested Space in the Feminist Classroom", *Transformations: The Journal of Inclusive Scholarship and Pedagogy,* Vol. 15(1), hlm. 40--56. https://www.jstor.org/stable/10.5325/trajincschped.15.1.0040.

Noer, K. U., Hendrastiti, T. K., Nurtjahyo, L. I., & Damaiyanti, V. P. 2022. "Strengthening the Role of Communities in the Prevention", *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2022*, No. 778. DOI:https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_61.

Nurhadi. 2022. "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS", *nasional.tempo.co*, diakses pada 20 Mei 2022, di https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uutpks/full&view=ok.

Nurita, D. & Wibowo, K. S. 2022. "Pengesahan UU TPKS Diapresiasi Dinilai Berpihak pada Korban", *nasional.tempo.co*, diakses pada 18 Maret 2024, di https://nasional.tempo.co/read/1581447/pengesahan-uu-tpks-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban.

Putri, R. D. 2024. "Peluncuran Publikasi Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Upaya Penyeragaman Pemahaman UU TPKS demi Mewujudkan Keadilan bagi Korban", jurnalperempuan.org, diakses pada 18 Maret 2024, di https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/peluncuran-publikasi-akademi-penghapusan-kekerasan-seksual-upaya-penyeragaman-pemahaman-uu-tpks-demi-mewujudkan-keadilan-bagi-korban.

Putri, R. D., Boang Manalu, A. G., & Subono, N. I. 2022. "Aktivis Feminis Akademik: Pengetahuan Perempuan untuk Resistensi, Harapan, dan Perubahan Sosial. Kontribusi Jurnal Perempuan dalam Membangun Diskursus Feminisme di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 27(2), hlm. 113--128.

QS Top Universities. 2024. "Universitas Indonesia", *topuniversities.com*, diakses pada 18 Maret 2024, di https://www.topuniversities.com/universities/universitas-indonesia.

Radina, M. E. 2017. "Sisterhood and Sexual Assault: Engaging Sorority Members in Dialogue, Critical Analysis, and Feminist Praxis", *Family Relations,* Vol. 66(1), hlm. 126--138. https://www.jstor.org/stable/45090939.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Satgas PPKS UI. 2023. "Penghentian Sementara Penerimaan Laporan Kasus Kekerasan Seksual", *instagram.com*, diakses pada 17 Maret 2024, di https://www.instagram.com/p/C2BvtiLy_yd/?img_index=1.

Satgas PPKS UI. 2024. "Statistik Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia Tahun 2023", *instagram.com*, diakses pada 15 Maret 2024, di https://www.instagram.com/p/C23xraePnqf/?img_index=1.

Satgas PPKS UI. 2024. "Pengumuman: Penghentian Penerimaan Laporan Kasus Baru", *instagram.com*, diakses pada 22 Maret 2024, di https://www.instagram.com/p/C4Figcayfx_/?img_index=1.

Satgas PPKS UI. 2024. "1 Tahun Satgas PPKS UI: UI Masih Darurat Kekerasan Seksual!", *instagram.com*, diakses pada 31 Maret 2024, di https://www.instagram.com/p/C2FbGNXyxlY/?igsh=MTV4MjdqNjY3Mm9o.

Satgas PPKS UI. 2024. "Satgas PPKS UI Periode 2022--2024 Pamit Undur Diri", *instagram.com*, diakses pada 9 April 2024, di https://www.instagram.com/p/C5OSTmRIkD4/.

Universitas Indonesia. Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia (Pertor PPKS).

Widiantini, I. 2021. "Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis", *Jurnal Perempuan,* Vol. 26(2), hlm. 111--119. http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/585/416.

Wooten, S. C. 2015. Heterosexist Discourses: How Feminist Theory Shaped Campus Sexual Violence. In S. C. Wooten & R. W. Mitchell, *The Crisis of Campus Sexual Violence: Critical Perspectives on Prevention and Response.* Routledge: New York.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH
JURNAL PEREMPUAN

http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:

   Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

   Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf

   Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

   Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.

   "Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24,
Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992

1410 1533

Patung sampul depan: "Solidaritas" (Dolorosa Sinaga, 2000)